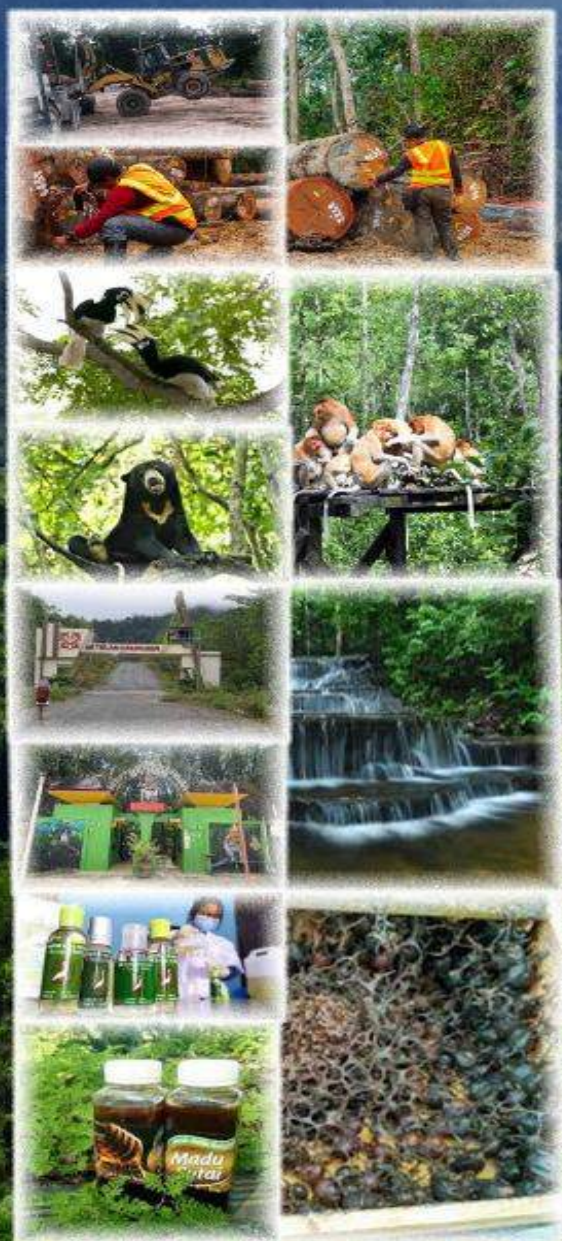


Rencana Strategis

2021 - 2026



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2021



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Rencana Strategis disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan renstra dengan mengidentifikasi permasalahan utama/kondisi pemungkin dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Strategis ini memuat kebijakan makro, diharapkan dapat dijadikan acuan umum dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan pada lima tahun kedepan yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Akhirnya, kepada semua pihak yang berperan dalam Penyusunan Rencana Strategis ini, khususnya alm. Bapak Sony Yuwono, SE.Ak., M.Si selaku *Provincial Development Planning Consultant* untuk *Global Green Growth Institute (GGGI)* Indonesia diucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-18
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	II-18
2.2.2 Sarana dan Prasarana	II-20
2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan.....	II-22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan	II-28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan	III-2
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-4
3.3. Telaahan Rensta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-11
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang	III-11
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-14
3.5. Penentuan Isu-isu strategis.....	III-21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 	VI-1



BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-18
Tabel 2.2	Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-18
Tabel 2.3	Komposisi SDM berdasarkan Eselon.....	II-19
Tabel 2.4	Komposisi SDM berdasarkan Golongan Ruang.....	II-19
Tabel 2.5	Komposisi SDM PTT (Pegawai Tidak Tetap) berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-19
Tabel 2.6	Komposisi SDM ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-20
Tabel 2.7	Perlengkapan Penunjang OPD.....	II-20
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan....	II-23
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	II-23
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Nunukan.....	II-23
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Malinau.....	II-23
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan UPTD KPH Tana Tidung.....	II-23
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Tarakan.....	II-23
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Bulungan.....	II-23
Tabel 2.15	Evaluasi Renja Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	II-23
Tabel 2.16	Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Nunukan.....	II-23
Tabel 2.17	Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Malinau.....	II-23
Tabel 2.18	Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Tana Tidung.....	II-23
Tabel 2.19	Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Tarakan.....	II-23
Tabel 2.20	Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Bulungan.....	II-23



Tabel 2.21	Data Penyuluh Kehutanan Tahun 2021.....	II-25
Tabel 2.22	Rincian Luas dan Fungsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP Prov. Kaltara.....	II-26
Tabel 2.23	Jumlah Hotspot Per Kabupaten / Kota dan Luas Kebakaran Hutan Tahun 2015 – 2020 di Provinsi Kalimantan Utara.....	II-27
Tabel 2.24	Sasaran Jangka Menengah KLHK.....	II-28
Tabel 2.25	Sasaran, Indikator dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.....	II-29
Tabel 2.26	Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara (KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi; HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi).....	II-30
Tabel 2.27	Tabel Tutupan Lahan.....	II-33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-2
Tabel 3.2	Sasaran Jangka Menengah KLHK.....	III-9
Tabel 3.3	Sasaran, Indikator dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.....	III-10
Tabel 3.4	Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara (KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi; HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi).....	III-11
Tabel 3.5	Tabel Tutupan Lahan.....	III-14
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-2
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	V-2



Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kehutanan.....	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPTD KPH Nunukan.....	VI-2
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPTD KPH Malinau.....	VI-2
Tabel 6.4	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPTD KPH Tana Tidung.....	VI-2
Tabel 6.5	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPTD KPH Tarakan.....	VI-2
Tabel 6.6	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPTD KPH Bulungan.....	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang mengacu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.....	VII-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.....	II-4
Gambar 2.2 Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Utara.....	II-31
Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara.....	II-32
Gambar 2.4 Presentase Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara.....	II-34
Gambar 2.5 Peta resiko kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Utara	II-36
Gambar 2.6 Peta Resiko longsor Provinsi Kalimantan Utara.....	II-37
Gambar 2.7 Peta Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Utara.....	II-38
Gambar 2.8 Peta Distribusi Gajah Mini dan Bekantan Provinsi Kalimantan Utara	II-39
Gambar 3.1 Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Utara.....	III-12
Gambar 3.2 Peta Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara.....	III-13
Gambar 3.3 Presentase Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara.....	III-15
Gambar 3.4 Peta resiko kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Utara	III-17
Gambar 3.5 Peta resiko longsor Provinsi Kalimantan Utara.....	III-18
Gambar 3.6 Peta Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Utara.....	III-19
Gambar 3.7 Peta Distribusi Gajah Mini dan Bekantan Provinsi Kalimantan Utara	III-20



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 pengertian Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Renstra Perangkat tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 penyusunan renstra harus diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu renstra memiliki peranan penting yaitu sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi termuda di Indonesia yang memiliki luas wilayah sekitar 7.546.770 km² memiliki kawasan hutan seluas 6.997.155 ha berdasarkan SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 yang tersebar di Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Utara. Kekayaan Sumber Daya Hutan yang telah dikaruniakan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan anugerah yang harus disyukuri, dimanfaatkan serta dijaga kelestariannya demi keseimbangan lingkungan dan perekonomian, baik sekarang dan di masa yang akan datang.



Posisi strategis Sumber Daya Hutan dalam menopang pembangunan daerah Kalimantan Utara memiliki 2 (dua) peran dalam pembangunan yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi, dalam hal ini penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pembangunan perekonomian nasional dan daerah serta masyarakat. Yang kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, udara, stabilitas tanah dan daya dukung lingkungan serta penopang kehidupan.

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dalam perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 memiliki Visi **“Berubah Maju dan Sejahtera”**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus Memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kerangka posisi dan peran pembangunan Kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 melalui sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, tata lingkungan yang seimbang, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan flasma nutfah, Daerah Aliran Sungai yang tertata hulu hilirnya, serta tata udara yang baik dalam hal mengontrol polusi. Dalam konteks pembangunan lingkungan peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



Renstra Dinas Kehutanan Kaltara merupakan dokumen perencanaan managerial strategis untuk periode 5 tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2021–2026. Dalam rangka keterpaduan pembangunan kehutanan, terkait pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021–2024, telah menetapkan 4 (Empat) kebijakan prioritas yaitu:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dan
4. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan konsisten mengacu pada renstra ini yang akan dijadikan arahan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di daerah sesuai dengan tupoksinya. Selain kebijakan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi juga melihat isu-isu strategis yang ada di daerah yang sangat berdampak ada pembangunan dan kondisi kehutanan sekarang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang



Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 645, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
24. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 56);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 28).



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021–2026 adalah sebagai dasar bagi seluruh parapihak dan seluruh aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan renstra ini adalah :

1. Untuk mengetahui capaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Periode Sebelumnya.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Sekretariat.
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja.
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelayanan berdasarkan telaahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut



Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah. Organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pergub 66 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas Pembantuan serta tugas Dekonsentrasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;



- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai unsur pelaksana: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPTD KPH, 8 (delapan) Kepala Sub Bagian dan 22 (dua puluh dua) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, yang membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan & Tata Hutan;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP.

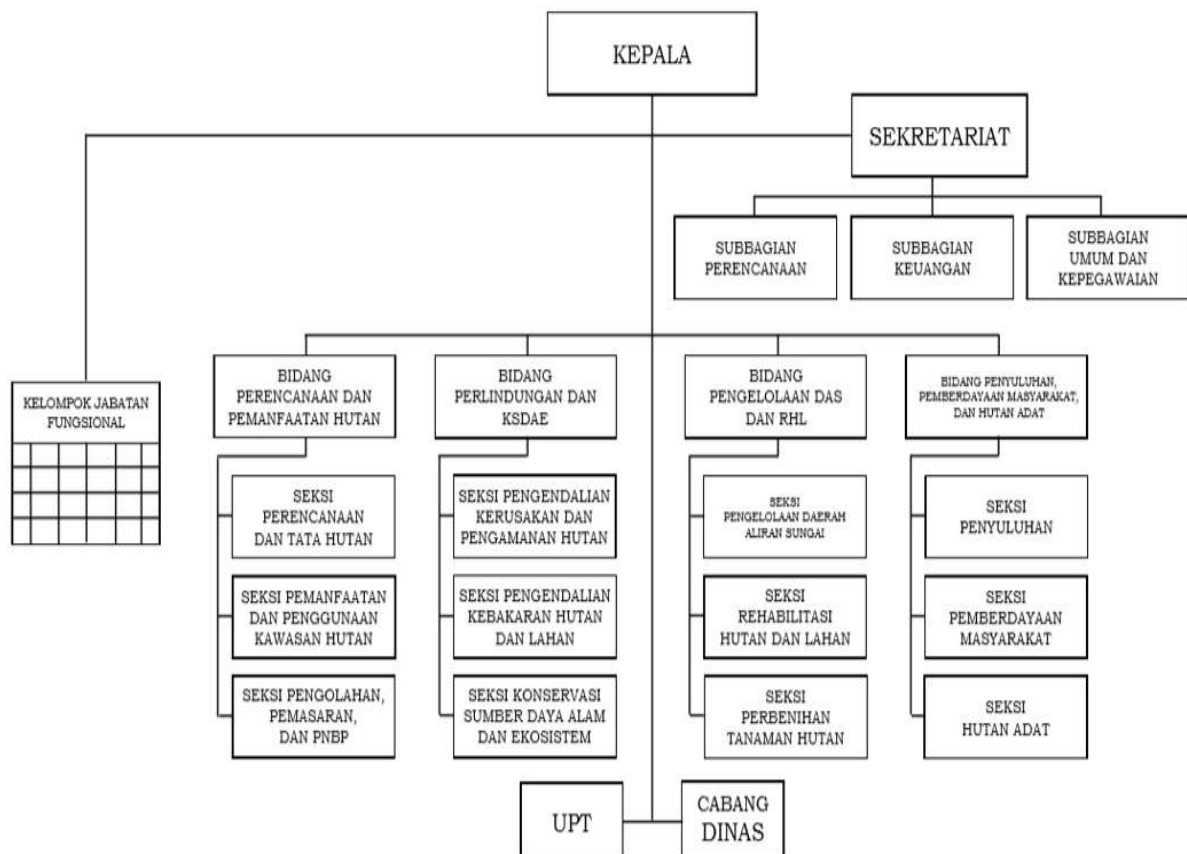


4. Bidang Perlindungan Hutan & KSDAE, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem.
5. Bidang Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat yang membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Hutan Adat.
7. UPTD KPH Tarakan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
8. UPTD KPH Bulungan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
9. UPTD KPH Nunukan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.



10. UPT KPH Malinau, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
11. UPTD KPH Tana Tidung, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Hutan :

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Rincian tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem:

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan:



- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.

Rincian tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat:

- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
- c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;



- d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tarakan

UPTD KPH Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja UPTD KPH Tarakan.

Fungsi UPTD KPH Tarakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tarakan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tarakan; dan
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tarakan.

7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulungan

UPTD KPH Bulungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Bulungan.

Fungsi UPTD KPH Bulungan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Bulungan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,



penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;

- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Bulungan; dan
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Bulungan.

8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan

UPTD KPH Nunukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Nunukan.

Fungsi UPTD KPH Nunukan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Nunukan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Nunukan; dan
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Nunukan.

9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malinau

UPTD KPH Malinau mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Malinau.



Fungsi UPTD KPH Malinau adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Malinau yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Malinau; dan
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Malinau.

10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tana Tidung

UPTD KPH Tana Tidung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPH Tana Tidung.

Fungsi UPTD KPH Tana Tidung adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tana Tidung yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tana Tidung; dan
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH Tana Tidung.



Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap bidang dan seksi yang berada di lingkup Dinas Kehutanan. Standar Operasional Prosedur (SOP) berisikan urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Standar Operasional Prosedur yang ada pada Dinas Kehutanan adalah :

1. Sekretariat

1.1 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- SOP Pengurusan Izin Belajar;
- SOP Pengurusan Kartu Pegawai;
- SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat;
- SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala;
- SOP Pengurusan Pengajuan Pensiun;
- SOP Nota Dinas;
- SOP Pengurusan Pengajuan Cuti PNS;
- SOP Telaahan Staff;
- SOP Pengurusan Kartu Istri dan Suami;
- SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah / Aset;
- SOP Penghapusan Barang Milik Daerah / Aset;
- SOP Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang;
- SOP Surat Masuk;
- SOP Surat Keluar;
- SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa;
- SOP Permintaan / Pengeluaran Barang.



1.2 Sub. Bagian Perencanaan

- SOP Pelaksanaan kegiatan;
- SOP Penyusunan perjanjian kinerja;
- SOP Penyusunan buku rencana kinerja tahunan;
- SOP Rencana kerja dan anggaran;
- SOP Pengelolaan sistem informasi bidang kehutanan melalui media cetak;
- SOP Penyusunan kalender kegiatan;
- SOP Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKj);
- SOP Penyusunan renstra;
- SOP Penyusunan renja;
- SOP Penyusunan laporan;
- SOP Penyusunan prioritas pagu anggaran sementara (PPAS dan PPAS-P);
- SOP Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip).

1.3 Sub. Bagian Keuangan

- SOP Pencairan uang panjar;
- SOP Pembuatan dokumen keuangan;
- SOP Penerimaan pendapatan;
- SOP Verifikasi keuangan;
- SOP Penyusunan laporan keuangan;
- SOP Penatausahaan pengajuan ganti uang (GU);
- SOP Pengajuan spj-ls barang dan jasa;
- SOP Pembukuan.

2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

2.1 Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

- SOP Klarifikasi status kawasan hutan dan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB);
- SOP Penyediaan peta tematik kehutanan;



- SOP Usulan revisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB);
- SOP Kajian teknis pertimbangan gubernur pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- SOP Penerbitan pertimbangan gubernur areal pengganti tukar menukar kawasan hutan.

2.2 Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);
- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di bawah 5 (lima) hektar untuk kepentingan non komersial;
- SOP Evaluasi dalam rangka perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);
- SOP Pertimbangan teknis izin permohonan iuphhk-ha/hti;
- SOP Persetujuan RKTUPHHK-HA;
- SOP Persetujuan RKTUPHHK -HTI;
- SOP Persetujuan pembuatan koridor;
- SOP Persetujuan penggunaan koridor;
- SOP Persetujuan IPK pada APL yang telah mendapat izin peruntukan;
- SOP Persetujuan IPK Pada Areal KPK Yang Telah Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- SOP Persetujuan Perpanjangan IPK;
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHKBK-ha/hti Pada Hutan Produksi;
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IPHHBK;
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUIPHHK;
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUIPHHBK;
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA);



- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam-Hutan Produksi (IUPSWA-HP);
- SOP Keputusan Hasil Verifikasi Keberadaan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

2.3 Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP

- SOP Penilaian Dan Persetujuan Petugas P2LP-HHBK;
- SOP Pemberian Nomor Seri FA-HHBK;
- SOP Rekonsialisasi PNBP.

3. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE

3.1 Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan

- SOP Intelijen/Pulbaket;
- SOP Operasi Gabungan;
- SOP Patroli Fungsional Pengamanan Hutan;
- SOP Patroli Simpatik Pengamanan Hutan;
- SOP Patroli Pengamanan Hutan Bersama.

3.2 Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- SOP Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
- SOP Cross Check Hot Spot;

3.3 Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

- SOP Identifikasi Dan Inventarisasi Lokasi Ekosistem Esensial;
- SOP Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi;
- SOP Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam Hutan Lindung;



4. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL

4.1 Seksi Pengelolaan DAS

- SOP Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Das Terpadu.

4.2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- SOP Pengelolaan Data Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
- SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan;
- SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/ Evaluasi Pelaksanaan RHL;
- SOP Serah Terima Hibah Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan);
- SOP Serah Terima Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan);
- SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Selesai Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan);
- SOP Pembuatan Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan).

4.3 Seksi Perbenihan Tanaman Hutan

- SOP Pembuatan Persemaian Permanen
- SOP Pengelolaan Persemaian
- SOP Pengelolaan Data Pengendalian Perubahan Iklim
- SOP Pelaksanaan Pep Rad-Grk (Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)



5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

5.1 Seksi Penyuluhan Kehutanan

- SOP Pembinaan Dan Pengembangan Aneka Guna Hasil Hutan (AGH)
- SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Kelembagaan
- SOP Penetapan Sk Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
- SOP Pencairan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
- SOP Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan
- SOP Penyusunan Dan Pengesahan Program Penyuluh Kehutanan

5.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan (RKU HKm)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman Rakyat (RKU HTR)

5.3 Seksi Hutan Adat dan Kemitraan

- SOP Fasilitasi Kemitraan Kehutanan
- SOP Fasilitasi Hutan Adat
- SOP Fasilitasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan data terakhir Desember 2020 sebanyak 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) orang. Jumlah SDM aparatur tersebut dapat dirincikan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis kelamin, Eselonisasi dan Golongan Ruang adalah seperti tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi SDM ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	INSTANSI	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1.	Dinas Kehutanan	9	31	3	6	-	49
2.	UPT-KPH Tarakan	-	12	2	10	1	25
3.	UPT-KPH Bulungan	2	8	2	4	-	16
4.	UPT-KPH Nunukan	3	10	3	14	-	30
5.	UPT-KPH Malinau	2	7	4	7	-	20
6.	UPT-KPH Tana Tidung	1	6	6	5	-	18
JUMLAH		17	74	20	46	1	158

Sumber : Dinas Kehutanan, Per Tanggal 1 Mei Tahun 2021

Tabel 2.2 Komposisi SDM ASN berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Dinas Kehutanan	35	14	49
2.	UPT-KPH Tarakan	21	4	25
3.	UPT-KPH Bulungan	10	6	16
4.	UPT-KPH Nunukan	20	10	30
5.	UPT-KPH Malinau	18	2	20
6.	UPT-KPH Tana Tidung	13	5	18
JUMLAH		117	41	158

Sumber : Dinas Kehutanan, Per Tanggal 1 Mei Tahun 2021



Tabel 2.3 Komposisi SDM berdasarkan Eselon

NO.	INSTANSI	ESELON			NON ESELON	JUMLAH
		II	III	IV		
1.	Dinas Kehutanan	1	5	15	28	49
2.	UPT-KPH Tarakan	-	-	2	23	25
3.	UPT-KPH Bulungan	-	1	3	12	16
4.	UPT-KPH Nunukan	-	-	3	27	30
5.	UPT-KPH Malinau	-	1	3	16	20
6.	UPT-KPH Tana Tidung	-	1	2	15	18
TOTAL KESELURUHAN PNS DINAS KEHUTANAN						158

Sumber : Dinas Kehutanan, Per Tanggal 1 Mei Tahun 2021

Tabel 2.4 Komposisi SDM berdasarkan Golongan Ruang

NO.	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	Dinas Kehutanan	11	34	4	-	49
2.	UPT-KPH Tarakan	1	15	8	1	25
3.	UPT-KPH Bulungan	3	8	5	-	16
4.	UPT-KPH Nunukan	1	16	13	-	30
5.	UPT-KPH Malinau	3	9	8	-	20
6.	UPT-KPH Tana Tidung	1	10	7	-	18
TOTAL KESELURUHAN PNS DINAS KEHUTANAN						158

Sumber : Dinas Kehutanan, Per Tanggal 1 Mei Tahun 2021

Tabel 2.5 Komposisi SDM PTT (Pegawai Tidak Tetap) berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	INSTANSI	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1.	Dinas Kehutanan	-	14	2	14	-	30
2.	UPT-KPH Tarakan	-	15	1	26	-	42
3.	UPT-KPH Bulungan	-	13	0	10	-	23
4.	UPT-KPH Nunukan	-	1	2	1	-	4
5.	UPT-KPH Malinau	-	3	1	13	-	17
6.	UPT-KPH Tana Tidung	-	2	0	10	1	13
JUMLAH			48	6	74	1	129

Sumber : Dinas Kehutanan, Per Tanggal 1 Mei Tahun 2021



Tabel 2.6 Komposisi SDM ASN berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Dinas Kehutanan	20	10	30
2.	UPT-KPH Tarakan	32	11	43
3.	UPT-KPH Bulungan	10	13	23
4.	UPT-KPH Nunukan	5	6	11
5.	UPT-KPH Malinau	15	2	17
6.	UPT-KPH Tana Tidung	11	5	16
JUMLAH		93	47	140

Sumber : Dinas Kehutanan, Per Tanggal 1 Mei Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil stoke opname Desember 2020 adalah seperti pada table 2.2.2.1 berikut :

Tabel 2.7 Perlengkapan Penunjang OPD

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1	Mobil Pickup/Double Cabin	11 Unit
2	Mobil Pickup/Single Cabin	4 Unit
3	Mobil tangki air	4 Unit
4	Kendaraan Roda 2	43 Unit
5	Collapsible Tank	3 Unit
6	Gergaji/Chainsaw	2 Unit
7	Mesin Ketik Manual	2 Unit
8	Alat perekam suara	2 Unit
9	Diffuser/Humidifier	1 Unit
10	Meja Rapat	6 Unit
11	Velbed	50 Unit
12	Kursi Rapat	30 Unit
No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
13	Lampu Sorot	10 Unit
14	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 Unit
15	Meja Kerja Pejabat Ess III & IV	30 Unit



16	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1	Unit
17	Kursi Kerja Pejabat Ess III	6	Unit
18	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	22	Unit
19	Kursi Hadap	14	Unit
20	Kursi/Sofa Tamu Ess II	1	Unit
21	Kursi/Sofa Tamu Ess III	3	Unit
22	Kursi Putar	20	Unit
23	Kursi Plastik	25	Unit
24	Kursi Lipat	10	Unit
25	Lemari Buku Pejabat Ess II	1	Unit
26	Lemari Buku Pejabat Ess III	6	Unit
27	Lemari Arsip	8	Unit
28	Drone	5	Unit
29	Tas Drone	2	Unit
30	Hp Drone	2	Unit
31	Baterai Cadangan	10	Unit
32	Smartphone	2	Unit
33	Thermogun	2	Unit
34	Kamera Digital	4	Unit
35	PC Unit	21	Unit
36	Laptop	30	Unit
37	Printer	19	Unit
38	Printer A3	6	Unit
39	Plotter	2	Unit
40	Router	2	Unit
41	Kipas Angin	4	Unit
42	Speaker wireless	2	Unit
43	UPS	5	Unit
44	Proyektor	4	Unit
45	TV	4	Unit
46	GPS	27	Unit
47	Layar Proyektor	1	Unit
48	Bor Listrik	1	Unit
49	Gerinda	1	Unit
50	Teropong	4	Unit
51	HT	10	Unit
52	Pompa Air	4	Unit
53	PH Meter	2	Unit
54	Gambar Presiden	2	Unit
55	Jam Dinding	3	Unit
56	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit
57	Papan Nama Instansi	2	Unit
58	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
59	Tiang Bendera	1	Unit



60	Hardisk External	1	Unit
61	Sensor Meter	5	Unit
62	Meteran	1	Unit
63	Clinometer	2	Unit
64	Kompas	5	Unit
No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	
65	Phiband	2	Unit
66	Selang Pemadam	10	Buah

Sumber: Dinas Kehutanan, Per Tanggal 1 Mei Tahun 2021

2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan, tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan evaluasi rencana kerja tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan

NO	Indiokator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	-	-	-	-	102,90%	110,81%	105,69%	-	-	102,90%	110,81%	105,69%	-
2	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	-	-	-	-	19,81%	14,51%	5,61%	-	-	283,00%	291,42%	112,18%	-
3	Persentase menurunnya lahan kritis	-	-	-	-	0,18%	1,34%	3,42%	-	-	40,50%	67,21%	171,00	-
4	Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	-	-	-	-	0,14%	0,18%	0,80%	-	-	2,80%	5,97%	26,63%	-

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.700.000	22.500.000	19.000.000	12.000.000		32.334.400	6.240.500	10.734.000	10.473.000		63,78	27,74	56,49	87,28		26.050.000	14.945.475
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	283.000.000	29.935.000	15.000.000	150.000.000		70.767.750	10.776.402	12.832.661	85.015.560		25,01	36,00	85,55	56,68		119.483.750	44.848.093
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1.112.953.810	32.340.000	50.000.000	40.000.000		193.778.900	31.940.000	6.058.000	15.885.000		17,41	98,76	12,12	39,71		308.823.453	61.915.475
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.396.975.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		1.373.415.600	15.105.500	13.148.300	14.585.700		98,31	50,35	43,83	48,62		371.743.750	354.063.775
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40.971.440	1.073.950.000	1.764.734.500	2.371.611.500		36.422.000	952.228.000	1.547.437.000	1.975.861.643		88,90	88,67	87,69	83,31		1.312.816.860	1.127.987.161
Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000	150.000.000	146.250.000	100.000.000		126.466.670	148.569.850	139.695.600	99.102.850		63,23	99,05	95,52	99,10		149.062.500	128.458.743
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.750.000	50.000.000	180.000.000	180.000.000		41.132.300	41.040.500	179.452.460	179.500.420		94,02	82,08	99,70	99,72		113.437.500	110.281.420
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.355.000	1.200.000	44.000.000	44.000.000		2.310.000	875.000	39.259.750	40.585.925		98,09	72,92	89,23	92,24		22.888.750	20.757.669
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	675.030.000	270.000.000	179.750.000	10.000.000		570.192.400	249.332.500	162.613.210	7.437.500		84,47	92,35	90,47	74,38		283.695.000	247.393.903
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	15.000.000	15.000.000	2.194.000	472.877.338		13.237.500	14.094.980	2.194.000	465.550.338		88,25	93,97	100,00	98,45		126.267.835	123.769.205
Penyediaan Makanan dan Minuman	26.815.000	6.850.000	20.000.000	60.000.000		12.062.500	6.825.000	8.307.200	51.249.600		44,98	99,64	41,54	85,42		28.416.250	19.611.075
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.200.000.000	730.015.695	1.476.166.933	1.212.600.000		1.176.062.900	665.152.559	1.287.486.312	1.091.267.861		98,01	91,11	87,22	89,99		1.154.695.657	1.054.992.408
Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	591.388.225	407.351.544	274.013.300	670.000.000		591.254.200	383.995.842	241.979.100	411.778.500		99,98	94,27	88,31	61,46		485.688.267	407.251.911
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			102.500.000					101.832.500					99,35			25.625.000	25.458.125
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	705.000.000	124.200.000				665.721.000	116.446.000				94,43	93,76				207.300.000	195.541.750
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		281.065.000	240.000.000	195.000.000			63.282.476	99.571.451	172.671.210				41,49	88,55		179.016.250	83.881.284
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	250.000.000	463.460.000	315.000.000	15.000.000		235.351.750	384.889.336	29.048.100	6.000.000		94,14	83,05	9,22	40,00		260.865.000	163.822.297
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	300.310.000	155.350.800	196.013.000			243.036.700	14.597.395	79.263.800			80,93	9,40	40,44			162.918.450	84.224.474
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan																	
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	736.000.000					679.797.810					92,36					184.000.000	169.949.453
Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	380.300.000					277.929.545					73,08					95.075.000	69.482.386
Optimalisasi PNB	604.350.000					384.435.750					63,61					151.087.500	96.108.938
Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	1.045.987.000		681.000.000			987.075.565		594.563.650			94,37		87,31			431.746.750	395.409.804
Pembinaan Produksi Hutan	745.700.000	24.717.000	301.700.000			502.440.800	21.230.000	203.674.200			67,38	85,89	67,51			268.029.250	181.836.250
Monitoring Pemanenan / Produksi Hutan	328.000.000	209.275.600	201.700.000	260.100.000		324.999.600	197.427.190	142.338.200	247.139.500		99,09	94,34	70,57	95,02		249.768.900	227.976.123
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	456.301.000	71.683.040				423.298.358	65.771.500				92,77	91,75				131.996.010	122.267.465
Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	676.655.250	47.862.000				345.911.700	44.210.000				51,12	92,37				181.129.313	97.530.425
Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan	553.394.000					413.005.832					74,63					138.348.500	103.251.458
Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*		110.000.000					109.332.600					99,39				27.500.000	27.333.150
Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan		76.420.000	320.000.000				25.029.394	16.678.000				32,75	5,21			99.105.000	10.426.849
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHP)*		47.600.000					39.779.600					83,57				11.900.000	9.944.900
Perlindungan Hutan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan		790.025.000					574.113.000					72,67				197.506.250	143.528.250
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan	116.200.000					99.353.000					85,50					29.050.000	24.838.250
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	158.515.000	187.648.400	577.847.088			119.730.100	169.148.879	352.401.681			75,53	90,14	60,99			231.002.622	160.320.165
Penanaman Pohon Mangrove	650.269.000	68.090.000				460.704.700	43.729.867				70,85	64,22				179.589.750	126.108.642
Hari Menanam Pohon Indonesia	868.860.000					817.378.400					94,07					217.215.000	204.344.600
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.074.825.000	1.580.537.500				1.042.102.200	1.003.530.284				96,96	63,49				663.840.625	511.408.121
Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL		42.840.000					26.146.100					61,03				10.710.000	6.536.525
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan																	
Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	391.800.000					268.164.200					68,44					97.950.000	67.041.050
Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan																	
Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan	253.200.000	63.925.000	250.000.000	151.300.000		199.117.000	59.133.500	67.217.000	79.178.300		78,64	92,50	26,89	52,33		179.606.250	101.161.450
Pengembangan dan Pelatihan Teknis SDM Penyuluh			92.300.000					49.109.874					53,21			23.075.000	12.277.469
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh			75.000.000	125.525.000				75.000.000	118.400.000				100,00	94,32		50.131.250	48.350.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan																	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan	230,200,000	93,320,000	268,800,000	150,000,000		65,145,500	15,656,000	101,362,700	70,837,750		28.30	16.78	37.71	47.23		185,580,000	63,250,488
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	92,525,000	34,106,000	300,000,000	150,000,000		32,791,000	24,203,489	44,323,300	125,679,200		35.44	70.97	14.77	83.79		144,157,750	56,749,247
Penyediaan Data Spasial dan Numerik		41,700,000					37,827,711					90.71				10,425,000	9,456,928
Pengembangan Kerjasama Kehutanan			403,600,000					81,142,900					20.10			100,900,000	20,285,725
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Kehutanan																	
Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam		39,520,000	221,000,000				24,960,000	74,729,000				63.16	33.81			65,130,000	24,922,250
Pengembangan Agroforestry / Agrosilvopastura	469,250,000	145,925,000	327,075,000			438,254,822	136,111,000	237,073,500			93.39	93.27	72.48			235,562,500	202,859,831
Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)		2,065,762,000	375,000,000				1,576,369,335	291,010,000				76.31	77.60			610,190,500	466,844,834
Sosialisasi Mekanisme Pengajuan Izin Perhutanan Sosial		170,470,600	234,500,000				118,409,800	38,202,900				69.46	16.29			101,242,650	39,153,175
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Kegiatan RHL		767,810,000					454,650,500					59.21				191,952,500	113,662,625
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan																	
Sosialisasi Kawasan Konservasi Ekosistem Essensial*		66,420,000	751,000,000	100,000,000			44,764,090	656,415,000	55,489,800		67.40	87.41	55.49			229,355,000	189,167,223
Identifikasi Kawasan Konservasi Ekosistem Essensial*			325,000,000					285,234,600					87.76			81,250,000	71,308,650
Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial				400,000,000					213,060,650					53.27		100,000,000	53,265,163
Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat*																	
Sosialisasi Hutan Adat		96,100,000	139,450,000				90,973,200	110,372,800				94.67	79.15			58,887,500	50,336,500
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)*																	
Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (Catchment Area)*		235,155,000	450,000,000				222,181,125	280,876,650				94.48	62.42			171,288,750	125,764,444
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS		62,045,030	211,500,000	149,200,000			55,702,500	85,762,000	99,589,300		89.78	40.55	66.75			105,686,258	60,263,450
Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)				58,269,000					42,153,900				72.34			14,567,250	10,538,475
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			6,933,000,000	4,490,592,500				6,219,597,382.00	4,187,646,900				89.71	93.25		2,855,898,125	2,601,811,071
Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli			524,325,000					357,769,500.00					68.23			131,081,250	89,442,375
Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya			429,062,000					19,350,600.00					4.51			107,265,500	4,837,650
Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan			1,036,950,000	726,350,000				340,904,000.00	94,325,000				32.88	12.99		440,825,000	108,807,250
Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			1,232,500,000	829,750,000				412,997,000.00	378,996,200				33.51	45.68		515,562,500	197,998,300
Sosialisasi dan / atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode			377,475,000					118,460,450.00						31.38		94,368,750	29,615,113
Pelatihan / Pembekalan / Inhousetraining / Penyegaran / Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				1,516,750,000					1,001,249,100					66.01		379,187,500	250,312,275
Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain - Lain				597,800,000					28,659,000					4.79		149,450,000	7,164,750
Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan				851,250,000					237,761,300					27.93		212,812,500	59,440,325
Program Perlindungan dan Pengamatan Hutan																	
Patroli Pengamanan			839,950,000	972,375,000				506,670,600.00	460,854,700				60.32	47.39		453,081,250	241,881,325
Sosialisasi*				248,750,000					53,288,000					21.42		62,187,500	13,322,000
Program Pengembangan Pembenihan																	
Pembangunan Persemaian Permanen			4,377,871,807					4,202,001,186.64					95.98			1,094,467,952	1,050,500,297
Pembangunan Sumber Benih				490,320,000					433,926,650					88.50		122,580,000	108,481,663
Peningkatan Kualitas SDM Bidang Perbenihan Tanaman Hutan			100,000,000						0					0.00		25,000,000	-
RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi																	
Rehabilitasi Lahan			209,500,000					178,720,000.00					85.31			52,375,000	44,680,000
Rehabilitasi Mangrove			20,814,761,500	3,630,516,000				7,610,274,985.00	1,755,455,000				36.56	48.35		6,111,319,375	2,341,432,496
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			4,233,690,000					691,280,300.00					16.33			1,058,422,500	172,820,075
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat			467,320,000					209,554,900.00					44.84			116,830,000	52,388,725
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Dalam Rangka RHL				1,848,800,000					1,276,261,850					69.03		462,200,000	319,065,463

Tabel2.10.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Nunukan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	2,700,000	5,000,000	4,800,000		653,000	2,700,000	4,998,000	4,793,000		65.30	100.00	99.96	99.85		9,900,000	9,549,250
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,000,000	12,980,000	14,160,000	18,600,000		3,319,850	11,187,040	11,836,614	10,304,805		47.43	86.19	83.59	55.40		38,790,000	28,919,705
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5,300,000	8,000,000				5,195,000	7,430,000				98.02	92.88		7,300,000	7,052,500
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan				8,000,000					661,600					8.27		2,000,000	165,400
Penyediaan jasa administrasi keuangan	45,300,000	224,400,000	224,620,000	248,592,000		30,300,000	224,400,000	221,270,000	229,392,000		66.89	100.00	98.51	92.28		556,468,000	533,318,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,500,000	2,500,000	3,000,000	5,468,825		2,449,700	2,493,700	2,992,960	5,437,825		97.99	99.75	99.77	99.43		9,367,206	9,295,816
Penyediaan alat tulis kantor	4,500,000	10,000,000	9,000,000	22,000,000		4,500,000	9,999,850	8,999,165	21,945,430		100	100.00	99.99	99.75		29,000,000	28,985,373
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,500,000	2,500,000	5,000,000	7,000,000		1,400,000	2,228,700	2,875,050	5,837,520		93.33	89.15	57.50	83.39		10,750,000	7,963,130
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			1,000,000	10,000,000				1,000,000	9,989,100				100.00	99.89		3,500,000	3,497,275
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	92,880,000	106,800,000	9,270,000	44,100,000		86,153,100	105,658,400	8,361,000	42,150,000		92.76	98.93	90.19	95.58		219,975,000	210,710,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12,000,000					10,944,000					91.20		3,000,000	2,736,000
Penyediaan makanan dan minuman	5,000,000	2,500,000	2,100,000	8,000,000		4,963,700	2,488,000	2,051,600	6,461,000		99.27	99.52	97.70	80.76		11,600,000	11,118,550
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50,000,000	61,200,000	94,502,500	73,809,145		49,776,207	61,197,124	83,365,073	36,013,210		99.55	100.00	88.21	48.79		224,154,786	203,341,707
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	42,500,000	128,913,092	121,800,000	144,766,298		42,475,000	128,912,266	121,694,873	144,756,171		99.94	100.00	99.91	99.99		329,404,666	329,271,182
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				121,200,000					120,525,000					99.44		30,300,000	30,131,250
Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			49,925,000	51,200,000				49,925,000	50,700,000				100.00	99.02		62,725,000	62,600,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				22,102,000					20,405,000					92.32		5,525,500	5,101,250
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			10,000,000	25,005,000				9,726,363	16,548,200				97.26	66.18		16,251,250	13,863,413
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				200,000,000					199,548,500				99.77			50,000,000	49,887,125
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal				30,000,000					900,773					3.00		7,500,000	225,193
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan																	
Pembinaan, Penerbitan Industri Hasil Hutan	14,820,000		75,494,000			14,492,000		73,669,800			97.79		97.58			90,314,000	88,161,800
Pengembangan hasil hutan non kayu		141,733,953					140,292,235					98.98				141,733,953	140,292,235
Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan		63,532,000					62,450,000					98.30				63,532,000	62,450,000
Pembinaan, Penerbitan Industri Hasil Hutan			22,015,000					21,000,000					95.39			22,015,000	21,000,000
Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan			82,500,000					81,267,000					98.51			82,500,000	81,267,000
Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota			39,948,000					39,459,500					98.78			39,948,000	39,459,500
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Rehabilitasi Hutan dan Lahan			40,000,000					39,942,000					99.86			40,000,000	39,942,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)																	
Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura			39,225,000					36,700,000					93.56			39,225,000	36,700,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif			375,000,000					360,647,000					96.17			375,000,000	360,647,000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				2,178,410,000					1,947,204,800					89.39		544,602,500	486,801,200
Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api				122,410,000					81,723,100					66.76		30,602,500	20,430,775
Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya				317,200,000					300,497,300					94.73		79,300,000	75,124,325
Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan				293,990,000					227,374,587					77.34		73,497,500	56,843,647
Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				135,250,000					94,811,500					70.10		33,812,500	23,702,875
Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode				3,525,000					2,205,000					62.55		881,250	551,250

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan																-	-
Patroli Pengamanan				391,000,000					348,335,281					89.09		97,750,000	87,083,820
Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan																-	-
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL				318,800,000					263,716,000					82.72		79,700,000	65,929,000
Program Penyuluhan (DBH-DR)*																-	-
Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*				42,940,560					40,610,130					94.57		10,735,140	10,152,533
Metode dan Materi Penyuluhan*				22,500,000					18,550,000					82.44		5,625,000	4,637,500
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan				352,000,000					342,432,000					97.28		88,000,000	85,608,000
Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*																-	-
Tata hutan dan perencanaan*				222,680,000					119,607,192					53.71		55,670,000	29,901,798

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Malinau

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4.500.000.00	5.000.000.00	6.000.000.00		0.00	2.341.500.00	4.852.500.00	4.408.000.00		0.00	52.03	97.05	73.47		3.875.000.00	2.900.500.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.000.00	21.600.000.00	20.400.000.00	19.200.000.00		3.006.000.00	9.384.448.00	12.958.259.00	14.337.675.00		28.63	43.45	63.52	74.68		17.925.000.00	9.921.595.50
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	0.00	35.618.480.00	10.000.000.00	6.000.000.00		0.00	32.372.728.00	10.000.000.00	6.000.000.00		0.00	90.89	100.00	100.00		12.904.620.00	12.093.182.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.500.000.00	0.00	59.000.000.00	64.200.000.00		3.500.000.00	0.00	48.137.400.00	59.141.540.00		100.00	0.00	81.59	92.12		31.675.000.00	27.694.735.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0.00	117.300.000.00	256.318.000.00	377.282.000.00		0.00	117.300.000.00	253.959.100.00	369.560.228.00		0.00	100.00	99.08	97.95		187.725.000.00	185.204.832.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.000.000.00	46.862.475.00	45.000.000.00	35.000.000.00		4.997.000.00	46.834.905.00	45.000.000.00	35.000.000.00		99.94	99.94	100.00	100.00		32.965.618.75	32.957.976.25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000.00	20.000.000.00	14.502.000.00	10.000.000.00		5.000.000.00	20.000.000.00	14.500.000.00	10.000.000.00		100.00	100.00	99.99	100.00		12.375.500.00	12.375.500.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000.00	7.426.560.00	0.00	76.000.000.00		82.126.460.00	7.426.560.00	0.00	68.252.000.00		96.62	100.00	0.00	89.81		42.106.640.00	39.451.255.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000.00	10.000.000.00	7.000.000.00	9.000.000.00		5.000.000.00	10.000.000.00	7.000.000.00	7.886.000.00		100.00	100.00	100.00	87.62		7.750.000.00	7.471.500.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25.000.000.00	66.374.741.30	76.265.000.00	71.040.000.00		21.902.000.00	66.288.100.00	76.134.790.00	64.267.200.00		87.61	99.87	99.83	90.47		59.669.935.33	57.148.022.50
Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	50.000.000.00	88.681.485.00	191.700.000.00	218.698.775.00		49.908.000.00	87.770.000.00	191.645.000.00	218.039.513.00		99.82	98.97	99.97	99.70		137.270.065.00	136.840.628.25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor dinas	0.00	50.000.000.00	70.000.000.00	70.000.000.00		0.00	50.000.000.00	70.000.000.00	70.000.000.00		0.00	100.00	100.00	100.00		47.500.000.00	47.500.000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	0.00	16.000.000.00	0.00		0.00	0.00	16.000.000.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00		4.000.000.00	4.000.000.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	200.000.000.00		0.00	0.00	0.00	199.330.000.00		0.00	0.00	0.00	99.67		50.000.000.00	49.832.500.00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan																	
Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	50.000.000.00	42.650.000.00	0.00	0.00		48.000.000.00	42.550.000.00	0.00	0.00		96.00	99.77	0.00	0.00		23.162.500.00	22.637.500.00
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	0.00	177.000.000.00	0.00	0.00		0.00	173.091.900.00	0.00	0.00		0.00	97.79	0.00	0.00		44.250.000.00	43.272.975.00
Sosialisasi Kemitraan dengan Masyarakat	0.00	24.900.000.00	0.00	0.00		0.00	24.450.000.00	0.00	0.00		0.00	98.19	0.00	0.00		6.225.000.00	6.112.500.00
Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	50.000.000.00	32.775.000.00	73.000.000.00	0.00		49.150.000.00	31.875.000.00	71.700.000.00	0.00		98.30	97.25	98.22	0.00		38.943.750.00	38.181.250.00
Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	0.00	0.00	390.000.000.00	0.00		0.00	0.00	3.750.000.00	0.00		0.00	0.00	0.96	0.00		97.500.000.00	937.500.00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0.00	0.00	227.000.000.00	0.00		0.00	0.00	225.880.000.00	0.00		0.00	0.00	99.51	0.00		56.750.000.00	56.470.000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)																	
Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	0.00	148.820.000.00	67.852.000.00	0.00		0.00	145.200.000.00	65.830.000.00	0.00		0.00	97.57	97.02	0.00		54.168.000.00	52.757.500.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	2.349.013.680.00		0.00	0.00	0.00	2.042.402.300.00		0.00	0.00	0.00	86.95		587.253.420.00	510.600.575.00
Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	0.00	0.00	0.00	213.300.000.00		0.00	0.00	0.00	210.254.000.00		0.00	0.00	0.00	98.57		53.325.000.00	52.563.500.00
Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	179.190.000.00		0.00	0.00	0.00	43.060.000.00		0.00	0.00	0.00	24.03		44.797.500.00	10.765.000.00
Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	184.000.000.00		0.00	0.00	0.00	140.600.000.00		0.00	0.00	0.00	76.41		46.000.000.00	35.150.000.00
Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan																	
Patroli Pengamanan	0.00	0.00	0.00	276.000.000.00		0.00	0.00	0.00	114.810.000.00		0.00	0.00	0.00	41.60		69.000.000.00	28.702.500.00
Program Pengembangan Perbenihan																	
Pembuatan/Pengadaan Bibit	0.00	0.00	0.00	62.000.000.00		0.00	0.00	0.00	56.000.000.00		0.00	0.00	0.00	90.32		15.500.000.00	14.000.000.00
RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi																	
Rehabilitasi Lahan	0.00	0.00	0.00	301.750.000.00		0.00	0.00	0.00	270.723.000.00		0.00	0.00	0.00	89.72		75.437.500.00	67.680.750.00
Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	0.00	0.00	0.00	6.719.250.00		0.00	0.00	0.00	6.300.000.00		0.00	0.00	0.00	93.76		1.679.812.50	1.575.000.00
Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*																	
Tata hutan dan perencanaan*	0.00	0.00	0.00	110.300.000.00		0.00	0.00	0.00	88.089.834.00		0.00	0.00	0.00	79.86		27.575.000.00	22.022.458.50

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan UPTD KPH Tana Tidung

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	6,300,000	6,200,000	5,000,000		596,100	3,387,000	5,798,500	3,220,000		419,393	186,005	106,924	155,280		5,000,000.00	3,250,400.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,500,000	53,200,000	45,600,000	50,570,000		9,300,000	34,233,354	40,016,889	41,886,347		112,903	155,404	113,952	120,731		39,967,500.00	31,359,147.50
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor				38,000,000					35,531,000					106,949		9,500,000.00	8,882,750.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				67,500,000					51,415,000					131,285		16,875,000.00	12,853,750.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15,500,000	288,350,000	238,807,860	359,210,000		10,000,000	223,100,000	232,586,740	345,494,624		155,000	129,247	102,675	103,970		225,466,965.00	202,795,341.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,000,000	20,000,000		10,000,000		3,922,400	19,793,450		9,938,500		101,978	101,044		100,619		8,500,000.00	8,413,587.50
Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,000,000	68,500,000	47,000,000	33,100,000		3,921,400	68,249,421	46,832,300	30,040,680		102,004	100,367	100,358	110,184		38,150,000.00	37,260,950.25
Penyediaan Barama Cetak dan Pengandaan	5,000,000	20,000,000	23,000,000	16,608,000		2,068,900	19,832,650	20,389,000	15,568,000		241,674	100,844	112,806	106,680		16,152,000.00	14,464,637.50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,400,000	200,040,000	25,720,000	40,400,000		62,680,000	198,010,000	24,015,000	35,165,600		102,744	101,025	107,100	114,885		82,640,000.00	79,967,650.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		60,720,000		35,220,000			58,360,000		27,308,800			104,044		128,969		23,985,000.00	21,417,200.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	4,600,000	22,400,000	14,000,000	12,100,000		4,305,000	22,400,000	13,690,000	10,386,000		106,852	100,000	102,264	116,503		13,275,000.00	12,695,250.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	40,000,000	79,490,000	70,000,000	57,871,155		38,555,000	75,714,400	69,678,842	55,754,012		103,748	104,987	100,461	103,797		61,840,288.75	59,925,563.50
Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	19,000,000		146,132,000	212,888,004		17,940,000		145,332,768.68	212,668,668		105,909		100,550	100,103		94,505,001.00	93,985,359.17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor dinas		70,000,000.00		87,000,000.00			69,800,000.00		87,000,000.00			100.287		100.000		39,250,000.00	39,200,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			25,000,000.00	10,200,000.00				23,640,000.00	10,110,000.00				105.753	100.890		8,800,000.00	8,437,500.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor																0.00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pendidikan dan Pelatihan Formal			51,750,000.00					27,391,300.00								12,937,500.00	6,847,825.00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan																	
Monitoring Pemanaan/Produk Hutan	23,000,000.00					20,450,000.00					112.469					5,750,000.00	5,112,500.00
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			54,790,000.00					54,450,000.00					100.624			13,697,500.00	13,612,500.00
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu																0.00	-
Sosialisasi Kemitraan dengan Masyarakat																0.00	-
Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	29,000,000.00					26,400,000.00					109.848					7,250,000.00	6,600,000.00
Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota			430,000,000.00					45,798,000.00					938.906			107,500,000.00	11,449,500.00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Rehabilitasi Hutan dan Lahan			327,000,000.00					318,549,600.00					102.653			81,750,000.00	79,637,400.00
Program Perencanaan Pengembangan dan Informasi Kehutanan																	
Penyediaan Data Spesial dan Numerik		36,500,000.00						29,670,000.00					123.020			9,125,000.00	7,417,500.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)																	
Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura																0.00	-
Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)			375,000,000.00					260,538,000.00					143.933			93,750,000.00	65,134,500.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan				1,947,135,000.00					1,701,188,016.00					114.457		486,783,750.00	425,297,004.00
Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api				182,560,000.00					107,667,500.00					169.559		45,640,000.00	26,916,875.00
Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenis				1,049,100,000.00					924,155,895.00					113.520		262,275,000.00	231,038,973.75
Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan				162,900,000.00					0					0		40,725,000.00	-
Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan																0.00	-
Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan				125,600,000.00					100,232,000.00					125.309		31,400,000.00	25,058,000.00
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan																	
Patroli Pengamanan				760,100,000.00					643,362,000.00					118.145		190,025,000.00	160,840,500.00
Program Pengembangan Perbenihan																	
Pembuatan/Pengadaan Bibit				330,750,000.00					292,390,450.00					113.119		82,687,500.00	73,097,612.50
RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi																	
Rehabilitasi Lahan																0.00	-
Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL				174,175,000.00					160,519,000.00					108.507		43,543,750.00	40,129,750.00
Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*																	
Tata hutan dan perencanaan*				116,352,345.00					93,295,345.00					124.714		29,088,086.25	23,323,836.25

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antaran Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	138,750,000.00	503,678,400.00	796,974,000.00	846,643,700.00	129,084,500.00	487,784,551.00	753,283,803.00	756,751,500.00	517.15	1,312.77	1,054.20	1,144.47	571,511,525.00	531,726,088.50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	5,000,000.00	7,480,000.00	4,500,000.00	0.00	4,636,000.00	5,469,000.00	4,041,500.00	0.00	92.72	73.11	89.81	Rp 4,245,000.00	Rp 3,536,625.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,500,000.00	31,650,000.00	37,000,000.00	40,020,000.00	7,155,500.00	20,606,750.00	31,912,250.00	38,448,100.00	68.15	65.11	86.25	96.07	Rp 29,792,500.00	Rp 24,530,650.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,500,000.00	6,994,900.00	0.00	0.00	0.00	6,994,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Rp 2,623,725.00	Rp 1,748,725.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0.00	265,000,000.00	285,360,000.00	316,492,000.00	0.00	263,500,000.00	264,800,000.00	312,492,000.00	0.00	99.43	92.80	98.74	Rp 216,713,000.00	Rp 210,198,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00	4,986,850.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,986,850.00	9,809,250.00	4,981,900.00	0.00	100.00	98.09	99.64	Rp 4,996,712.50	Rp 4,944,500.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0.00	6,500,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	5,335,000.00	1,105,000.00	2,025,000.00	0.00	82.08	11.05	50.63	Rp 5,125,000.00	Rp 2,116,250.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	4,750,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	40,000,000.00	4,750,000.00	40,000,000.00	44,884,400.00	38,647,450.00	100.00	100.00	99.74	96.62	Rp 32,437,500.00	Rp 32,070,462.50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,100,000.00	0.00	2,420,000.00	1,255,800.00	1,941,000.00	0.00	96.80	50.23	92.43	Rp 1,775,000.00	Rp 1,404,200.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	0.00	1,911,250.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,911,250.00	3,914,900.00	3,988,600.00	0.00	100.00	97.87	99.72	Rp 2,477,812.50	Rp 2,453,687.50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	9,000,000.00	47,500,000.00	130,600,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	47,495,800.00	120,485,750.00	100.00	100.00	99.99	92.26	Rp 50,525,000.00	Rp 47,995,387.50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0.00	1,560,000.00	2,500,000.00	1,560,000.00	0.00	1,400,000.00	1,430,000.00	1,550,000.00	0.00	89.74	57.20	99.36	Rp 1,405,000.00	Rp 1,095,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	5,000,000.00	10,000,000.00	12,000,000.00	11,600,000.00	2,479,000.00	8,755,000.00	10,735,500.00	11,209,800.00	49.58	87.55	89.46	96.64	Rp 9,650,000.00	Rp 8,294,825.00
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konstitusi ke Luar Daerah	70,000,000.00	71,566,400.00	136,110,000.00	103,561,700.00	69,780,000.00	71,488,801.00	136,109,903.00	33,730,400.00	99.69	99.89	100.00	32.57	Rp 95,309,525.00	Rp 77,777,276.00
Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	30,000,000.00	47,009,000.00	197,524,000.00	183,210,000.00	29,920,000.00	46,750,000.00	194,362,000.00	183,210,000.00	99.73	99.45	98.40	100.00	Rp 114,435,750.00	Rp 113,560,500.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,000,000.00	204,600,000.00	71,900,000.00	40,200,000.00	49,660,000.00	204,580,000.00	41,878,000.00	33,432,420.00	99.32	199.60	146.86	83.17	91,675,000.00	82,387,605.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	0.00	15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	15,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	Rp 3,850,000.00	Rp 3,850,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0.00	5,000,000.00	56,500,000.00	40,200,000.00	0.00	4,980,000.00	26,478,000.00	33,432,420.00	0.00	99.60	46.86	83.17	Rp 25,425,000.00	Rp 16,222,605.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	50,000,000.00	199,600,000.00	0.00	0.00	49,660,000.00	199,600,000.00	0.00	0.00	99.32	100.00	0.00	0.00	Rp 62,400,000.00	Rp 62,315,000.00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	176,450,000.00	43,600,000.00	390,000,000.00	0.00	25,250,000.00	42,450,000.00	0.00	0.00	100.17	192.55	0.00	0.00	152,512,500.00	16,925,000.00
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	151,450,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	Rp 37,862,500.00	Rp 62,500.00
Pengembangan Lebah Madu	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,750,000.00	0.00	0.00	0.00	99.17	0.00	0.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,437,500.00
Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	25,000,000.00	13,600,000.00			25,000,000.00	12,700,000.00	0.00		100.00	93.38	0.00	0.00	Rp 9,650,000.00	Rp 9,425,000.00
Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	0.00	0.00	390,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp 97,500,000.00	Rp -
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp -	Rp -
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0.00	0.00	192,000,000.00	0.00	0.00	0.00	191,938,000.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	48,000,000.00	47,984,500.00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0.00	0.00	192,000,000.00	0.00	0.00	0.00	191,938,000.00	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00	Rp 48,000,000.00	Rp 47,984,500.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp 12,500,000.00	Rp 12,500,000.00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp -	Rp -
Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp -	Rp -
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	3,152,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,741,544,645.00	0.00	0.00	0.00	191.96	788,192,500.00	435,386,161.25
Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	384,700,000.00	0.00	0.00	0.00	220,423,900.00	0.00	0.00	0.00	57.30	Rp 96,175,000.00	Rp 55,105,975.00
Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Rana Metode	0.00	0.00	0.00	70,090,000.00	0.00	0.00	0.00	55,535,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp 17,522,500.00	Rp 13,883,900.00
Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	81,470,000.00	0.00	0.00	0.00	37,186,745.00	0.00	0.00	0.00	45.64	Rp 20,367,500.00	Rp 9,296,686.25
Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp -	Rp -
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	2,370,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,349,476,500.00	0.00	0.00	0.00	56.93	Rp 592,637,500.00	Rp 337,369,125.00
Peningkatan Sistem Kemiripan Pada Masyarakat Peduli Api	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp -	Rp -
Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	245,960,000.00	0.00	0.00	0.00	78,921,900.00	0.00	0.00	0.00	32.09	Rp 61,490,000.00	Rp 19,730,475.00
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0.00	0.00	0.00	592,350,000.00	0.00	0.00	0.00	514,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,087,500.00	128,591,000.00
Patroli Pengamanan	0.00	0.00	0.00	592,350,000.00	0.00	0.00	0.00	514,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp 148,087,500.00	Rp 128,591,000.00
Program Pengembangan Perbenihan	0.00	0.00	0.00	294,670,000.00	0.00	0.00	0.00	246,258,050.00	0.00	0.00	0.00	83.57	73,667,500.00	61,564,512.50
Pembuatan/Pengadaan Bibit	0.00	0.00	0.00	294,670,000.00	0.00	0.00	0.00	246,258,050.00	0.00	0.00	0.00	83.57	Rp 73,667,500.00	Rp 61,564,512.50
RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	0.00	0.00	0.00	461,620,000.00	0.00	0.00	0.00	414,418,848.00	0.00	0.00	0.00	89.77	115,405,000.00	103,604,712.00
Rehabilitasi Lahan	0.00	0.00	0.00	461,620,000.00	0.00	0.00	0.00	414,418,848.00	0.00	0.00	0.00	89.77	Rp 115,405,000.00	Rp 103,604,712.00
Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	364,400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,533,610.00	0.00	0.00	0.00	90.43	91,100,000.00	82,383,402.50
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	0.00	0.00	0.00	364,400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,533,610.00	0.00	0.00	0.00	90.43	Rp 91,100,000.00	Rp 82,383,402.50
Program Penyuluhan (DBH-DR)*	0.00	0.00	0.00	224,775,000.00	0.00	0.00	0.00	157,046,700.00	0.00	0.00	0.00	208.66	56,193,750.00	39,261,675.00
Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	0.00	0.00	0.00	27,250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	52.29	Rp 6,812,500.00	Rp 3,562,500.00
Metode dan Materi Penyuluhan*	0.00	0.00	0.00	147,525,000.00	0.00	0.00	0.00	97,738,000.00	0.00	0.00	0.00	66.25	Rp 36,881,250.00	Rp 24,434,500.00
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan*	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,058,700.00	0.00	0.00	0.00	90.12	Rp 12,500,000.00	Rp 11,264,675.00
Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	0.00	0.00	0.00	181,550,000.00	0.00	0.00	0.00	60,366,725.00	0.00	0.00	0.00	33.25	45,387,500.00	15,091,681.25
Tata hutan dan perencanaan*	0.00	0.00	0.00	181,550,000.00	0.00	0.00	0.00	60,366,725.00	0.00	0.00	0.00	33.25	Rp 45,387,500.00	Rp 15,091,681.25

Tabel 2.14. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPTD KPH Bulunagn

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	4.300.000,00	2.388.000,00		348.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	2.299.000,00		11,60	99,93	69,72	96,27		3.172.000,00	2.160.750,00
Penediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.500.000,00	15.000.000,00	22.200.000,00	17.520.000,00		2.280.700,00	14.395.500,00	17.293.500,00	14.873.200,00		21,72	95,97	77,90	84,89		16.305.000,00	12.210.725,00
Penediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	19.400.000,00	43.500.000,00	60.000.000,00		1.500.000,00	19.326.500,00	39.742.100,00	59.886.000,00		42,86	99,62	91,36	99,81		31.600.000,00	30.113.650,00
Penediaan jasa administrasi keuangan	54.500.000,00	168.800.000,00	182.050.000,00	172.772.000,00		47.450.000,00	159.150.000,00	172.500.000,00	172.592.000,00		87,06	94,28	94,75	99,90		144.530.500,00	137.923.000,00
Penediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	7.657.200,00	3.000.000,00	4.200.000,00		0,00	7.650.000,00	2.923.000,00	4.160.100,00		0,00	99,91	97,43	99,05		5.214.300,00	3.683.275,00
Penediaan alat tulis kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	40.000.000,00		4.972.000,00	9.987.000,00	17.974.550,00	39.898.100,00		99,44	99,87	99,86	99,75		18.250.000,00	18.207.912,50
Penediaan barang cetakan dan pengeandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.412.500,00	7.800.000,00		2.898.000,00	4.853.000,00	3.300.000,00	5.135.000,00		57,96	97,06	96,70	65,83		5.303.125,00	4.046.500,00
Penediaan peralatan dan perlengkapan kantor	44.500.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	122.008.000,00		37.400.000,00	18.920.000,00	38.830.000,00	110.865.368,00		84,04	94,60	97,08	90,87		56.627.000,00	51.503.842,00
Penediaan makanan dan minuman	5.000.000,00	8.000.000,00	5.600.000,00	9.000.000,00		0,00	7.952.000,00	5.525.000,00	2.992.000,00		0,00	99,40	98,66	33,24		6.900.000,00	4.117.250,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	73.000.000,00	54.400.000,00	119.000.000,00	25.000.000,00		71.956.300,00	54.365.034,00	118.923.120,00	17.708.400,00		98,57	99,94	99,94	70,83		67.850.000,00	65.738.213,50
Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	15.000.000,00	20.400.000,00	119.000.000,00	78.000.000,00		14.710.000,00	20.340.000,00	118.812.300,00	78.000.000,00		98,07	99,71	99,84	100,00		58.100.000,00	57.965.575,00
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan																	
Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	52.000.000,00	0,00	161.279.900,00	0,00		34.721.000,00	0,00	161.279.900,00	0,00		66,77	0,00	100,00	0,00		53.319.975,00	49.000.225,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan																	
Pembinaan, pendendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00		33.495.000,00	0,00	0,00	0,00		95,70	0,00	0,00	0,00		8.750.000,00	8.373.750,00
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																	
Penewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	0,00	65.000.000,00	90.000.000,00	89.100.000,00		0,00	64.944.000,00	89.100.000,00	89.100.000,00		0,00	99,91	99,00	100,00		61.025.000,00	60.786.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Kehutanan	-																-
Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan	0,00	271.826.000,00	92.755.000,00	0,00		0,00	221.544.900,00	77.278.000,00	0,00		0,00	81,50	83,31	0,00		91.145.250,00	74.705.725,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Perencanaan tata batas kawasan hutan*	0,00	0,00	162.000.000,00	0,00		0,00	0,00	161.279.900,00	0,00	-	0,00	0,00	99,56	0,00	-	40.500.000,00	40.319.975,00
Belanja tidak langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja gaji dan tunjangan	0,00	0,00	0,00	37.576.607,00		0,00	0,00	0,00	36.209.823,00	-	0,00	0,00	0,00	96,36		9.394.151,75	9.052.455,75
Belanja tambahan penghasilan PNS	0,00	0,00	0,00	654.456.880,00		0,00	0,00	0,00	638.336.770,00	-	0,00	0,00	0,00	97,54		163.614.220,00	159.584.192,50
Belanja langsung																	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	0,00	0,00	2.034.879.000,00		0,00	0,00	0,00	2.011.653.635,00	-	0,00	0,00	0,00	98,86		508.719.750,00	502.913.408,75
Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	0,00	0,00	0,00	272.658.600,00		0,00	0,00	0,00	204.211.600,00	-	0,00	0,00	0,00	74,90		68.164.650,00	51.052.900,00
Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	478.560.000,00		0,00	0,00	0,00	401.305.000,00	-	0,00	0,00	0,00	83,86		119.640.000,00	100.326.250,00
Pemadaman dan Pengamanan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	0,00	0,00	274.090.000,00		0,00	0,00	0,00	15.480.000,00	-	0,00	0,00	0,00	5,65		68.522.500,00	3.870.000,00
Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	0,00	0,00	95.990.000,00		0,00	0,00	0,00	42.950.000,00	-	0,00	0,00	0,00	44,74		23.997.500,00	10.737.500,00
Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	0,00	0,00	0,00	74.400.000,00		0,00	0,00	0,00	10.017.000,00	-	0,00	0,00	0,00	13,46		18.600.000,00	2.504.250,00
Kampanve Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	0,00	0,00	0,00	150.690.000,00		0,00	0,00	0,00	77.422.000,00	-	0,00	0,00	0,00	51,38		37.672.500,00	19.355.500,00
Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	0,00	0,00	0,00	208.500.000,00		0,00	0,00	0,00	167.940.000,00	-	0,00	0,00	0,00	80,55		52.125.000,00	41.985.000,00
Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan																	
Patroli Pengamanan	0,00	0,00	0,00	88.600.000,00		0,00	0,00	0,00	48.305.000,00		0,00	0,00	0,00	54,52		22.150.000,00	12.076.250,00
RHL yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi																	
Rehabilitasi Lahan	0,00	0,00	0,00	405.879.680,00		0,00	0,00	0,00	236.558.970,00	-	0,00	0,00	0,00	58,28		101.469.920,00	59.139.742,50
Penediaan bibit*	0,00	0,00	0,00	6.390.000,00		0,00	0,00	0,00	6.390.000,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00		1.597.500,00	1.597.500,00
Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan																	
Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam rangka RHL	0,00	0,00	0,00	1.564.560.000,00		0,00	0,00	0,00	1.311.575.200,00	-	0,00	0,00	0,00	83,83		391.140.000,00	327.893.800,00
Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Dalam Rangka RHL*	0,00	0,00	0,00	146.440.000,00		0,00	0,00	0,00	37.895.000,00	-	0,00	0,00	0,00	25,88		36.610.000,00	9.473.750,00
Program Penyuluhan (DBH-DR)																	
Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	0,00	0,00	0,00	46.470.000,00		0,00	0,00	0,00	42.225.000,00	-	0,00	0,00	0,00	90,87		11.617.500,00	10.556.250,00
Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*																	
Tata Hutan Dan Perencanaan*	0,00	0,00	0,00	351.897.200,00		0,00	0,00	0,00	230.974.200,00	-	0,00	0,00	0,00	65,64		87.974.300,00	57.743.550,00
Promosi Peluang Investasi di KPH*	0,00	0,00	0,00	71.200.000,00	-	0,00	0,00	0,00	51.595.000,00	-	0,00	0,00	0,00	72,46		17.800.000,00	12.898.750,00

Tabel 2.15. Evaluasi Renja Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
3					Urusan Pilihan																				
3		04			Kehutanan																				
3		04	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100.00	persen			100.00	5,353,089			-	4,448,295									
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	17,000	Lembar	163,900	10,000	49,309	4000	12,000	1,000	2,726	4,000	10,473	100.00	87.28	14,000.00	59,782	82.35	36.47	Sekretariat	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	627,935	36	94,377	12	150,000	3	40,821	12	85,016	100.00	56.68	48.00	179,393	80.00	28.57		
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	110	unit	282,340	60	37,998	20	40,000	5	3,805	20	15,885	100.00	39.71	80.00	53,883	72.73	19.08		
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	125	unit	1,292,953	88	222,032	24	30,000	-	7,862	18	14,586	75.00	48.620	106.00	236,618	84.80	18.30		
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	60	Bulan	7,943,215	36	3,873,081	12	2,371,612.0	3	783,631	12	1,975,862	100.00	83.31	48.00	5,848,943	80.00	73.63		
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	115,971	24	176,118	12	100,000	3	99,102	12	99,102	100.00	99.10	36.00	275,220	60.00	237.32		
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60	Bulan	950,000	36	454,489	12	180,000	3	98,798	12	179,500	100.00	99.72	48.00	633,989	80.00	66.74		
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	225,750	36	121,423	12	44,000	3	33,096	12	40,586	100.00	92.24	48.00	162,009	80.00	71.76		
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	60	Bulan	33,555	24	3,185	12	10,000	3	1,938	12	7,438	100.00	74.38	36.00	10,623	60.00	31.66		
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	150	Unit	1,745,030	70	982,138	101	472,877	9	56,914	101	465,550	100.00	98.45	171.00	1,447,688	114.00	82.96		
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1500	Porsi	333,665	640	27,195	350	60,000	228	21,834	350	51,250	100.00	85.42	990.00	78,445	66.00	23.51		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1150	Kali	7,105,405	600	3,128,701	250	1,212,600	58	345,732	250	1,091,268	100.00	89.99	850.00	4,219,969	73.91	59.39		
				19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	500	Kali	3,775,541	322	1,217,229	100	670,000	61	224,887	100	411,779	100.00	61.46	422.00	1,629,008	84.40	43.15		
				21	Perjalanan dinas luar negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	10	Kali	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		98.08	78.18			78.32	60.97		
Predikat kinerja																		ST	S			T	R		
3	04	2	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	persen			100.00	195,000				172,671									
				24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	100	Unit	1,535,877	59	162,853	24	195,000	15	58,558	24	172,671	100.00	88.55	83.00	335,524	83.00	21.85		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	88.55			83.00	21.85		
Predikat kinerja																		ST	T			T	SR		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Trwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
3	04	3	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	60.00	persen			50.00	15,000				6,000									
				01	Pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	225	Orang	1,963,650	130	649,289	19	15,000	19	6,000	19	6,000	100.00	40.00	149.00	655,289	66.22	33.371	Sekretariat	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	40.00			66.22	33.37		
Predikat kinerja																		ST	SR			R	SR		
3	04	4	15		Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Prosentase peringkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	260,100				247,140									
				19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	Unit 138	Manajeme n	1,811,075	74	662,855	32	260,100	17	61,285	32	247,140	100.00	95.02	106.00	909,995	76.8	50.25	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	95.02			76.81	50.25		
Predikat kinerja																		ST	ST			S	SR		
3	04	6	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Kawasan Konservasi yang dikelola	30.00	persen			25.00	500,000				268,551									
				16	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	200	Orang	516,420	100	701,179	40	100,000	-	50	40	55,490	100.00	55.49	140.00	756,669	70.00	146.52	Bidang Perlindungan dan KSDAE	
				18	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah kawasan yang dikelola	2	Kawasan	800,000	-	-	1	400,000	1	67,569	1	213,061	100.00	53.27	1.00	213,061	50.00	26.63		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	54.38			60.00	86.58		
Predikat kinerja																		ST	SR			R	T		
3	04	8	21		Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Persentase kelompok masyarakat yang peduli lingkungan	60.00	persen			58.00	276,825				197,578									
				02	Rapat koordinasi penyuluh kehutanan	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	75	Orang	1,057,125	45	320,468	15	151,300	15	47,458	15	79,178	100.00	52.33	60.000	399,646	80.00	37.80	Bidang PPMHA	
				05	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Jumlah Sapras Penyuluh	6	Unit	230,000	-	-	6	125,525	6	118,400	6	118,400	100.00	-	6.000	118,400	100.00	51.478		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	52.33			90.00	44.64		
Predikat kinerja																		ST	SR			T	SR		
3	04	9	22		Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan	Persentase kawasan hutan yang telah dikukuhkan status legalnya	60.00	persen			58.00	300,000				196,517									
				01	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Jumlah Peserta koordinasi	200	Orang	1,342,320	100	182,165	50	150,000	30	33,700	50	70,838	100.00	47.23	150.00	253,003	75.00	18.85	Sekretariat	
				05	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	5	Dokumen	1,076,631	3	101,317	1	150,000	1	52,859	1	125,679	100.00	83.79	4.00	226,996	80.00	21.08		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	65.51			77.50	19.97		
Predikat kinerja																		ST	S			S	SR		
3	04	11	25		Program Pengelolaan DAS	Persentase Luasan DAS yang dikelola	50.00	persen			45.00	207,469				141,743									
				01	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS	2	Dokumen	650,000	-	-	1	58,269	-	10,709	-	42,154	-	72.34	-	42,154	-	6.49	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	
				10	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Jumlah Dokumen Kualitas DAS meningkat dengan indeks turunnya tingkat kekritisan DAS Prioritas	4	Dokumen	312,045	2	141,464	1	149,200	1	13,518	1	99,589	100.00	66.75	3.00	241,053	75.00	77.25		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	69.55			75.00	41.87		
Predikat kinerja																		T	S			S	SR		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
3	04	11	28		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	9,012,493				5,928,637								
				01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	35	Unit	6,092,500	-	-	35	4,490,593	103	1,415,666	35	4,187,647	100.00	93.25	35.00	4,187,647	100.00	68.73	
				04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhutla	40	Kali	694,750	-	-	40	726,350	8	12,715	33	94,325	82.50	12.99	33.00	94,325	82.50	13.58	
				05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Patroli	35	Kegiatan	661,250	-	-	35	829,750	25	104,229	35	378,996	100.00	45.68	35.00	378,996	100.00	57.32	
				06	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	12	Kegiatan	444,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				07	Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Kesiapsiagaan	1	Kegiatan	695,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				08	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyebaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan	75	Orang	2,086,300	-	-	75	1,516,750	135	742,291	75	1,001,249	100.00	66.01	75.00	1,001,249	100.00	47.99	
				09	Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain lain	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	100	Orang	779,300	-	-	100	597,800	-	22,619	-	28,659	-	4.79	-	28,659	-	3.68	
				10	Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan	20	Kegiatan	716,750	-	-	20	851,250	18	84,280	20	237,761	100.00	27.93	20.00	237,761	100.00	33.17	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	96.50	41.78			120.63	37.41		
Predikat kinerja																	ST	SR			ST	SR		
3	04	11	29		Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	1,221,125				514,143								
				01	Patroli Pengamanan	Jumlah kegiatan patroli pengamanan	16	Kegiatan	1,467,375	-	-	16	972,375	4	248,352	16	460,855	100.00	47.395	16.00	460,855	100.00	31.41	
				02	Sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan	4	Kegiatan	248,750	-	-	4	248,750	2	53,288	2	53,288	50.00	21.422	2.00	53,288	50.00	21.42	
				03	Koordinasi	Jumlah peserta rapat koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan	50	Orang	85,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.00	34.41			75.00	26.41		
Predikat kinerja																	S	SR			S	SR		
3	04	11	30		Program Pengembangan Perbenihan	Presentase rehabilitasi lahan kritis	55.00	persen			53.00	590,320				433,927								
				02	Pembangunan Sumber Benih	Jumlah Unit Usaha Perbenihan	3	Unit	181,125	-	-	3	490,320	3	335,280	3	433,927	100.00	88.50	3.00	433,927	100.00	239.57	
				03	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SDM Yang Berkualitas	8	Orang	100,000	-	-	8	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	88.50			100.00	239.57		
Predikat kinerja																	ST	T			ST	ST		
3	04	11	31		RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Presentase rehabilitasi lahan kritis	55.00	persen			53.00	3,630,516				1,755,455								
				01	Rehabilitasi Mangrove	Jumlah lahan mangrove yang direhabilitasi (Dana Reboisasi)	506	Ha	3,946,480	-	-	506	3,630,516	506	1,664,775	506	1,755,455	100.00	48.35	506.00	1,755,455	100.00	44.48	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	48.35			100.00	44.48		
Predikat kinerja																	ST	SR			ST	SR		
3	04	11	32		Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	50.00	persen			45.00	1,848,800				1,276,262								
				03	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	5	Usaha	1,848,800	-	-	11	1,848,800	11	1,148,126	11	1,276,262	100.00	69.03	11.00	1,276,262	220.00	69.03	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	69.03			220.00	69.03		
Predikat kinerja																	ST	S			ST	S		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)																	97.66	63.51			94.04	59.72		

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		11		12 = 8÷9+10÷11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)														ST	S			ST	SR		
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, ketersediaan dana tepat waktu, dll</p> <p>Faktor penghambat : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan, sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi iklim yang tidak mendukung, banyaknya Program dan kegiatan di Renstra/Renja yang tidak dapat dilaksanakan di DPA dikarenakan keterbatasan Dana Pemerintah Provinsi dll</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan, tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal mobilisasi sumber daya terhadap kegiatan yang bersifat lintas perangkat daerah, dll</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya") :</p>																					

Tabel 2.16. Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Nunukan

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)		
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
3					Usuran Pilihan																			
3	04				Kehutanan																			
3	04	01	04		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100.00	persen			100.00	615,736			-	536,116								
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	5,000	Lembar	22,700	3,000	8,351	500	4,800	72	1,274	500	4,793	100.00	99.85	3,500	13,144	70.00	57.90	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51	Bulan	94,140	27	26,344	12	19,200	3	2,339	12	10,304	100.00	53.67	39	36,648	76.47	38.93	
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	13	unit	23,300	6	5,195	5	8,000	7	4,430	12	7,430	240.00	92.88	18	12,625	138.46	54.18	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	14	unit	75,000	0	-	6	8,000	4	662	4	662	66.67	8.275	4	662	28.57	0.88	
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	51	Bulan	104,710	27	475,970	12	248,592	3	73,464	12	229,392	100.00	92.28	39	705,362	76.47	673.63	
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	51	Bulan	28,000	27	7,936	12	5,469		1,969	12	5,438	100.00	99.43	39	13,374	76.47	47.76	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	51	Bulan	63,500	27	23,500	12	22,000		4,946	12	21,945	100.00	99.75	39	45,445	76.47	71.57	Tata Usaha
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51	Bulan	29,000	27	6,504	12	7,000	3	3,011	12	5,838	100.00	83.40	39	12,342	76.47	42.56	
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	36	Bulan	7,000	12	1,000	12	10,000	12	9,989	12	9,989	100.00	99.89	24	10,989	66.67	156.99	
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	74	Unit	411,950	63	155,711	5	44,100	-	-	3	42,150	60.00	95.58	66	197,861	89.19	48.03	
				14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10	Unit	100,000	0	-	5	12,000	3	4,014	5	10,944	100.00	91.20	5	10,944	50.00	10.94	
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1,478	Porsi	29,600	678	9,503	300	8,000	50	1,467	100	6,461	33.33	80.76	778	15,964	52.64	53.93	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	Kali	311,200	60	194,338	15	73,809	3	18,156.00	8	36,014	53.33	48.79	68	230,352	113.33	74.02	
				19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	170	Kali	733,213	149	293,082	50	144,766	5	38,757.00	30	144,756	60.00	99.99	179	437,838	105.29	59.71	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	93.81	81.84			78.32	99.36		
Predikat kinerja																	ST	T			T	ST		

[illegible]

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)		
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
					10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	102	Ha	240,000	102	39,942	-	-		-	-	-	-	-	-	Seksi KSDAE dan Perindugan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
3	04	01	23		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Prosentase partisipasi aktif masyarakat kawasan hutan dalam pembangunan	25.00	persen			25.00				-							Seksi KSDAE dan Perindungan Masyarakat	
				03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	3	Kawasan	439,820	1	36,700				-	-	-	-	-	-	-		
				05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	Jumlah Penyuluh yang mengikuti jambore	15	Unit	1,175,000	5	360,647				-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
3	04	01	28		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	3.00	persen			3.00	3,050,785			2,653,816								
				01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	38	Unit	2,391,660	-	-	38	2,178,410	21	1,627,228	38	1,947,205	100.00	89.39	38	1,947,205	100.00	81.42
				02	Peningkatan Sistem kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	Jumlah kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA	4	Kegiatan	122,410	-	-	4	122,410	2	65,190	2	81,723	50.00	66.76	2	81,723	50.00	66.76
				03	Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan kegiatan Sejenisnya	Jumlah luas lahan Agroforestry	8	Ha	358,950	-	-	8	317,200	6	87,293	8	300,497	100.00	94.73	8	300,497	100.00	83.72
				04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhutla	24	Kegiatan	293,990	-	-	24	293,990	10	99,810	24	227,374	100.00	77.34	24	227,374	100.00	77.34
				05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Patroli	24	Kegiatan	135,250	-	-	24	135,250	2	44,372	15	94,812	62.50	70.10	15	94,812	62.50	70.10
				06	Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kabakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2	Kegiatan	3,525	-	-	2	3,525	-	2,205	-	2,205	-	62.55	-	2,205	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																82.50	76.81			82.50	75.87		
Predikat kinerja																T	T			T	S		
3	04	01	29		Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-DR)	Persentase menurunnya tingkat kerusakan hutan	3.00	persen			3.00	391,000			348,335							Seksi Perindungan KSDAE dan	
				01	Patroli Pngamanan	Jumlah kegiatan patroli pengamanan	24	Kegiatan	391,000	-	-	24	391,000	2	203,151	20	348,335	83.33	89.088	20.00	348,335	83.33	89.09
Rata-rata capaian kinerja (%)																83.33	89.09			83.33	89.09		
Predikat kinerja																T	T			T	T		

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K		
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
3	04	01	32		Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	50.00	persen			50.00	318,800			263,716									
				03	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	2	Usaha	318,800	-	-	2	318,800	2	245,196	2	263,716	100.00	82.72	2.00	263,716	100.00	82.72	Seksi Perlindungan KSDAE dan
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	82.72			100.00	82.72			
Predikat kinerja																ST	T			ST	T			
3	04	01	34		Program penyuluhan (DBH-DR)	Persentase Penyuluh Yang diberdayakan	57.00	persen			57.00	417,441												
				01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD	Jumlah dokumen penyuluh kehutanan	1	Dokumen	42,941	-	-	1	42,941	1	1,795	1.00	40,610	100.00	94.57	1.00	40,610	100.00	94.57	
				02	Metode dan Materi Penyuluhan	Jumlah Materi Penyuluhan	3	Metode	22,500	-	-	3	22,500	3	18,550	3.00	18,550	100.00	82.44	3.00	18,550	100.00	82.44	
				03	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Jumlah sarana dan prasarana	17	Unit	352,000	-	-	17	352,000	-	104,110	17	342,432	100.00	97.28	17.00	342,432	100.00	97.28	Seksi Perlindungan KSDAE dan
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	91.43			100.00	91.43			
Predikat kinerja																ST	ST			ST	ST			
3	04	01	35		Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)	Prosentase wilayah KPH yang terkelola	43.00	persen			43.00	222,680			119,607									
				01	Tata Hutan dan Perencanaan	Jumlah review dokumen RPHJP dan pembuatan dokumen RPHJPD	3	Dokumen	222,680	-	-	3	222,680	1	57,061	3	119,607	100.00	53.71	3.00	119,607	100.00	53.71	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Rata-rata capaian kinerja (%)																100.00	53.71			100.00	53.71			
Predikat kinerja																ST	R			ST	S			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																88.81	78.82			79.48	66.63			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																T	T			T	S			

Tabel 2.17. Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Malinau

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
3					Urusan Pilihan																			
3	04				Kehutanan																			
3	04	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100.00	persen			100.00	892,420			-	856,890								
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	14,000	Lembar	19,500	450	47,193	550	6,000	100	2,383	400	4,408	72.73	73.47	850.00	51,601	6.07	264.62	Sekretariat
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51	Bulan	95,700	24	24,656	12	19,200	4	5,607	12	14,337	100.00	74.67	36.00	38,993	70.59	40.75	
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100	unit	30,000	23	17,426	30	6,000	5	6,000	5	6,000	16.67	100.00	28.00	23,426	28.00	78.09	
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	105	unit	198,118	7	84,009	10	64,200	2	34,891	3	59,141	30.00	92.120	10.00	143,150	9.52	72.25	
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	48	Bulan	1,006,150	36	371,259	12	377,282	3	147,002	12	369,560	100.00	97.95	48.00	740,819	100.00	73.63	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	51	Bulan	201,862	27	96,831	1	35,000	-	11,155	1	35,000	100.00	100.00	28.00	131,831	54.90	65.31	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51	Bulan	77,800	27	32,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	100.00	100.00	39.00	42,000	76.47	53.98	
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39	Bulan	180,886	12	82,126	12	76,000	6	3,000	12	68,252	100.00	89.81	24.00	150,378	61.54	83.13	
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	953	Porsi	45,000	300	22,000	140	9,000	44	3,866	136	7,886	97.14	87.62	436.00	29,886	45.75	66.41	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	763	Kali	437,124	250	164,324	20	71,040	1	22,860	6	64,267	30.00	90.47	256.00	228,591	33.55	52.29	
				19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	413	Kali	760,221	150	329,323	80	218,698	12	102,860	65	218,039	81.25	99.70	215.00	547,362	52.06	72.00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.25	91.44			48.95	83.86		
Predikat kinerja																	S	ST			SR	T		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			K
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
3	04	1	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	persen			100.00	200,000				199,330							Sekretariat		
				11	Penyewaan Rumah/Gedung Parkiran kantor dinas	Jumlah Unit yang di sewa	4	unit	260,000	3	190,000	1	70,000	-	-	1	70,000	100.00	100.00	4.00	260,000	100.00	100.00		
				42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhab	1	unit	200,000	-	-	1	200,000	1	199,330	1	199,330	100.00	99.67	1.00	199,330	100.00	99.67		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	99.83			100.00	99.83		
Predikat kinerja																		ST	ST			ST	ST		
3	04	1	28		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	2,925,503				2,436,316									
				01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	32	Unit	2,373,013	-	-	32	2,349,013	10	106,942	32	2,042,402	100.00	86.95	32.00	2,042,402	100.00	86.07		
				02	Peningkatan Sistem kemitraan pada masyarakat peduli api	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	500	orang	290,000	-	-	4	213,300	4	156,834	4	210,254	100.00	98.57	4.00	210,254	0.80	72.50		
				04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhutla	24	Kali	179,190	-	-	6	179,190	4	43,060	4	43,060	66.67	24.03	4.00	43,060	16.67	24.03	Seksi Perlindungan dan KSDAE	
				05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Patroli	24	kali	184,000	-	-	12	184,000	9	137,200	10	140,600	83.33	76.41	10.00	140,600	41.67	76.41		
				11	Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan	10	Kali	81,300	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		87.50	71			39.78	64.75		
Predikat kinerja																		T	S			SR	R		
3	04	1	29		Program Perlindungan dan Pngamanan Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	276,000				114,810							Seksi Perlindungan dan KSDAE		
				01	Patroli Pngamanan	Jumlah kegiatan patroli pngamanan	50	Kali	143,500	-	-	12	276,000	2	9,550	6	114,810	50.00	41.598	6.00	114,810	12.00	80.01		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50.00	41.60			12.00	80.01		
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	T		
3	04	1	31		RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Presentase rehabilitasi lahan kritis	55.00	persen			53.00	301,750				270,730							Seksi Perencanaan		
				01	Rehabilitasi Lahan	Jumlah lahan mangrove yang direhabilitasi (Dana Reboisasi)	10	Ha	301,750	-	-	10	301,750	10	127,850	10	270,730	100.00	89.72	10.00	270,730	100.00	89.72		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	89.72			100.00	89.72		
Predikat kinerja																		ST	T			ST	T		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
3	04	1	32		Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Presentase rehabilitasi lahan kritis	55.00	persen			53.00	6,719				6,300								Seksi Perlindungan dan KSDAE	
				01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	2	usaha	211,324	-	-	2	6,719	-	-	-	6,300	-	93.76	-	6,300	-	2.98		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	93.76			-	2.98			
Predikat kinerja																	SR	ST			SR	SR			
3	04	1	33		Pembangunan persemaian permanen (DBH-DR)	Presentase rehabilitasi lahan kritis	55.00	persen			53.00	62,000				56,000								Seksi Perencanaan	
				01	Pembuatan /pengadaan Bibit	Jumlah unit Persemaian yang dibangun di wilayah kerja KPH	1	unit	68,000	-	-	1	62,000	1	54,300	1	56,000	100.00	90.32	1.00	56,000	100.00	82.35		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	90.32			100.00	82.35			
Predikat kinerja																	ST	T			ST	T			
3	04	11	35		Biaya Operasional KPH (DBH-DR)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	50.00	persen			45.00	110,300				88,089								Seksi Perencanaan	
				01	Tata hutan dan perencanaan*	Jumlah dokumen perencanaan	4	Dokumen	110,300	-	-	4	110,300	4	75,768	4	88,089	100.00	79.86	4.00	88,089	100.00	79.86		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	79.86			100.00	79.86			
Predikat kinerja																	ST	T			ST	T			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																	76.59	82			50.09	72.92			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																	T	T			SR	S			

Tabel 2.18. Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Tana Tidung

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	III	IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17					
3			Urusan Pilihan																		
3	04		Kehutanan																		
3	04	1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen	738,000	100.00	1,525,272	100.00	949,367	-	850,618									
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	4,250 Lembar	8,000	4,000	9,782	100	5,000	-	25	1,107	68	3,220	68.00	64.40	4,068.00	13,002	95.72	162.53
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Bulan	45,000	36	83,550	12	46,400	17,782	3	14,861	12	41,886	100.00	90.27	48.00	125,436	100.00	278.75
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	15 unit	7,000	-	-	5	38,000	-	-	-	4	35,531	80.00	93.50	4.00	35,531	26.67	507.59
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	17 unit	10,000	-	-	7	57,500	21,600	4	29,815	7	51,415	100.00	89.417		51,415	-	514.15
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	48 Bulan	300,000	36	465,687	12	383,210	71,640	3	135,520	12	349,570	100.00	91.22	48.00	815,257	100.00	271.75
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	36 Bulan	10,000	24	23,716	12	10,000	-	-	-	6	9,938	50.00	99.38	30.00	33,654	83.33	336.54
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang dsediakan	48 Bulan	30,000	24	50,754	12	25,100	-	-	-	6	2,200	50.00	8.77	30.00	52,954	62.50	176.51
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48 Bulan	8,000	24	42,290	12	16,608	9,300	6	6,268	12	15,568	100.00	93.74	36.00	57,858	75.00	723.23
		13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit	20,000	7	198,073	1	54,600	4,825	2	17,703	4	35,163	400.00	64.40	11.00	233,236	157.14	1,166.18
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Unit	25,000	7	82,375	5	30,090	4,000	1	16,358	1	27,309	20.00	90.76	8.00	109,684	114.29	438.74
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	900 Porsi	15,000	750	40,395	150	12,100	-	150	10,386	100	10,386	66.67	85.83	850.00	50,781	94.44	338.54
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	165 Kali	80,000	150	183,948	15	57,871	7,000	4	22,690	11	55,764	73.33	96.36	161.00	239,712	97.58	299.64
		19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	340 Kali	180,000	250	344,702	90	212,888	25,380	44	106,466	90	212,669	100.00	99.90	340.00	557,371	100.00	309.65
Rata-rata capaian kinerja (%)												86.77	82.15			85.13	424.91				
Predikat kinerja												T	T			T	ST				
3	04	2 02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 persen	359,300	100.00	110,890	100.00	98,300											
		11	Penyewaan Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkiran Kantor Dinas yang Disewakan	4 Unit	348,000	1	87,250	1	87,000	-	-	-	1.00	87,000	100.00	100.00	2.00	174,250	50.00	50.07
		13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Didakan	31 Stel	11,300	25	23,640	9	11,300	-	6	10,100	6.00	10,100	66.67	89.38	31.00	33,740	100.00	298.58
Rata-rata capaian kinerja (%)												83.33	94.69			75.00	174.33				
Predikat kinerja												T	ST			S	ST				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K			Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		10	11		12 = 8-9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
3	04	3	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	60.00	persen	10,000		50.00	10,000												
			01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5	Orang	10,000	-	-	5	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			-	-				
Predikat kinerja														-	-			-	-				
3	04	11	28	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00				2,390,642									
			01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	36	Unit	1,946,635	-	-	5	1,946,635	737,723	-	-	10	1,243,021	200.00	63.85	10.00	1,243,021	27.78	63.85
			02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api	Jumlah MPA yang terbentuk	2	MPA	146,560	-	-	3	146,560	600	3	107,668	3	108,268	100.00	73.87	3.00	108,268	150.00	73.87
			03	Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya	Luas Agroforestry, Agro Silvo Pastura	140	Ha	1,099,100	-	-	1	1,049,100	115,409	1	742,075	1	926,156	100.00	88.28	1.00	926,156	0.71	84.26
			04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhuta	5	Kegiatan	162,900	-	-	5	162,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			11	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan	1	Kegiatan	89,600	-	-	3	125,600	7,125	1	100,232	3	113,197	100.00	90.13	3.00	113,197	300.00	126.34
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	63.23					95.70	69.67		
Predikat kinerja														ST	R					ST	ST		
3	04	11	29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen	760,100		42.00	760,100												
			01	Patroli Pengamanan	Jumlah kegiatan patroli pengamanan	20	Kegiatan	760,100	-	-	10	760,100	454,640	6	182,882	10	643,362	100.00	84.642	10.00	643,362	50.00	84.64
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	84.64					50.00	84.64		
Predikat kinerja														ST	ST					SR	T		
3	04	11	30	Program Pengembangan Perbenihan		55.00	persen	323,750		53.00	323,750												
			04	Pembuatan/ Pengadaan Bibit	Jumlah Sarpras dan Bibit yang diadakan	23	Unit	323,750	-	-	1	323,750	90,390	1	129,952	1	291,992	100.00	90.19	1.00	291,992	4.35	90.19
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	90.19					4.35	90.19		
Predikat kinerja														ST	T					SR	ST		
3	04	11	32	Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		55.00	persen	174,175		53.00	174,175												
			01	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Unit Usaha Perhutanan Sosial yang Dikembangkan	6	Unit Usaha	174,175	-	-	5	174,175	44,655	3	111,864	5	160,519	100.00	92.16	5.00	160,519	83.33	92.16
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	92.16					83.33	92.16		
Predikat kinerja														ST	ST					T	ST		
3	04	11	35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*		50.00	persen	116,352		45.00	116,352												
			01	Tata Hutan dan Perencanaan*	Jumlah Unit Manajemen Pemegang ijin di dalam Kawasan KPH yang Menjadi Pembinaan dan Pemantauan	1	Dokumen	116,352	-	-	1	116,352	10,050	1	59,143	1	93,295	100.00	80.18	1.00	93,295	100.00	80.18
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	80.18					100.00	80.18		
Predikat kinerja														ST	T					ST	T		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)														111.68	97.87					44.86	169.35		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)														ST	ST					SR	ST		

Tabel 2.19. Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Tarakan

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			K
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
3					Urusan Pilihan																				
3	04				Kehutanan																				
3	04	1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100.00	persen			100.00	847,052			-	738,752									
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	200,000	Lembar	22,500	4,000	12,500	2500	4,500	165	766	420	4,042	16.80	89.81	4,420.00	16,542	2.21	73.52	Sekretariat	
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	167,600	36	98,100	12	40,020	3	2,050	6	20,448	50.00	51.09	42.00	118,548	70.00	70.73		
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	48	Bulan	1,450,100	24	595,700	12	316,900.0	3	189,492	6	312,492	50.00	98.61	30.00	908,192	62.50	62.63		
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	48	Bulan	35,000	24	15,000	12	5,000	-	-	12	4,982	100.00	99.64	36.00	19,982	75.00	57.09		
				09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20	Unit	45,000	20	25,000	10	4,000	19	150	6	2,025	60.00	50.63	26.00	27,025	130.00	60.06		
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60	Bulan	174,750	36	94,750	12	40,000	6	19,442	6	38,647	50.00	96.62	42.00	133,397	70.00	76.34		
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan	10,000	24	5,000	12	2,100	3	1,699	9	1,941	75.00	92.43	33.00	6,941	68.75	69.41		
				12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	48	Bulan	16,000	24	6,000	12	4,000	-	-	12	3,989	100.00	99.72	36.00	9,989	75.00	62.43		
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25	Unit	74,000	15	34,000	20	130,600	-	-	36	120,486	180.00	92.26	51.00	154,486	204.00	208.76		
				15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	Bulan	10,900	48	6,100	12	1,560	3	390	6	1,550	50.00	99.36	54.00	7,650	112.50	70.18		
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2000	Porsi	45,000	750	25,000	300	11,600	50	4,202	175	11,210	58.33	96.64	925.00	36,210	46.25	80.47		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	980	Kali	448,866	469	248,866	80	103,562	-	-	5	33,730	6.25	32.57	474.00	282,597	48.37	62.96		
				19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	620	Kali	226,012	126	126,012	100	183,210	32	64,044	65	183,210	65.00	100.00	191.00	309,222	30.81	136.82		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	47.93	79.01			63.49	76.31			
Predikat kinerja																	SR	SR			R	R			
3	04	2	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	persen			100.00	40,200				33,432									
				24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30	Unit	159,800	3	64,000	3	40,200	1	29,120	3	33,432	100.00	83.17	6.00	97,432	20.00	60.97	Sekretariat	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	83.17			20.00	60.97			
Predikat kinerja																	R	R			R	SR			
3	04	11	28		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	683,991				1,741,545									
				01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	135	Unit	2,370,550	-	-	135	2,371	7	962,590	18	1,349,477	13.33	56,926.73	18.00	1,349,477	13.33	56.93		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	
			02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api*	Jumlah kegiatan Pembentukan MPA	2	MPA	48,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhutla	24	Kali	291,360	-	-	24	245,960	-	-	10	78,922	41.67	32.09	10.00	78,922	41.67	27.09
			05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah Kegiatan Patroli	24	Kegiatan	284,100	-	-	24	284,100	10	132,224	24	220,424	100.00	77.59	24.00	220,424	100.00	77.59
			06	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode*	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2	Kegiatan	74,740	-	-	2	70,090	-	26,997	2	55,536	100.00	79.23	2.00	55,536	100.00	74.31
			08	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penye- garan/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan	20	Orang	52,295	-	-	20	81,470	20	37,187	20	37,187	100.00	45.64	20.00	37,187	100.00	71.11
			11	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah kegiatan Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	2	Kegiatan	130,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)														51.67	19,012.13			88.75	51.17			
Predikat kinerja														R	SR			SR	SR			
3	04	11	29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	592,350				484,024						Seksi KSDAE, Perlindungan dan Pemberdayaa n Masyarakat	
			01	Patroli Pengamanan*	Jumlah kegiatan patroli pengamanan	24	Kegiatan	414,850	-	-	24	592,350	8	316,090	24	484,024	100.00	81.713	24.00	484,024	100.00	116.67
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	81.71			100.00	3.76			
Predikat kinerja														ST	SR			SR	SR			
3	04	11	31	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Presentase rehabilitasi lahan kritis	55.00	persen			53.00	461,620				414,419						Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	
			01	Rehabilitasi Lahan*	Jumlah lahan yang direhabilitasi	16	Ha	532,760	-	-	6	461,620	6	407,307	6	414,419	100.00	89.77	6.00	414,419	37.50	77.79
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	89.77			37.50	77.79			
Predikat kinerja														-	-			-	-			
3	04	11	32	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	50.00	persen			45.00	364,400				329,534							
			03	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL*	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	4	KUPS	217,400	-	-	4	364,400	4	307,251	4	329,534	100.00	90.43	4.00	329,534	100.00	151.58
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	90.43			100.00	151.58			
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			
3	04	11	33	Program Pembangunan Persemaian Permanen (DBH-DR)*	Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis	50.00	persen			45.00	294,670				246,258							
			01	Pembuatan/Pengadaan Bibit*	Jumlah bibit yang diadakan untuk persemaian permanen	1	unit	312,990	-	-	1	294,670	1	246,258	1	246,258	100.00	83.57	1.00	246,258	100.00	78.68
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	83.57			100.00	78.68			
Predikat kinerja														-	-			-	-			
3	04	11	34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase masyarakat yang terbina di dalam kawasan hutan	45.00	persen			42.00	587,875				266,440							
			01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	Jumlah Program Penyuluhan	1	Dokumen	47,750	-	-	1	27,250	-	-	1	8,520	100.00	31.27	1.00	8,520	100.00	17.84
			02	Metode dan Materi Penyuluhan*	Jumlah Metode dan Materi Penyuluhan	12	Bulan	100,575	-	-	12	147,525	2	66,373	4	92,128	33.33	62.45	4.00	92,128	33.33	91.60
			03	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan*	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	1	Unit	50,000	-	-	1	50,000	1	45,059	1	45,059	100.00	90.12	1.00	45,059	100.00	90.12
Rata-rata capaian kinerja (%)														66.67	46.86			100.00	90.12			
Predikat kinerja														R	SR			SR	SR			
3	04	11	35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan KPH	50.00	persen			45.00	181,550				60,367							

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
					01	Tata hutan dan perencanaan*	Dokumen RPHJP	1	Dokumen	117,450	-	-	1	181,550	-	38,406	1	60,367	100.00	33.25	1.00	60,367	100.00	51.40	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100.00	33.25			100.00	151.58			
Predikat kinerja																		ST	SR			SR	SR			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)																		83.27	3,229.84	-	-	68.29	70.26			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)																		R	SR			SR	SR			

Provinsi Kalimantan Utara

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Tabel 2.20. Evaluasi Renja Tahun 2020 UPTD KPH Bulungan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
3					Urusan Pilihan																			
3	04				Kehutanan																			
3	04	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100.00	persen		1,042,274	100.00	538,688		202,833	-	507,409								
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3,250	Lembar	19,000	1,058	6,344	10	2,388	7	1,822	9	2,299	90.00	96.27	1,067.00	8,643	32.83	45.49	Sekretariat
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	Bulan	102,700	27	33,970	12	17,520	3	3,065	12	14,873	100.00	84.89	39.00	48,843	81.25	47.56	
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan selesai perizinannya	92	Unit	128,900	9	60,569	12	60,000	2	22,208	6	59,886	50.00	99.81	15.00	120,455	16.30	93.45	
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	48	Bulan	687,700	27	379,100	12	172,772	3	65,464	12	172,592	100.00	99.90	39.00	551,692	81.25	80.22	
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	48	Bulan	48,857	27	10,573	12	4,200	12	4,160	12	4,160	100.00	99.05	39.00	14,733	81.25	30.16	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	5	Paket	75,000	3	32,934	1	40,000	-	13,949	1	38,898	100.00	97.25	4.00	71,832	80.00	95.78	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan	35,000	27	11,051	12	7,800	12	5,135	12	5,135	100.00	65.83	39.00	16,186	81.25	46.25	
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33	Unit	212,500	16	95,150	25	122,008	20	46,585	25	110,865	100.00	90.87	41.00	206,015	124.24	96.95	
				17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	500	Porsi	41,000	13	13,477	100	9,000	10	2,992	10	2,992	10.00	33.24	23.00	16,469	4.60	40.17	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400	Kali	537,400	13	245,244	3	25,000	-	-	3	17,708	100.00	70.83	16.00	262,953	4.00	48.93	
				19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	240	Kali	465,400	13	153,863	35	78,000	24	39,275	35	78,000	100.00	100.00	48.00	231,863	20.00	49.82	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	86.36	85.27			55.18	61.34		
Predikat kinerja																								
3	04	2	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100.00	persen			100.00	89,100				89,100								
				11	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Unit Tersewa	4	Unit	335,000	2	154,044	1	89,100	-	-	1	89,100	100.00	100.00	3.00	243,144	75.00	72.58	Sekretariat
				12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang diadakan	40	Stel	36,000	10	9,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	100.00			75.00	72.58		
Predikat kinerja																								
3	04	11	28		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	45.00	persen			42.00	3,566,452		1,817,411		2,930,980								
				01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Sarana Prasarana kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	714	Unit	17,690,000	-	-	148	2,011,654	12	1,324,676	147	2,011,654	99.32	100.00	147.00	2,011,654	20.59	11.37	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan			
										IV														
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
1	2	3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17			
			02	Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api*	Jumlah kegiatan Pembentukan MPA	4	MPA	272,568	-	-	4	272,568	-	19,716	2	204,212	50.00	74.92	2.00	204,212	50.00	74.92	Seksi KSDAE, Perindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			03	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura dan kegiatan sejenis lainnya	Penerapan Agroforestry, Agrosilvopastura dan kegiatan sejenis lainnya	50	Ha	879,062	-	-	50	478,560	45	393,925	50	401,305	100.00	83.86	50.00	401,305	100.00	45.65		
			04	Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Karhutla	217	Kali	2,536,950	-	-	4	274,090	2	10,720	3	15,480	75.00	5.65	3.00	15,480	1.38	0.61		
			05	Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah Kegiatan Patroli	60	Kegiatan	1,732,500	-	-	8	95,990	3	36,450	4	42,950	50.00	44.74	4.00	42,950	6.67	2.48		
			06	Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode*	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	3	Kegiatan	268,780	-	-	3	74,400	-	1,200	1	10,017	33.33	13.46	1.00	10,017	33.33	3.73		
			11	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*	Jumlah kegiatan Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	4	Kegiatan	150,690	-	-	4	150,690	1	30,725	3	77,422	75.00	51.38	3.00	77,422	75.00	51.38		
			12	Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jalan Rambu/Papan Peringatan	30	Unit	208,500	-	-	30	208,500	-	-	30	167,940	100.00	80.55	30.00	167,940	100.00	80.55		
Rata-rata capaian kinerja (%)														74.77	50.13			96.74	45.11					
Predikat kinerja																								
3	04	11	29	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Prosentase peningkatan produksi hasil hutan	5.00	persen				3.00	88,600		40,445		48,305						Seksi KSDAE, Perindungan dan Pemberdayaan Masyarakat		
			01	Patroli Pengamanan*	Jumlah kegiatan patroli pengamanan	86	Kegiatan	1,989,950	-	-	8	88,600	4	40,445	5	48,305	62.50	54.520	5.00	48,305	5.81		2.43	
Predikat kinerja														62.50	54.52			5.81	0.08					
3	04	11	31	RHL yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Presentase rehabilitasi lahan kritis	55.00	persen				53.00	412,269		226,509		242,949						Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		
			01	Rehabilitasi Lahan*	Jumlah lahan yang direhabilitasi	44	Ha	2,861,031	-	-	4	405,879	3	226,509	4	236,559	100.00	58.28	3.50	236,559	7.95		8.27	
			03	Penyediaan Bibit	Jumlah Dokumen yang Tersedia	1	Dokumen	303,000	-	-	1	6,390	-	-	-	6,390	-	100.00	-	6,390	-		2.11	
Predikat kinerja														50.00	79.14			3.98	5.19					
Predikat kinerja																								
3	04	11	32	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	50.00	persen				45.00	1,711,000		1,154,608		1,349,470								
			01	Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Dalam Rangka RHL*	Jumlah KTH yang akan Dibentuk	5	KTH	525,650	-	-	3	146,440	1	11,025	3	37,895	100.00	25.88	3.00	37,895	60.00	7.21	Seksi KSDAE, Perindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			03	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	13	KTH	5,287,395	-	-	13	1,564,560	11	1,143,583	13	1,311,575	100.00	83.83	13.00	1,311,575	100.00	24.81		
Predikat kinerja														100.00	54.85			80.00	16.01					
Predikat kinerja																								
3	04	11	34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase masyarakat yang terbina di dalam kawasan hutan	59.00	persen				57.00	46,470		34,125		42,225								
			01	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD*	Jumlah Program Penyuluhan	1	Dokumen	47,750	-	-	1	46,470	1	34,125	1	42,225	100.00	90.87	1.00	42,225	100.00	88.43	Seksi KSDAE, Perindungan dan Pemanfaatan	
Predikat kinerja														100.00	90.87			100.00	88.43					
3	04	11	35	Program Biaya Operasional KPH (DBH-DR)*	Persentase Luasan Pengelolaan Tata Hutan KPH	50.00	persen				43.00	71,200		131,950		282,569								

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Keterangan			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			K	Rp.	
1	2				3	4	5		6		7		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17		
					01	Tata hutan dan perencanaan*	Jumlah Dokumen Tata Hutan	4	Dokumen	662,340	-	-	2	351,897	1	94,930	2	230,974	100.00	65.64	2.00	230,974	50.00	34.87	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	
					02	Promosi Peluang dan Investasi di KPH*	Jumlah Dokumen Rencana Bisnis	1	Dokumen	109,500	-	-	1	71,200	1	37,020	1	51,595	100.00	72.46	1.00	51,595	100.00	47.12	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100.00	69.05			75.00	41.00				
Predikat kinerja																										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																	84.20	72.98			61.46	41.22				
																	0									



Luas Kawasan Hutan di provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Menteri Lingkungan dan Kehutanan SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- Hutan Lindung (HL)	: 1.055.770 ha
- Hutan Produksi Tetap (HP)	: 3.245.734 ha,
- Areal Penggunaan Lain (APL)	: 1.368.018 ha
- <u>Hutan Konservasi</u>	: <u>1.268.539 ha</u>
Jumlah Total	: 6.938.061 ha

Lahan kritis merupakan lahan yang tidak produktif, meskipun dikelola produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul, dan tidak dapat digunakan usaha karena tingkat kesuburannya sangat rendah.

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, adalah sebagai berikut :

1. Genangan air yang terus-menerus seperti di daerah pantai dan rawa – rawa.
2. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah bayangan hujan.
3. Erosi tanah atau masswasting yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan dan daerah miring lainnya.
4. Masuknya material yang dapat bertahan lama ke lahan, misalnya plastik. Plastik dapat bertahan 200 tahun di dalam tanah sehingga sangat mengganggu kelestarian lingkungan.

Pengelolaan kawasan hutan yang lestari disertai dengan peningkatan fungsi-fungsinya dapat terwujud, apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya. Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi penyuluh kehutanan yaitu dengan adanya penetapan berbagai ketetapan atau prinsip – prinsip dasar



dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan para penyuluh kehutanan.

Tabel 2.21. Data Penyuluh Kehutanan Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH (Org)	WILAYAH KERJA
1	Dinas Kehutanan	1	
2	UPTD KPH Bulungan	7	KPHP Unit IX Kayan dan KPHP Unit XIII Keburau
3	UPTD KPH Nunukan	6	Nunukan, Nunukan Selatan, Sebuku, Sebatik Tengah, Sebatik Barat, Sei.Menggaris, , Sembakung, Pampang
4	UPTD KPH Tarakan	6	Tarakan Tengah, Tarakan Utara, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Barat, Sekatak, Bunyu
5	UPTD KPH Malinau	5	
6	UPTD KPH KTT	3	Desa Rian, Desa Bebatu, Desa Kapuak, Desa Bandan, Desa Sambungan, Desa Tungku Dacing
JUMLAH		28	

Sumber : Dinas Kehutanan, (2021)

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk penyuluh kehutanan terbanyak terdapat di Kabupaten Nunukan yaitu sebanyak 7 Orang, dimana penyuluh kehutanan ini di bagi kedalam beberapa wilayah kerja baik di Kabupaten maupun di Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Untuk penyuluh terbanyak berikutnya terdapat di Kabupaten Bulungan dengan 6 Orang, dimana wilayah kerja para penyuluh kehutanan untuk Kabupaten Bulungan terdapat di kecamatan tanjung palas maupun di kecamatan sekatak.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dibentuknya KPH ini karena munculnya



permasalahan kehutanan yang diakibatkan adanya ketiadaan pengelolaan di lapangan sehingga seri disalah artikan oleh masyarakat bahwa kawasan hutan merupakan akses terbuka untuk membuka lahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011 perihal penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPHL) dan kesatuan hutan produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.22 Rincian Luas dan Fungsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP Prov. Kaltara

NO	UNIT	FUNGSI KAWASAN HUTAN			LUAS (HA)	KABUPATEN/ KOTA
		HL (HA)	HPT (HA)	HP (HA)		
1	KPHL UNIT I	56,879	-	-	56,879	NUNUKAN
2	KPHL UNIT VI	2,400	-	2,233	4,633	TARAKAN
	JUMLAH KPHL	59,279	-	2,233	61,512	
1	KPHP UNIT II	153,969	166,835	25,126	345,930	MALINAU
2	KPHP UNIT X	212,622	358,083	106,198	676,903	MALINAU
3	KPHP UNIT XI	65,596	309,233	267,646	642,475	MALINAU
4	KPHP UNIT XX	144,519	393,411	-	537,930	MALINAU
5	KPHP UNIT XXI	95,603	372,510	-	468,113	MALINAU
6	KPHP UNIT III	73,889	92,339	13,358	179,586	NUNUKAN
7	KPHP UNIT IV	33,329	102,523	282,279	418,131	NUNUKAN
8	KPHP UNIT VIII	-	-	140,334	140,334	BULUNGAN
9	KPHP UNIT IX	5,985	434	198,503	204,922	BULUNGAN
10	KPHP UNIT XIII	29,580	117,378	70,501	217,459	BULUNGAN
11	KPHP UNIT V	168,198	309,868	9,776	487,842	TANA TIDUNG
12	KPHP UNIT VII	-	9,504	37,849	47,353	TANA TIDUNG
	JUMLAH KPHP	983,290	2,232,118	1,151,570	4,366,978	
	TOTAL KPHL DAN KPHP	1,042,569	2,232,118	1,153,803	4,428,490	

HP : Hutan Produksi, HPT : Hutan Produksi Terbatas, HL : Hutan Lindung

Sumber : Data Bidang Kehutanan tahun 2015

Dari data diatas terdapat 2 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dengan total luas wilayah seluas 61.512 Ha dan 12 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan total luas wilayah seluas 4.366.978 Ha. Wilayah terluas terdapat di KPHP Unit X di Kabupaten Malinau dengan luas wilayah seluas 676.903 Ha. Kemudian yang paling kecil luas wilayah untuk KPHP terdapat di KPHP unit VII di Kabupaten Tana Tidung dengan hanya luas wilayah 47.353 Ha.



Tabel 2.23. Jumlah Hotspot Per Kabupaten / Kota dan Luas Kebakaran Hutan Tahun 2015 – 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Luas Kebakaran Hutan / Jumlah Hotspot						
	Hotspot Per Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Luas Karhutla	14.506	2.107	82	626	8.559	1.721
II	Jumlah Hotspot						
1	Bulungan	-	43	10	28	134	43
2	Tarakan	-	6	-	-	7	-
3	Malinau	-	51	23	33	28	64
4	Nunukan	-	23	2	8	21	15
5	Tana Tidung	-	2	1	1	14	1
	JUMLAH	-	125	36	70	204	123

Sumber : *) *Si Pongi dan Dinas Kehutanan Tahun 2020*

Salah satu yang menjadi ancaman yaitu kebakaran hutan, dimana kebakaran hutan sendiri merupakan faktor lingkungan dari api yang memberikan pengaruh terhadap hutan yang dapat menimbulkan dampak negative maupun positif. Terjadinya kebakaran hutan adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam. Penyebab kebakaran hutan yang terbanyak karena tindakan dan kelalaian manusia dimana, hampir 90 % kebakaran yang terjadi di hutan Indonesia disebabkan oleh manusia sedangkan hanya 10 % persen disebabkan oleh alam.

Data diatas menunjukkan bahwa Hotspot di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi naik turun. Dimana hotspot tertinggi terjadi pada tahun 2019 (204) dan terendah terjadipada tahun 2017 (36). Penyebab timbulnya hotspot di Prov. Kalimantan Utara disebabkan oleh pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat dan atau adanya bias dalam record data. Sebagian besar hotspot tersebut setelah dilakukan verifikasi berada di luar Kawasan hutan.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

2.4.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024, Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun misi KLHK yaitu: 1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas; 2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.24. Sasaran Jangka Menengah KLHK

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Deforestasi yang meningkat	Kondisi hutan dan lahan sulit dijangkau	Adanya dukungan anggaran
	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan			
	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan	Pengelolaan perhutanan social yang belum optimal	Masyarakat pemegang izin perhutanan sosial masih	Dilakukan sosialisai di masyarakat secara rutin



	berkelanjutan		belum mampu memanfaatkan hutan	
	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	Kurangnya jumlah SDM yang ada	Kapasitas personil terbatas	

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Tabel 2.25 Sasaran, Indikator dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SATUAN
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks kualitas air/Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara/Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas air laut	Indeks kualitas air laut/Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Indeks kualitas lahan /Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas ekosistem gambut/Poin
	Meningkatnya Indeks Ekosistem Gambut	Indeks kualitas ekosistem gambut/Poin
Terselenggaranya tata Kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	SAKIP/Poin



2.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang

Telaahan Tata Ruang Wilayah masih mengacu laporan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Utara serta Keputusan Menteri Kehutanan RI SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

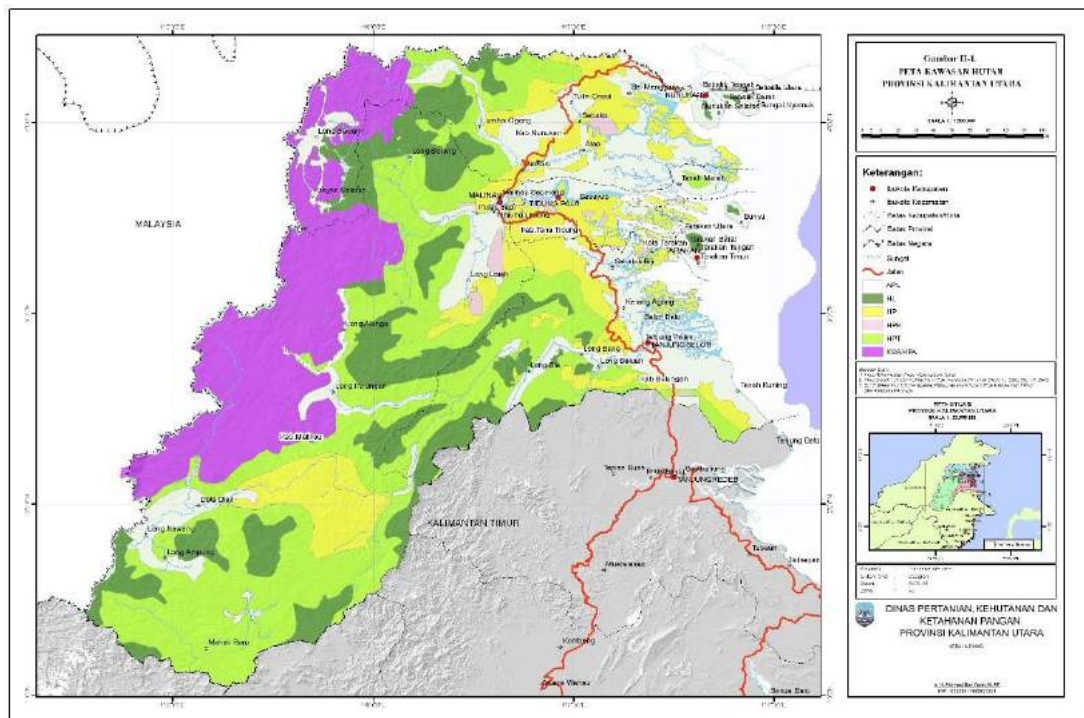
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 sebagai berikut:

Tabel 2.26. Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara (KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi; HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi)

Kabupaten	KSA/KPA (ha)	HL (ha)	HPT (ha)	HP (ha)	HPK (ha)	Jumlah (ha)
BULUNGAN	0	206.717	426.369	256.655	5.586	895.327
TARAKAN	0	6.997	0	0	0	6.997
NUNUKAN	269.677	156.200	189.061	274.432	13.514	902.884
MALINAU	998.862	685.856	1.570.815	364.811	30.474	3.650.818
TANA TIDUNG	0	0	9.084	154.480	9.520	173.084
KALTARA	1.268.539	1.055.770	2.195.329	1.050.378	59.094	5.629.110
(%)	22,54	18,76	39,00	18,66	1,05	100

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 dan SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020

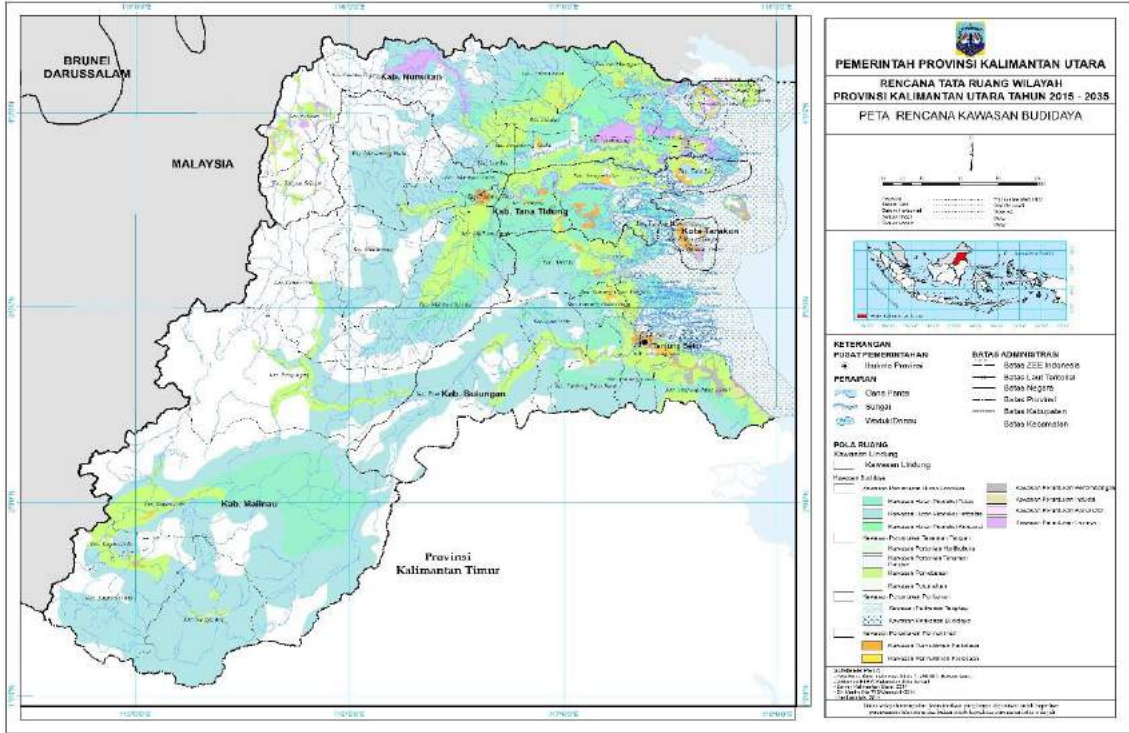
Gambar 2.2 Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Utara



Berdasarkan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas 1.276.186 Hektar, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 2.279.415 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas 1.056.151 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 55.017 Ha.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebar di wilayah:

- (1). Kabupaten Malinau dengan luas paling kurang 92.710 hektar.
- (2). Kabupaten Nunukan dengan luas paling kurang 38.054 hektar.
- (3). Kabupaten Tana Tidung dengan luas paling kurang 7.539 hektar.
- (4). Kabupaten Bulungan dengan luas paling kurang 103.533 hektar.
- (5). Kota Tarakan dengan luas paling kurang 5.549 hektar.



Secara umum semua isu-isu Pembangunan Berkelanjutan sudah terakomodir dalam kalimat tujuan Penataan ruang Provinsi Kalimantan utara, tetapi belum menyinggung substansi lebih rinci terkait dengan penataan ruang sesuai Perda RTRWP. Berdasarkan hal tersebut maka berikut ini adalah arahan perbaikan tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis, serta isu-isu strategis terkait pengelolaan sumberdaya alam.
- (2) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat agro-industri dan pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia



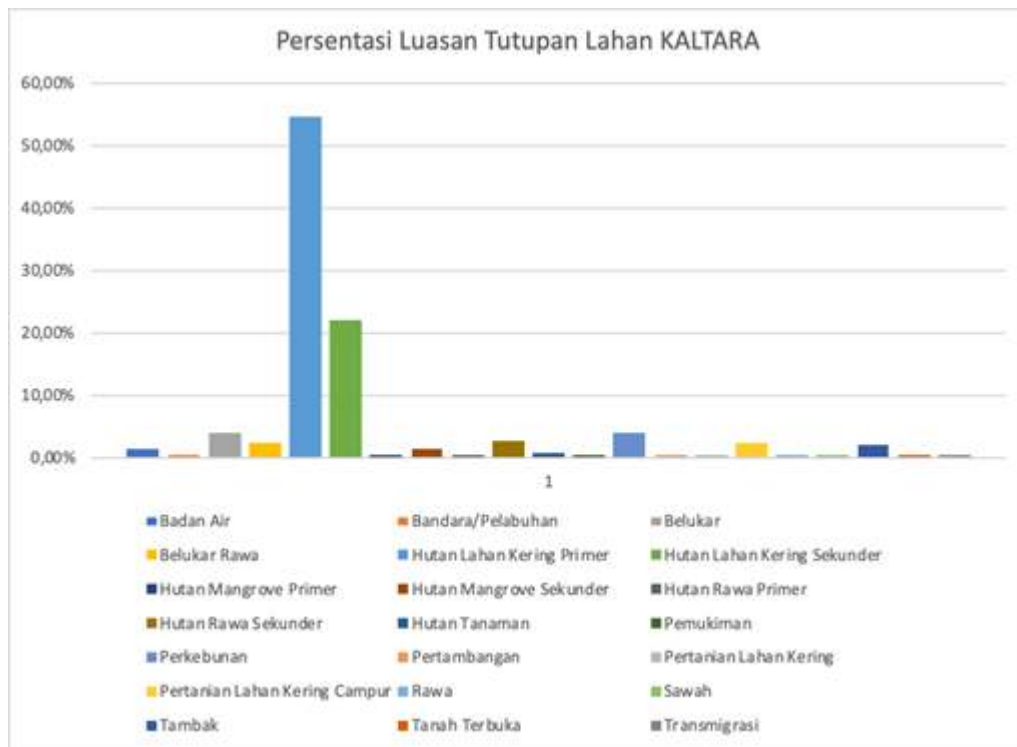
2.4.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekitar 90,06% dari luasan total wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 6.440.254 Ha didominasi oleh hutan. Luasan pertanian tersebar sekitar 1,55% atau 110.751 Ha dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau. Kondisi geografis provinsi ini yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam, sebagian besar dimanfaatkan sebagai hutan lindung. Penggunaan lahan permukiman hanya 19.090 Ha atau 0,27% dari total luasan wilayah provinsi ini, dengan sebaran lahan permukiman paling tinggi berada di Kabupaten Nunukan. Dan hanya sebagian kecil penggunaan lahan untuk pertambangan yakni 8.879 Ha atau 0,12% dari total luasan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.27. Tabel Tutupan Lahan

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Badan Air	97.057,22	1,39%
2	Bandara/Pelabuhan	284,02	0,00%
3	Belukar	275.571,80	3,96%
4	Belukar Rawa	156.378,50	2,25%
5	Hutan Lahan Kering Primer	3.804.171,00	54,65%
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.539.013,00	22,11%
7	Hutan Mangrove Primer	26.534,86	0,38%
8	Hutan Mangrove Sekunder	97.411,65	1,40%
9	Hutan Rawa Primer	6.584,56	0,09%
10	Hutan Rawa Sekunder	181.809,60	2,61%
11	Hutan Tanaman	59.432,24	0,85%
12	Pemukiman	22.834,34	0,33%
13	Perkebunan	286.295,80	4,11%
14	Pertambangan	11.135,65	0,16%
15	Pertanian Lahan Kering	34.188,81	0,49%
16	Pertanian Lahan Kering Campur	168.413,50	2,42%
17	Rawa	1.001,92	0,01%
18	Sawah	4.073,78	0,06%
19	Tambak	151.537,10	2,18%
20	Tanah Terbuka	31.732,39	0,46%
21	Transmigrasi	4.977,06	0,07%
	TOTAL	6.960.439	100%

Gambar 2.4 Presentase Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara



Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Hutan negara ditetapkan pemerintah melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan tiga fungsi pokok tersebut sebagai Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK) yang terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Hutan Produksi yang terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Pemerintah menetapkan HL, HK, HP, dan HPT sebagai hutan tetap yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan atau lewat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). HPK dan Area Penggunaan Lain (APL) dapat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan lain, misalnya pertanian dan perkebunan yang kewenangan pelepasan kawasan ada di menteri untuk HPK dan bupati untuk APL. Hal tersebut terkait dengan rencana pengelolaan kawasan perbatasan, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan



kawasan budidaya yang termasuk ke dalam ruang lingkup program-program kegiatan HOB atau Kawasan Jantung Borneo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 % dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara \pm 75.467,70 km². Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas baik ditinjau dari wilayah maupun kawasan hutannya (sekitar 48,38 %). Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas di antara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu sekitar 2.195.329 ha (sekitar 39 %).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan Jantung Kalimantan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui UU No. 26 Thn. 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Penataan Ruang ditujukan untuk menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang.

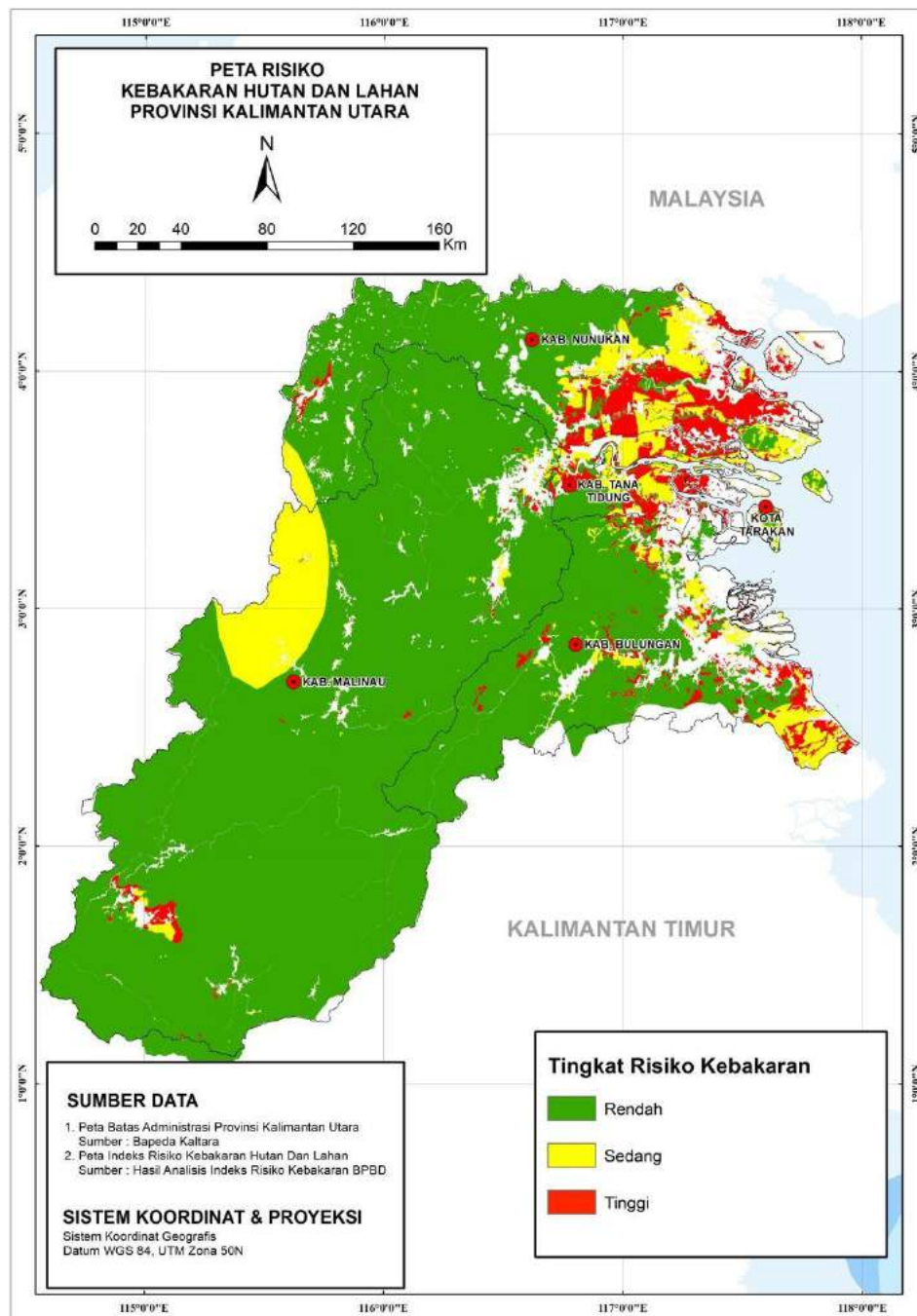
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) HoB untuk berkoordinasi di tingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur Wilayah HoB yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan.

2.4.3.1 Resiko Banjir

Berdasarkan peta resiko banjir Kalimantan utara, daerah Kabupaten Nunukan memiliki resiko banjir tertinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya.

2.4.3.2 Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan

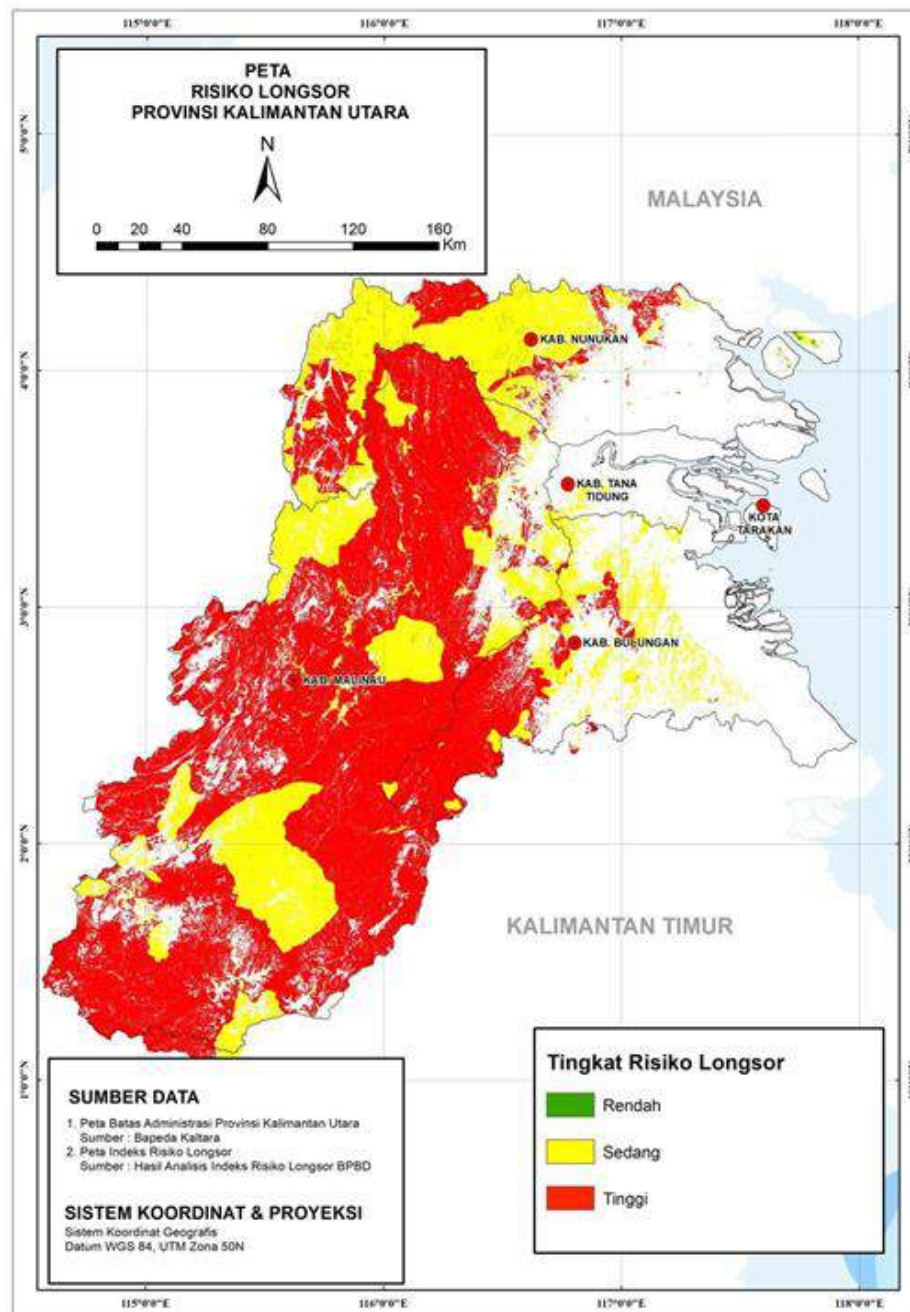
Berdasarkan peta resiko kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Utara, wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya



Gambar. 2.5 Peta resiko kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Utara

2.4.3.3. Resiko Longsor

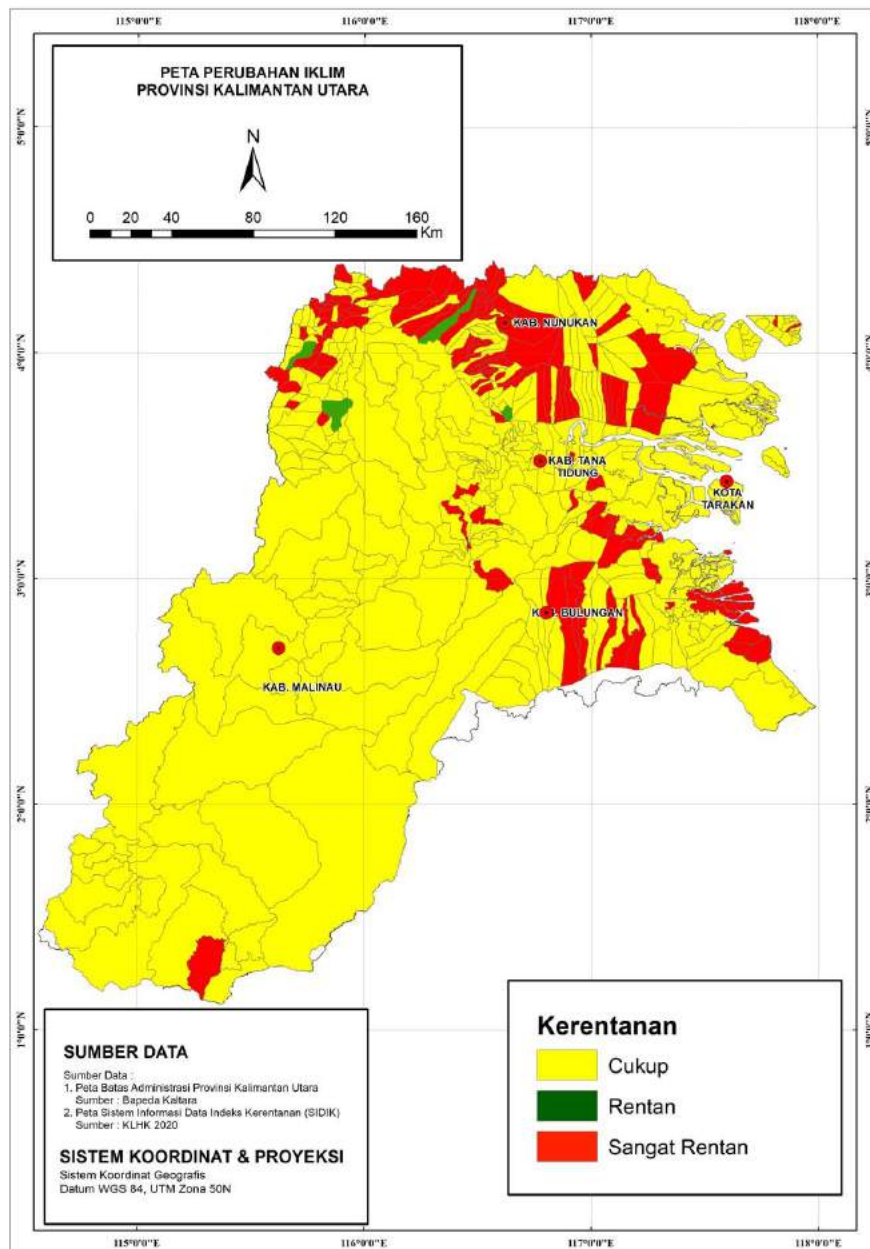
Berdasarkan peta resiko longsor Kalimantan Utara, wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan memiliki resiko longsor yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya.



Gambar. 2.6 Peta resiko longsor Provinsi Kalimantan Utara

2.4.3.4 Kajian Perubahan Iklim

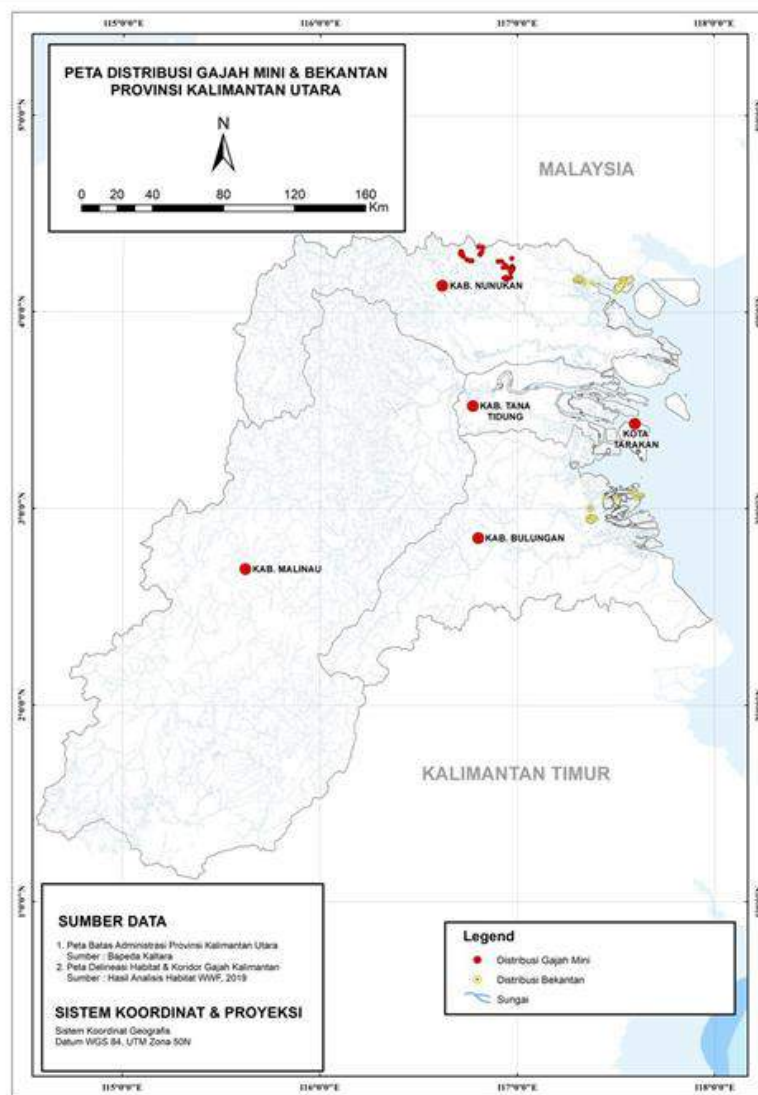
Berdasarkan peta perubahan iklim provinsi Kalimantan Utara, Sebagian besar wilayah memiliki kerentanan yang cukup dalam menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim yang sangat rentan terjadi pada sebagian besar dikawasan kabupaten Nunukan dan Bulungan.



Gambar 2.7 Peta Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Utara

2.4.3.5 Kajian Keanekaragaman Hayati

Provinsi Kalimantan Utara memiliki keanekaragaman hayati yang beragam. Beberapa hewan yang hidup dikawasan Kalimantan Utara dan menjadi icon daerah adalah gajah mini dan bekantan. Berdasarkan peta distribusi gajah mini dan bekantan provinsi Kalimantan Utara, kabupaten Nunukan merupakan kawasan sebaran gajah mini dan bekantan, sedangkan kabupaten Bulungan merupakan Kawasan sebaran bekantan.



Gambar 2.8 Peta Distribusi Gajah Mini dan Bekantan Provinsi Kalimantan Utara



Bedasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada kajian lingkungan hidup strategis pada bidang kehutanan adalah Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dengan target Pada tahun 2020 menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu hal ini menjadi tantangan kedepan dalam pencapaian target tersebut.



Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan Kehutanan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi. Setiap perumusan perencanaan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan ataudikedepankan dalam



perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pada tabel ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melakukan indentifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan kehutanan sebagaimana permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan kehutanan.

Perumusan isu-isu strategis kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini untuk pengelolaan hutan ke depan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan institusi kehutanan secara nasional dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sendiri. Pada table 3.1.1 dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan	Konflik tenurial lahan	<ul style="list-style-type: none">- Tumpang tindih perijinan dalam kawasan hutan- Perijinan berusaha dalam kawasan hutan kurang memperhatikan masyarakat yang berada dalam dan



			<p>sekitar kawasan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan kurang diperhatikan oleh pemegang ijin usaha. - Pemberian izin tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat - Okupasi kawasan hutan oleh masyarakat
		Belum Optimalnya pemanfaatan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pendampingan secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan hutan sesuai peraturan yang berlaku - Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur dan Masyarakat) yang masih Kurang. - Kurangnya data informasi potensi yang ada dalam kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan - Belum optimalnya pemberian sapsas peningkatan ekonomi produktif pada masyarakat. - Peraturan dan kebijakan yang kurang optimal dalam mengakomodir kesempatan berusaha bagi masyarakat - RPHJP yang belum disusun (7 Unit dari rencana 14 unit) - Rendahnya aksesibilitas jalan menuju kawasan pengelolaan hutan - Belum optimalnya pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hasil hutan
2	Deforestasi dan Degradasi Hutan	Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan baru dengan cara bakar - Sapsas penanggulangan karhutla belum memadai - Kurangnya pemahaman cara pencegahan dan penanggulangan karhutla



			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar berbagai stakeholder dengan korporasi dan masyarakat yang belum optimal
		Illegal logging	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang optimalnya pengawasan pada areal kawasan hutan - Keterbatasan SDM (Polisi Kehutanan) yang mempunyai kewenangan penindakan kasus illegal logging dan belum ada tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) - Kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang dalam pencegahan dan penanggulangan illegal logging
		Meningkatnya lahan kritis	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air. - Kurangnya pembinaan kepada pemegang izin yang punya kewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi khususnya pemegang IPPKH - Kurang optimalnya pengelolaan persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman - Kurangnya update data informasi lahan kritis dari instansi yang berwenang - Kurangnya koordinasi dengan para pihak terkait pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan - Kurangnya sarana prasarana dalam rangka kelola lingkungan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka



dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021–2026 sebagai berikut :

“BERUBAH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki , maka ditetapkan 14 (Empat Belas) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021–2026, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. **Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;**
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan



- ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
 8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Dari 14 Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 tersebut, urusan bidang kehutanan utamanya termasuk dalam misi ke 4 (empat), yaitu : Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan



Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam upaya mewujudkan misi ke Empat tersebut, maka dirumuskan dalam kebijakan peningkatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

Selain 14 misi tersebut diatas, terdapat juga 10 (sepuluh) Program Prioritas Daerah, sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan;**
2. Mewujudkan pembangunan KIPi;
- 3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota;**
4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota;
- 6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota;**
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan;



8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial;
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.
10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Indikasi rencana program untuk tahun 2021-2026 dijabarkan pada setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

a. NON URUSAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

b. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

1. Program Pengelolaan Hutan
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024, Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”



Adapun misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2. Sasaran Jangka Menengah KLHK

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Deforestasi yang meningkat	Kondisi hutan dan lahan sulit dijangkau	Adanya dukungan anggaran
2	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan			
3	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pengelolaan perhutanan social yang belum optimal	Masyarakat pemegang izin perhutanan sosial masih belum mampu memanfaatkan hutan	Dilakukan sosialisai di masyarakat secara rutin
4	Terselenggaranya Tata	Kurangnya jumlah	Kapasitas	



	Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	SDM yang ada	personil terbatas	
--	---	--------------	-------------------	--

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem essensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Tabel 3.3. Sasaran, Indikator dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/SATUAN
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks kualitas air/Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara/Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas air laut	Indeks kualitas air laut/Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Indeks kualitas lahan /Poin
	Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas ekosistem gambut/Poin
	Meningkatnya Indeks Ekosistem Gambut	Indeks kualitas ekosistem gambut/Poin
Terselenggaranya tata Kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehuatan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	SAKIP/Poin



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang

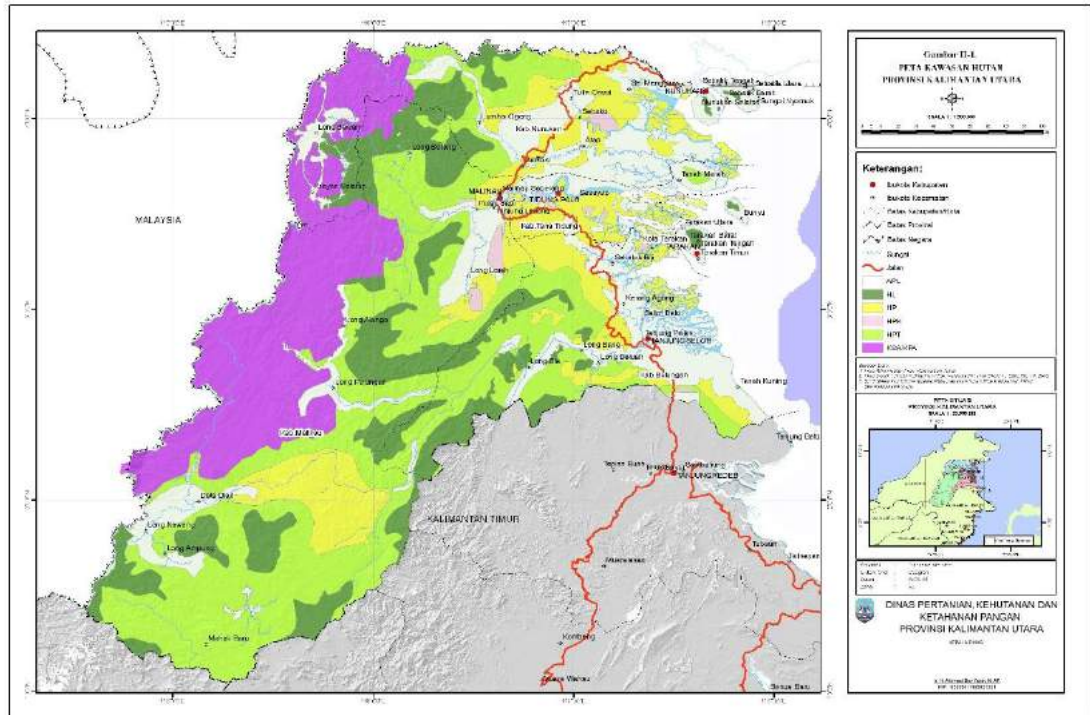
Telaahan Tata Ruang Wilayah masih mengacu laporan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Utara serta Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 dan SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014 dan SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara (KSA/KPA = Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; HL = Hutan Lindung; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HP = Hutan Produksi; HPK = Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi).

Kabupaten	KSA/KPA (ha)	HL (ha)	HPT (ha)	HP (ha)	HPK (ha)	Jumlah (ha)
BULUNGAN	0	206.717	426.369	256.655	5.586	895.327
TARAKAN	0	6.997	0	0	0	6.997
NUNUKAN	269.677	156.200	189.061	274.432	13.514	902.884
MALINAU	998.862	685.856	1.570.815	364.811	30.474	3.650.818
TANA TIDUNG	0	0	9.084	154.480	9.520	173.084
KALTARA	1.268.539	1.055.770	2.195.329	1.050.378	59.094	5.629.110
(%)	22,54	18,76	39,00	18,66	1,05	100

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 dan SK 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020



Gambar 3.1 Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas 1.276.186 Hektar, Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 2.279.415 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas 1.056.151 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 55.017 Ha.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebar di wilayah:

- (1). Kabupaten Malinau dengan luas paling kurang 92.710 hektar.
- (2). Kabupaten Nunukan dengan luas paling kurang 38.054 hektar.
- (3). Kabupaten Tana Tidung dengan luas paling kurang 7.539 hektar.
- (4). Kabupaten Bulungan dengan luas paling kurang 103.533 hektar.
- (5). Kota Tarakan dengan luas paling kurang 5.549 hektar.



- (1) Mewujudkan struktur dan pola ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis, serta isu-isu strategis terkait pengelolaan sumberdaya alam.
- (2) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat agro-industri dan pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia



3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

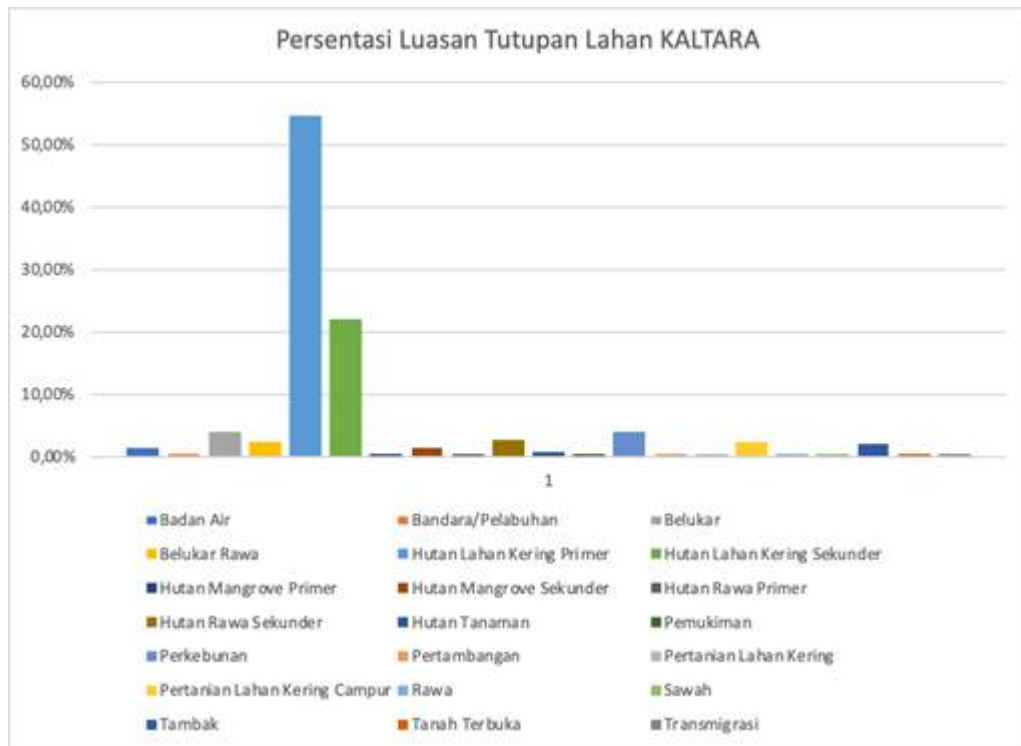
Sekitar 90,06% dari luasan total wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 6.440.254 Ha didominasi oleh hutan. Luasan pertanian tersebar sekitar 1,55% atau 110.751 Ha dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau. Kondisi geografis provinsi ini yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam, sebagian besar dimanfaatkan sebagai hutan lindung. Penggunaan lahan permukiman hanya 19.090 Ha atau 0,27% dari total luasan wilayah provinsi ini, dengan sebaran lahan permukiman paling tinggi berada di Kabupaten Nunukan. Dan hanya sebagian kecil penggunaan lahan untuk pertambangan yakni 8.879 Ha atau 0,12% dari total luasan wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.5 Tabel Tutupan Lahan

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Badan Air	97.057,22	1,39%
2	Bandara/Pelabuhan	284,0297	0,00%
3	Belukar	275.571,8	3,96%
4	Belukar Rawa	156.378,5	2,25%
5	Hutan Lahan Kering Primer	3.804.171	54,65%
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.539.013	22,11%
7	Hutan Mangrove Primer	26.534,86	0,38%
8	Hutan Mangrove Sekunder	97.411,65	1,40%
9	Hutan Rawa Primer	6.584,558	0,09%
10	Hutan Rawa Sekunder	181.809,5	2,61%
11	Hutan Tanaman	59.432,24	0,85%
12	Pemukiman	22.834,34	0,33%
13	Perkebunan	286.295,8	4,11%
14	Pertambangan	11.135,65	0,16%
15	Pertanian Lahan Kering	34.188,81	0,49%
16	Pertanian Lahan Kering Campur	168.413,5	2,42%
17	Rawa	1.001,915	0,01%
18	Sawah	4.073,779	0,06%
19	Tambak	151.537,1	2,18%
20	Tanah Terbuka	31.732,39	0,46%



21	Transmigrasi	4.977,061	0,07%
	TOTAL	6.960.439	100%



Gambar 3.3. Presentase Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara

Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Hutan negara ditetapkan pemerintah melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan tiga fungsi pokok tersebut sebagai Hutan Lindung (HL), Hutan Konservasi (HK) yang terbagi atas Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Hutan Produksi yang terbagi atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK).



Pemerintah menetapkan HL, HK, HP, dan HPT sebagai hutan tetap yang hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan kehutanan atau lewat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). HPK dan Area Penggunaan Lain (APL) dapat dicadangkan untuk kegiatan pemanfaatan lain, misalnya pertanian dan perkebunan yang kewenangan pelepasan kawasan ada di menteri untuk HPK dan bupati untuk APL. Hal tersebut terkait dengan rencana pengelolaan kawasan perbatasan, pengelolaan kawasan lindung, dan pengelolaan kawasan budidaya yang termasuk ke dalam ruang lingkup program-program kegiatan HOB atau Kawasan Jantung Borneo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 % dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara \pm 75.467,70 km². Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas baik ditinjau dari wilayah maupun kawasan hutannya (sekitar 48,38 %). Hutan Produksi Terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas di antara bentuk kawasan hutan lainnya yaitu sekitar 2.195.329 ha (sekitar 39 %).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan Jantung Kalimantan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui UU No. 26 Thn. 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Penataan Ruang ditujukan untuk menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) HoB untuk berkoordinasi di tingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur Wilayah HoB yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara

meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan.

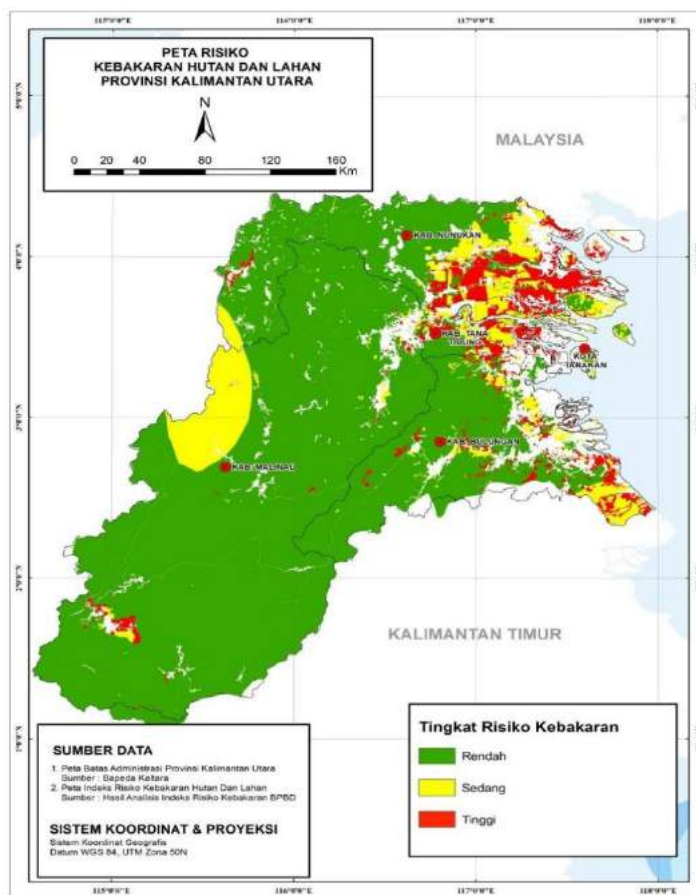
3.4.2.1 Resiko Banjir

Berdasarkan peta resiko banjir Kalimantan utara, daerah Kabupaten Nunukan memiliki resiko banjir tertinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya.

3.4.2.2 Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan peta resiko kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Utara, wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya.

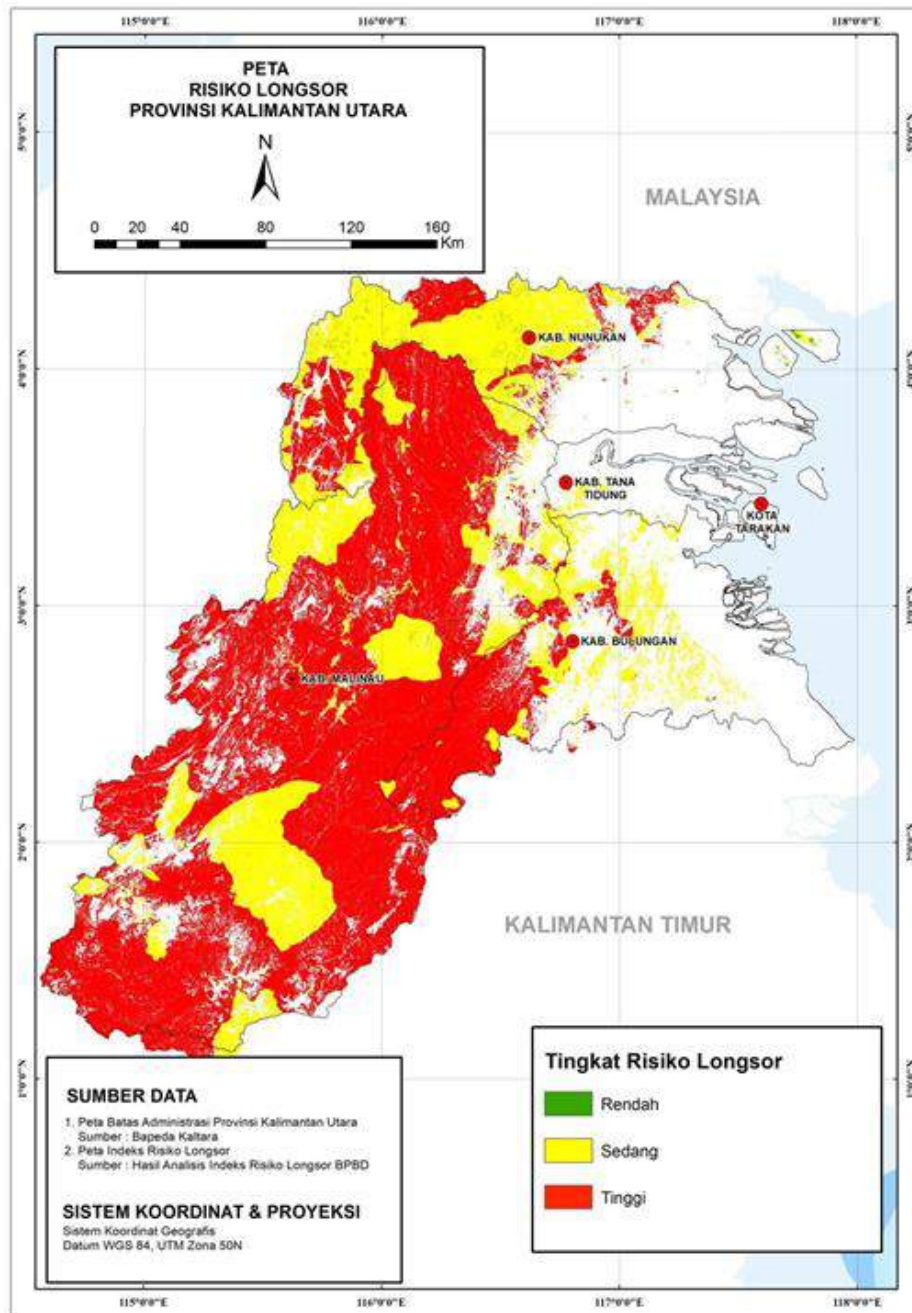
Gambar. 3.4. Peta resiko kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Utara



3.4.2.3. Resiko Longsor

Berdasarkan peta resiko longsor Kalimantan Utara, wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan memiliki resiko longsor yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya.

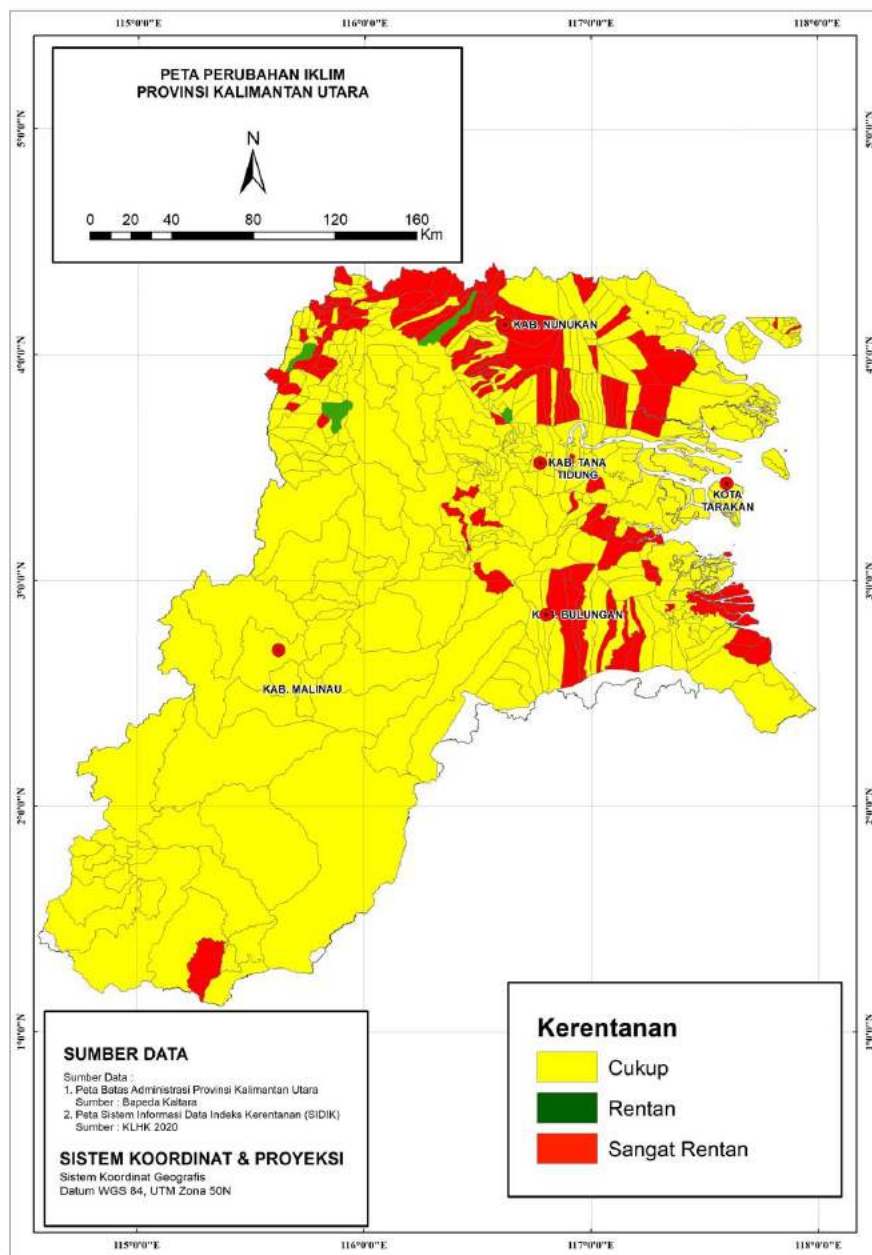
Gambar. 3.5. Peta resiko longsor Provinsi Kalimantan Utara



3.4.2.4 Kajian Perubahan Iklim

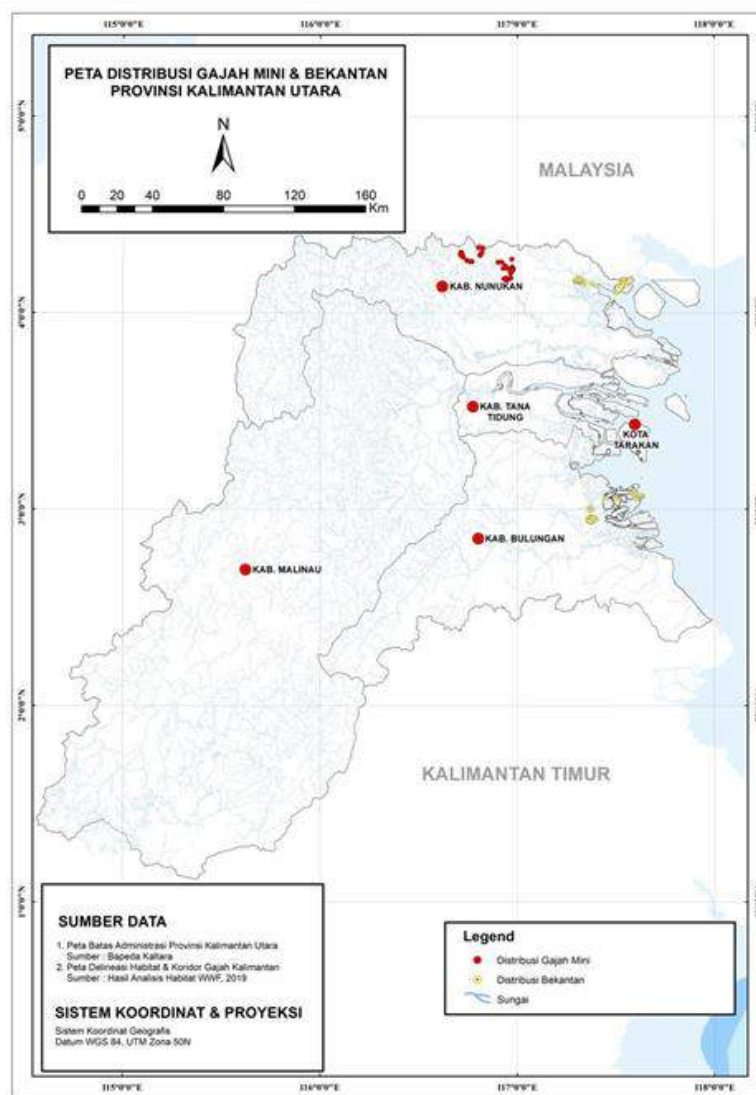
Berdasarkan peta perubahan iklim provinsi Kalimantan Utara, Sebagian besar wilayah memiliki kerentanan yang cukup dalam menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim yang sangat rentan terjadi pada sebagian besar dikawasan kabupaten Nunukan dan Bulungan.

Gambar 3.6. Peta Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Utara



3.4.2.5 Kajian Keanekaragaman Hayati

Provinsi Kalimantan Utara memiliki keanekaragaman hayati yang beragam. Beberapa hewan yang hidup dikawasan Kalimantan Utara dan menjadi icon daerah adalah gajah mini dan bekantan. Berdasarkan peta distribusi gajah mini dan bekantan provinsi Kalimantan Utara, kabupaten Nunukan merupakan kawasan sebaran gajah mini dan bekantan, sedangkan kabupaten Bulungan merupakan Kawasan sebaran bekantan.



Gambar 3.7. Peta Distribusi Gajah Mini dan Bekantan Provinsi Kalimantan Utara



Bedasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada kajian lingkungan hidup strategis pada bidang kehutanan adalah Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dengan target Pada tahun 2020 menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu hal ini menjadi tantangan kedepan dalam pencapaian target tersebut.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu –isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.



Isu strategis Dinas Kehutanan akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di sektor Kehutanan adalah :

3.5.1. Kecenderungan meningkatnya lahan kritis yang tidak disertai upaya rehabilitasi lahan yang memadai

Pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air akan mendatangkan lahan kurang produktif yang kondisinya akan terus menerus menurun sampai mencapai tingkat kritis. Peningkatan lahan kritis di kawasan yang berfungsi lindung meningkat dan bertambah status kekritisannya dari yang potensial kritis menjadi kritis yang disebabkan praktek konservasi tidak dilakukan sesuai kaidah yang seharusnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan luas lahan kritis ini juga disebabkan terjadinya tanah longsor selain dari erosi. Ketidakseimbangan reklamasi lahan-lahan rusak, baik oleh pihak perusahaan swasta ataupun pemerintah menjadi salah satu penyebab lahan kritis semakin meningkat. Erosi dan lahan kritis bukan masalah yang bersifat setempat namun merupakan masalah yang menyangkut DAS (Daerah Aliran Sungai) secara menyeluruh. Sinkronisasi data lahan kritis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk menentukan tindakan rehabilitasi dalam mengatasi masalah ini. Penyediaan data dan informasi tersebut sangat diperlukan terutama dalam menunjang formulasi strategi rehabilitasi lahan yang berdayaguna, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengalokasian sumberdaya secara proporsional.

3.5.2. Konflik Pemanfaatan Hutan

Semakin tinggi kepentingan atas lahan dan SDA maka potensi benturan kepentingan semakin tinggi. Potensi konflik yang mungkin terjadi antar sektor, antara kebutuhan pembangunan dan mempertahankan kawasan hutan, ataupun antara masyarakat dengan hutan. Dari segi kepentingan ekologi, satwa



liar membutuhkan habitat atau wilayah yang spesifik untuk tempat mencari makan dan berkembang biak. Satwa liar secara turun-temurun telah mendiami wilayah ekologi tersebut namun keberadaan sumber daya alam (SDA) ataupun kawasan itu sendiri menarik manusia untuk mengeksploitasinya. Dari segi ekonomi, eksploitasi sumberdaya hutan khususnya IUPHHK - HA tanpa memperhatikan kelestariannya telah berkontribusi pada laju kerusakan hutan. Peningkatan produksi kayu berasal dari konversi hutan alam menjadi hutan tanaman, dan lahan komersial lainnya termasuk perkebunan sawit dan pertambangan. Pemegang IUPHHK - HT dan yang mengantongi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) cenderung meningkatkan produksi kayu namun setelah habis akan segera dikembangkan sesuai peruntukannya. Dari segi sosial budaya adanya klaim masyarakat adat, pengusahaan skala besar, privatisasi lahan dan tanah, perubahan status dan fungsi kawasan hutan telah menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap manfaat hutan. Akses yang terbatas atau bahkan tertutup terhadap sumberdaya hutan akan menyebabkan semakin jauhnya tingkat kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

3.5.3 Degradasi Kawasan Lindung

Pengertiannya adalah kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Saat ini telah terjadi degradasi kawasan lindung sebesar 40%. Salah satu kawasan lindung yang mengalami degradasi adalah hutan lindung, Oleh karena itu untuk mengurangi terjadinya kerusakan tersebut maka perlunya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan lindung.

3.5.4. Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa masuknya air ke suatu daerah dan merendam daerah tersebut dalam waktu yang pendek atau lama yang disebabkan oleh hal



tertentu sehingga mengakibatkan dampak bagi populasi suatu daerah tersebut. Bencana alam yang terjadi dengan intensitas tinggi yang dirasakan dan terjadi menurut masyarakat adalah banjir dengan prioritas mencapai 43 %. Kejadian lain yang terkait kejadian banjir namun belum terlingkup adalah dampak lanjutan kerusakan hutan dan lahan dan intensitas hujan yang tinggi yaitu berupa tanah longsor.

3.5.5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kejadian bencana lain yang memiliki tingkat intensitas tinggi dan berdampak luas adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan baik yang disengaja dalam rangka pembukaan lahan ataupun terjadi secara alami dengan presentase 36%. Kebakaran hutan dan lahan terjadi biasanya disebabkan oleh musim kemarau yang panjang yang menyebabkan titik api (hot spot) aktif akibat panas dan adanya aktivitas manusia yang membuka lahan dengan cara membakar ketika musim kemarau, selain itu musim kemarau juga. Terjadinya kebakaran hutan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan serta penurunan terhadap kualitas lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.



Bab 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing – masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah bidang kehutanan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yaitu Meningkatnya pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera.



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal	Target awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera		Peningkatan Luas Tutupan Lahan Hutan	5.866.493 Ha	5.871.302 Ha	5.875.667 Ha	5.879.901 Ha	5.884.281 Ha	5.887.593 Ha	5.890.823 Ha
			Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	4.275,7 M	4.471,5 M	4.669,8 M	4.870,9 M	5.069,7 M	5.265,2 M	5.457,7 M
	1	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan social	19,66%	35 %	43 %	58 %	72 %	86 %	100 %
			Luas Lahan Kritis	150.281 Ha	145.472 Ha	141.107 Ha	136.873 Ha	132.493 Ha	129.181 Ha	125.951 Ha
			Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	0,9%	0,9%	0,9%	0,89%	0,89%	0,88%	0,88%
	2	Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu	Produksi Hasil Hutan Kayu	1.233.074 M3	1.356.381 M3	1.492.019 M3	1.641.220 M3	1.805.342 M3	1.985.876 M3	2.184.463 M3



Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor kehutanan maka Dinas Kehutanan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan provinsi. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kehutanan dalam arti luas.



Tabel. 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Visi: Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
Misi IV : Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan kawasan hutan yang mantap	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan pembinaan kepada pemegang izin usaha kehutanan - Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat dengan pemegang izin - Melakukan penataan batas sesuai kewenangannya - Melakukan koordinasi dalam rangka pemantapan Kawasan hutan - Melakukan survey biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat - Percepatan penyusunan dokumen RPHJP (7 unit dari 14 unit) - Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan ekspose penilaian dokumen RPHJP kepada para pihak dan tim penilai



		Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi dan pemberdayaan kepada masyarakat - Melakukan peningkatan SDM Aparatur dan Masyarakat. - Memberikan bantuan sarana prasarana peningkatan ekonomi produktif kepada KUPS - Mengembangkan perhutanan sosial berbasis hasil hutan non kayu - Melakukan Koordinasi kepada instansi terkait Peraturan dan kebijakan yang kurang implementatif
		Meningkatkan tata kelola perlindungan sumber daya kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat - Membentuk masyarakat peduli api - Peningkatan pemenuhan Saprass penanggulangan karhutla - Peningkatan kompetensi masyarakat peduli api dan pemegang izin - Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait penanggulangan kebakaran



			<p>hutan dan lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan patrol pengamanan hutan secara berkala - Melakukan Pendidikan dan Latihan dasar polhut dan PPNS - Melakukan koordinasi pihak berwajib terkait penanggulangan illegal logging - Melakukan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial
		Meningkatkan kualitas DAS dan produktivitas hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penghijauan, rehabilitasi, reklamasi, dan reboisasi serta pengelolaan DAS sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air. - Melakukan pembinaan kepada pemegang izin yang punya kewajiban melakukan rehabilitasi dan reklamasi khususnya pemegang IPPKH - Melakukan optimalisasi pengelolaan persemaian dalam rangka penyediaan bibit tanaman - Melakukan updating data lahan kritis di provinsi Kalimantan Utara - Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terkait pengelolaan DAS dan



			rehabilitasi hutan dan lahan - Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka kelola lingkungan
Meningkatnya pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu	Peningkatan ketersediaan bahan baku kayu bulat untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan	- Peningkatan penerbitan pertimbangan teknis untuk perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu skala kecil, menengah dan besar - Mewajibkan kepada pemegang perijinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk menyediakan 5 % produksi kayu bulat untuk pemenuhan industri kayu skala kecil dan menengah - Meningkatkan optimalisasi pemanenan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh pemegang berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui pengendalian dan pengawasan



Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknismemiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun kedepan (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD.

Program dan kegiatan pemerintah daerah pada Dinas Kehutanan merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara dan menuju amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2012. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang



merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan renstra. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan harus diturunkan lebih lanjut kedalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran renstra.

Program pembangunan sektor kehutanan merupakan kristalisasi kebijakan dari amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah kedepan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, integrasi dari program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya visi sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah dalam pengelolaan urusan pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, maka dirumuskan program-program prioritas sebagaimana terlihat pada data tabel berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	01																			
		3	28	01	1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Unit Kerja Yang Menerima Layanan Penunjang	100%	100%	26,799,000,000	100%	27,146,500,000	100%	28,503,825,000	100%	28,991,891,250	100%	30,441,092,063	100%	141,882,308,313		
		3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dok	5 Dok	550,000,000	5 Dok	550,000,000	5 Dok	577,500,000	5 Dok	606,375,000	5 Dok	636,300,000	25 Dok	2,920,175,000		
		3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	2 Dok	150,000,000	2 Dok	150,000,000	2 Dok	157,500,000	2 Dok	165,375,000	2 Dok	173,250,000	10 Dok	796,125,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikordinasikan penyusunannya	1 Dok	1 Dok	100,000,000	1 Dok	100,000,000	1 Dok	105,000,000	1 Dok	110,250,000	1 Dok	115,762,500	5 Dok	531,012,500	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang dikordinasikan penyusunannya	1 Dok	1 Dok	100,000,000	1 Dok	100,000,000	1 Dok	105,000,000	1 Dok	110,250,000	1 Dok	115,762,500	5 Dok	531,012,500	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	210,000,000	1 Dok	220,500,000	1 Dok	231,525,000	5 Dok	1,062,025,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	21,280,000,000	12 Bulan	21,500,000,000	12 Bulan	22,575,000,000	12 Bulan	23,703,750,000	12 Bulan	24,888,937,500	12 Bulan	113,947,687,500		
		3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	19,500,000,000	12 Bulan	19,700,000,000	12 Bulan	20,685,000,000	12 Bulan	21,719,250,000	12 Bulan	22,805,212,500	60 Bln	104,409,462,500	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,780,000,000	12 Bulan	1,890,000,000	12 Bulan	1,984,500,000	12 Bulan	2,083,725,000	12 Bulan	2,083,725,000	60 Bln	9,538,225,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	12 Bulan	1,050,000,000	12 Bulan	1,102,500,000	12 Bulan	1,157,625,000	60 Bulan	5,310,125,000		
		3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19 Org	75 Org	1,000,000,000	75 Org	1,000,000,000	75 Org	1,050,000,000	75 Org	1,102,500,000	75 Org	1,157,625,000	375 Org	5,310,125,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,437,000,000	12 Bulan	1,513,500,000	12 Bulan	1,589,175,000	12 Bulan	1,668,633,750	12 Bulan	1,752,065,438	60 Bulan	7,960,374,188		
		3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Unit	30 Unit	11,000,000	30 Unit	11,500,000	30 Unit	12,075,000	30 Unit	12,678,750	30 Unit	13,312,688	150 Unit	60,566,438	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	110 Unit	44Unit	200,000,000	44Unit	220,000,000	44Unit	231,000,000	44Unit	242,550,000	44Unit	254,677,500	220 Unit	1,148,227,500	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	157,500,000	12 Bulan	165,375,000	12 Bulan	173,643,750	60 Bulan	796,518,750	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	57,750,000	12 Bulan	60,637,500	12 Bulan	63,669,375	60 Bulan	287,056,875	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.06	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	26,000,000	12 Bulan	27,000,000	12 Bulan	28,350,000	12 Bulan	29,767,500	12 Bulan	31,255,875	60 Bulan	142,373,375	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Kali	100 Kali	1,000,000,000	100 Kali	1,050,000,000	100 Kali	1,102,500,000	100 Kali	1,157,625,000	100 Kali	1,215,506,250	500 Kali	5,525,631,250	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan	-	1 Unit	800,000,000	1 Unit	850,000,000	1 Unit	892,500,000	-	-	-	-	-	2,542,500,000		
		3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	-	1 Unit	800,000,000	1 Unit	850,000,000	1 Unit	892,500,000	-	-	-	-	1 Unit	2,542,500,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1,332,000,000	12 Bulan	1,333,000,000	12 Bulan	1,399,650,000	12 Bulan	1,469,632,500	12 Bulan	1,543,114,125	60 Bulan	7,077,396,625		
		3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	1.500 Surat	1.500 Surat	15,000,000	1.500 Surat	15,000,000	1.500 Surat	15,750,000	1.500 Surat	16,537,500	1.500 Surat	17,364,375	7.500 Surat	79,651,875	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	87,000,000	12 Bulan	88,000,000	12 Bulan	92,400,000	12 Bulan	97,020,000	12 Bulan	101,871,000	60 Bulan	466,291,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
		3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Unit	25 Unit	50,000,000	25 Unit	50,000,000	25 Unit	52,500,000	25 Unit	55,125,000	25 Unit	57,881,250	75 Unit	265,506,250	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1,180,000,000	12 Bulan	1,180,000,000	12 Bulan	1,239,000,000	12 Bulan	1,300,950,000	12 Bulan	1,365,997,500	60 Bulan	6,265,947,500	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	50 Unit	68 Unit	400,000,000	68 Unit	400,000,000	68 Unit	420,000,000	68 Unit	441,000,000	68 Unit	463,050,000	68 Unit	2,124,050,000				
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	48 Unit	150,000,000	48 Unit	150,000,000	48 Unit	157,500,000	48 Unit	165,375,000	48 Unit	173,643,750	240 Unit	796,518,750	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor		
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 Unit	20 Unit	250,000,000	20 Unit	250,000,000	20 Unit	262,500,000	20 Unit	275,625,000	20 Unit	289,406,250	100 Unit	1,327,531,250	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Tg. Selor		
		3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	6%	10%	31,650,000,000	10%	33,401,403,060	10%	35,467,375,784	10%	37,712,384,032	10%	39,608,022,373	50%	178,139,185,249			
		3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarannya	5 Unit	5 Unit	15,000,000,000	5 Unit	16,551,403,060	5 Unit	16,367,375,784	5 Unit	17,152,384,032	5 Unit	18,748,022,373	5 Unit	83,819,185,249		
		3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan	-	10 Unit	15,000,000,000	10 Unit	16,551,403,060	10 Unit	16,367,375,784	10 Unit	17,152,384,032	10 Unit	18,748,022,373	50 Unit	83,819,185,249		
		3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHP yang disahkan	6 Unit	1 Unit	700,000,000	1 Unit	750,000,000	1 Unit	1,500,000,000	1 Unit	1,500,000,000	1 Unit	1,500,000,000	5 Unit	5,950,000,000		
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPHP	7 Unit	2 Dok	Rp 700,000,000	3 Dok	750,000,000	3 Dok	1,500,000,000	3 Dok	1,500,000,000	3 Dok	1,500,000,000	14 Dok	5,950,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu		3	28	03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Unit Manajemen yang dibina	30%	30%	600,000,000	30%	600,000,000	30%	700,000,000	30%	710,000,000	30%	710,000,000	30%	3,320,000,000			
		3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen Informasi Usaha Kehutanan	1 Dok	1 Dok	250,000,000	1 Dok	250,000,000	1 Dok	300,000,000	1 Dok	300,000,000	1 Dok	300,000,000	5 Dok	1,400,000,000		
		3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Manajemen yang dibina	10 Unit	11 Unit	350,000,000	11 Unit	350,000,000	11 Unit	400,000,000	11 Unit	410,000,000	11 Unit	410,000,000	55 Dok	1,920,000,000		
		3	28	03	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun	Persentase Jumlah Izin Usaha yang terbina	70%	80%	550,000,000	80%	550,000,000	80%	550,000,000	80%	700,000,000	80%	700,000,000	80%	3,050,000,000			
		3	28	03	1.07	02	Pembiinan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M³/Tahun	Jumlah pemegang izin usaha yang dibina	17 Dok/Rek	10 Dok/Rek	250,000,000	10	250,000,000	10 Dok/Rek	250,000,000	10 Dok/Rek	300,000,000	10 Dok/Rek	300,000,000	50 Dok/Rek	1,350,000,000		
		3	28	03	1.07	03	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIUPHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 M³/Tahun melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Izin yang terbit	-	5 Izin	300,000,000	5	300,000,000	5 Izin	300,000,000	5 Izin	400,000,000	5 Izin	400,000,000	25 Izin	1,700,000,000		
Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat		3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	3%	2%	4,350,000,000	2%	4,400,000,000	2%	4,800,000,000	2%	5,400,000,000	2%	5,500,000,000	10%	24,750,000,000			
		3	28	03	1.04	01	Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTHL)	Jumlah dokumen RTHL	1 Dok	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	300,000,000	1 Dok	300,000,000	1 Dok	300,000,000	5 Dok	1,500,000,000		
		3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	-	50 Ha	750,000,000	50 Ha	750,000,000	50 Ha	800,000,000	50 Ha	900,000,000	50 Ha	900,000,000	250 ha	4,100,000,000		
		3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan	100 Ha	200 Ha	1,000,000,000	200 Ha	1,000,000,000	200 Ha	1,100,000,000	200 Ha	1,200,000,000	200 Ha	1,200,000,000	1000 ha	5,500,000,000		
		3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis	16 Unit	5 Unit	250,000,000	5 Unit	250,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	600,000,000	5 Unit	600,000,000	25Unit	2,000,000,000		
		3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	2 Unit	3 Unit	2,000,000,000	3 Unit	2,000,000,000	3 Unit	2,000,000,000	3 Unit	2,000,000,000	3 Unit	2,000,000,000	15 Unit	10,000,000,000		
		3	28	03	1.04	08	Pembiinan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah pemegang Ijin berusaha yang dibina/diawasi	10 Izin Usaha	30 Izin Usaha	200,000,000	30 Izin Usaha	250,000,000	30 Izin Usaha	300,000,000	30 Izin Usaha	400,000,000	30 Izin Usaha	500,000,000	150 Izin Usaha	1,650,000,000		
		3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Undung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	9%	10%	9,750,000,000	10%	9,850,000,000	10%	10,700,000,000	10%	11,300,000,000	10%	11,400,000,000	50%	53,000,000,000			
		3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	30 Kali	110 Kali	1,000,000,000	110 Kali	1,100,000,000	110 Kali	1,200,000,000	110 Kali	1,300,000,000	110 Kali	1,400,000,000	550 Kali	6,000,000,000		
		3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	7 Keg	8 Keg	8,750,000,000	8 Keg	8,750,000,000	8	9,500,000,000	8	10,000,000,000	8	10,000,000,000	40 Keg	47,000,000,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Provinsi Kaltara
		3	28	03	1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	-	10.000 Btg	700,000,000	20.000 Btg	700,000,000	20.000 Btg	850,000,000	20.000 Btg	950,000,000	20.000 Btg	1,050,000,000	90.000 Btg	4,250,000,000			
		3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah pengedar benih/bibit yang tersertifikasi	4 Penyedia	5 Penyedia	150,000,000	5 Penyedia	150,000,000	5 Penyedia	200,000,000	5 Penyedia	300,000,000	5 Penyedia	300,000,000	25 Penyedia	1,100,000,000		
		3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	10.000 Btg	10.000 Btg	250,000,000	10.000 Btg	250,000,000	10.000 Btg	300,000,000	10.000 Btg	300,000,000	10.000 Btg	400,000,000	50.000 Btg	1,500,000,000		
		3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah peredaran benih/bibit yang bersertifikat	1.000.000 Btg	1.000.000 Btg	300,000,000	1.000.000 Btg	300,000,000	1.000.000 Btg	350,000,000	1.000.000 Btg	350,000,000	1.000.000 Btg	350,000,000	5.000.000 Btg	1,650,000,000		
		3	28	04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kawasan yang dikelola	5%	10%	650,000,000	10%	750,000,000	10%	950,000,000	10%	950,000,000	10%	1,050,000,000	10%	4,350,000,000			
		3	28	04	1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Kawasan ekosistem penting yang dikelola / yang dijaga	1 Kawasan	1 Kawasan	650,000,000	1 Kawasan	750,000,000	1 Kawasan	950,000,000	1 Kawasan	950,000,000	1 Kawasan	1,050,000,000	1 Kawasan	4,350,000,000			
		3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah kawasan yang teridentifikasi/ yang disurvei	1 Kawasan	1 Kawasan	200,000,000	1 Kawasan	200,000,000	1 Kawasan	300,000,000	1 Kawasan	300,000,000	1 Kawasan	300,000,000	5 Kawasan	1,300,000,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Nunukanh, Tarakan
		3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 Org	50 Org	150,000,000	50 Org	200,000,000	50 Org	300,000,000	50 Org	300,000,000	50 Org	400,000,000	250 Org	1,350,000,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Bulungan, Tarakan
		3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah daerah penyangga yang dikelola	1 Lokasi	1 Lokasi	300,000,000	1 Lokasi	350,000,000	1 Lokasi	350,000,000	1 Lokasi	350,000,000	1 Lokasi	350,000,000	5 Lokasi	1,700,000,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	Malinau, KTT, Bulungan
		3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin PS yang diterbitkan	43 Izin	4 Izin	3,918,089,663	4 Izin	4,150,000,000	4 Izin	4,150,000,000	4 Izin	4,700,000,000	4 Izin	4,700,000,000	20 Izin	21,618,089,663			
		3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	-	20 KUPS	3,918,089,663	20 KUPS	4,150,000,000	20 KUPS	4,150,000,000	20 KUPS	4,700,000,000	20 KUPS	4,700,000,000	100 KUPS	21,618,089,663			
		3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Penyuluh	50 Penyuluh	500,000,000	50 Penyuluh	500,000,000	50 Penyuluh	500,000,000	50 Penyuluh	700,000,000	50 Penyuluh	700,000,000	250 Penyuluh	2,900,000,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	
		3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	11 KUPS	15 KUPS	2,568,089,663	15 KUPS	2,750,000,000	15 KUPS	2,750,000,000	15 KUPS	3,000,000,000	15 KUPS	3,000,000,000	75 KUPS	14,068,089,663	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	
		3	28	05	1.01	03	Penyapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah calon lokasi PS yang di fasilitasi	8 Unit	5 Unit	850,000,000	5 Unit	900,000,000	5 Unit	900,000,000	5 Unit	1,000,000,000	5 Unit	1,000,000,000	25 Unit	4,650,000,000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara	
		3	28	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS yang dipulihkan	100 Ha	200 Ha	3,100,000,000	250 Ha	2,600,000,000	100 Ha	2,600,000,000	100 Ha	2,600,000,000	100 Ha	3,000,000,000	750 Ha	13,900,000,000			
		3	28	06	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	-	1 DAS	3,100,000,000	1 DAS	2,600,000,000	1 DAS	2,600,000,000	1 DAS	2,600,000,000	1 DAS	3,000,000,000	5 DAS	13,900,000,000			
		3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen yang disusun	-	2 Dok	1,500,000,000	1 Dok	700,000,000	1 Dok	700,000,000	1 Dok	700,000,000	1 Dok	700,000,000	6 Dok	4,300,000,000	Dinas kehutanan Pemprov Kaltara	5 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	Target (17)	Rp (18)				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		3.	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang dibangun Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) nya	-	2 DAS	750,000,000	2 DAS	900,000,000	1 DAS	900,000,000	1 DAS	900,000,000	1 DAS	900,000,000	7 DAS	4,350,000,000	Dinas kehutanan Pemprov Kaltara	5 Kab/Kota		
		3.	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air	-	5 Unit	250,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	500,000,000	25 unit	1,650,000,000	Dinas kehutanan Pemprov Kaltara	5 Kab/Kota		
		3.	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan DAS yang dibina	-	5 Kelompok	250,000,000	5 Kelompok	300,000,000	5 Kelompok	300,000,000	5 Kelompok	300,000,000	5 Kelompok	500,000,000	25 kelompok	1,650,000,000	Dinas kehutanan Pemprov Kaltara	5 Kab/Kota		
		3.	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Forum DAS yang difasilitasi pembentukannya	1 Forum DAS	2 Forum DAS	150,000,000	2 Forum DAS	200,000,000	1 Forum DAS	200,000,000	1 Forum DAS	200,000,000	1 Forum DAS	200,000,000	7 Forum DAS	950,000,000	Dinas kehutanan Pemprov Kaltara	5 Kab/Kota		
		3.	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	-	10 Kali	200,000,000	10 Kali	200,000,000	10 Kali	200,000,000	10 Kali	200,000,000	10 Kali	200,000,000	50 kali	1,000,000,000	Dinas kehutanan Pemprov Kaltara	5 Kab/Kota		

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD KPH Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	21	
		3	28	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100%	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,500,000,000		
		3	28	01	1	02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	60 Bulan	700,000,000				
		3	28	01	1	02	02	Pemediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	60 Bulan	700,000,000	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	05		Administrasi Kepegawalan perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	60 Bulan	125,000,000				
		3	28	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	30 Stel	stel		stel		stel		stel		stel		stel	0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	3 Orang	25,000,000	3 Orang	25,000,000	3 Orang	25,000,000	3 Orang	25,000,000	3 Orang	25,000,000	15 Orang	125,000,000	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	130,000,000	12 Bulan	130,000,000	12 Bulan	130,000,000	12 Bulan	130,000,000	12 Bulan	130,000,000	60 Bulan	650,000,000				
		3	28	01	1	06	01	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Gedung Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Buah	buah		buah		buah		buah		buah		Buah	0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	06	02	Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Unit	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	06	04	Pemediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bulan Pemediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	06	05	Pemediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Pemediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		lembar	0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitas Kunjungan Tamu	-	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan	0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Kali	30 kali	130,000,000	30 kali	130,000,000	30 kali	130,000,000	30 kali	130,000,000	30 kali	130,000,000	150 Kali	650,000,000	UPTD KPH Nunukan	Nunukan		
		3	28	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	60 Bulan	0				

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	21
		3	28	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	500 Lembar	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar		Lembar		Lembar		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	01	1	08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	30 Unit	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	96 OB	OB		OB		OB		OB		OB		OB		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	25 Unit	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	240 Unit	25,000,000			
		3	28	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	-	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	5 Unit	25,000,000	UPTD KPH Nunukan	Nunukan	
		3	29	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 Unit	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		0	UPTD KPH Nunukan	Nunukan
		3	28	03				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	6%	10%	4,189,367,173	10%	4,343,832,245	10%	4,633,696,063	10%	4,896,342,023	10%	5,203,929,155	50%	23,267,166,659			
		3	28	03	1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	1 Unit	1 Unit	1,494,367,173	1 Unit	1,643,832,245	1 Unit	1,933,696,063	1 Unit	2,196,342,023	1 Unit	2,503,929,155	1 Unit	9,772,166,659			
		3	28	03	1	01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan	134 Unit	5 Unit	1,494,367,173	5 Unit	1,643,832,245	5 Unit	1,933,696,063	5 Unit	2,196,342,023	5 Unit	2,503,929,155	25 Unit	9,772,166,659	UPTD KPH Nunukan		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	21	
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	03	1	02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHUP yang disahkan	3 Unit	3 Unit	645,000,000	3 Unit	650,000,000	3 Unit	650,000,000	3 Unit	650,000,000	3 Unit	650,000,000	3 Unit	650,000,000	3 unit	3,245,000,000		
		3	28	03	1	02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPHUP	4 Dokumen	5 Dokumen	645,000,000	5 Dokumen	650,000,000	5 Dokumen	650,000,000	5 Dokumen	650,000,000	5 Dokumen	650,000,000	25 Dokumen	3,245,000,000	UPTD KPH Nunukan		
		3	28	03	1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luasutupan lahan	3%	2%	650,000,000	2%	650,000,000	2%	650,000,000	2%	650,000,000	2%	650,000,000	10%	3,250,000,000			
		3	28	03	1	04	05	Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan	Jumlah Bangunan KTA Hutan dan Lahan secara sipil teknis	-	5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000	25 Unit	2,500,000,000	UPTD KPH Nunukan	Pulau Nunukan dan Sebatik	
		3	28	03	1	04	06	Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Jumlah Unit Persemaian yang di bangun/dipelihara	-	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	150,000,000	5 Unit	750,000,000	UPTD KPH Nunukan	Pulau Nunukan	
		3	28	03	1	05		Pelaksanaan Pelindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	9%	10%	1,400,000,000	10%	1,400,000,000	10%	1,400,000,000	10%	1,400,000,000	10%	1,400,000,000	50%	7,000,000,000			
		3	28	03	1	05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	-	26 Kali	700,000,000	26 Kali	700,000,000	26 Kali	700,000,000	26 Kali	700,000,000	26 Kali	700,000,000	130 Kali	3,500,000,000	UPTD KPH Nunukan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Unit IV (Nunukan)	
		3	28	03	1	05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	700,000,000	3 Kegiatan	700,000,000	3 Kegiatan	700,000,000	3 Kegiatan	700,000,000	3 Kegiatan	700,000,000	15 Kegiatan	3,500,000,000	UPTD KPH Nunukan	Unit I (Krayan), Unit III (Lumbis), dan Unit IV (Nunukan)	
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	05			Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Ijin PS yang diterbitkan	-	1 Izin	800,000,000	1 Izin	800,000,000	1 Izin	800,000,000	1 Izin	800,000,000	1 Izin	800,000,000	1 Izin	800,000,000	5 Izin	4,000,000,000		
		3	28	05	1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	-	1 Kups	800,000,000	1 Kups	800,000,000	1 Kups	800,000,000	1 Kups	800,000,000	1 Kups	800,000,000	1 Kups	4,000,000,000			
		3	28	05	1	01	01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	-	6 Penyuluh	150,000,000	6 Penyuluh	150,000,000	6 Penyuluh	150,000,000	6 Penyuluh	150,000,000	6 Penyuluh	150,000,000	30 Penyuluh	750,000,000	UPTD KPH Nunukan	Nunukan	
		3	28	05	1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	15 Kelompok	15 Kelompok	150,000,000	15 Kelompok	150,000,000	15 Kelompok	150,000,000	15 Kelompok	150,000,000	15 Kelompok	150,000,000	75 Kelompok	750,000,000	UPTD KPH Nunukan	Nunukan, Sebatik, Sembakung, Seimenggaris, Sebuku, Tulin Onsoi,	
		3	28	05	1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah calon lokasi PS yang di fasilitasi	4 Unit	4 unit	500,000,000	4 unit	500,000,000	4 unit	500,000,000	4 unit	500,000,000	4 unit	500,000,000	20 Unit	2,500,000,000	UPTD KPH Nunukan	Nunukan, Sebatik Barat, Seimenggaris, Sembakung, Tulin Onsoi	

Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPTD KPH Malinau Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
		3	28	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100%	100%	604,100,000	100%	604,100,000	100%	604,100,000	100%	524,500,000	100%	524,500,000	100%	2,861,300,000		
		3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	60 Bulan	500,000,000				
		3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	60 Bulan	500,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	79,600,000	12 Bulan	79,600,000	12 Bulan	79,600,000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	60 Bulan	238,800,000		
		3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	-	37 Stel	29,600,000	37 Stel	29,600,000	37 Stel	29,600,000	-	-	-	111 Stel	88,800,000	UPTD KPH Malinau	Malinau
		3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	2 Orang	2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	-	-	-	6 Orang	150,000,000	UPTD KPH Malinau	Luar dan Dalam Prov. Kaltara
		3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	151,000,000	12 Bulan	151,000,000	12 Bulan	151,000,000	12 Bulan	151,000,000	60 Bulan	755,000,000				
		3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	10 Unit	6,000,000	10 Unit	6,000,000	10 Unit	6,000,000	10 Unit	6,000,000	50 Unit	30,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	5 Unit	50,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	60 Bulan	100,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	60 Bulan	50,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	60 Bulan	25,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	80 Kali	100,000,000	80 Kali	100,000,000	80 Kali	100,000,000	80 Kali	100,000,000	400 Kali	500,000,000	UPTD KPH Malinau	Luar dan Dalam Prov. Kaltara	
		3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	198,500,000	12 Bulan	198,500,000	12 Bulan	198,500,000	12 Bulan	198,500,000	60 Bulan	992,500,000				
		3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	500 Surat	500 Surat	8,500,000	500 Surat	8,500,000	500 Surat	8,500,000	500 Surat	8,500,000	2.500 Surat	42,500,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	60 Bulan	200,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Unit	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	5 Unit	10,000,000	25 Unit	50,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	140,000,000	60 Bulan	700,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa pemeliharannya	4 Unit	3 Unit	75,000,000	3 Unit	75,000,000	3 Unit	75,000,000	3 Unit	75,000,000	15 Unit	375,000,000				
		3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	10 Unit	125,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	
		3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	5 Unit	250,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	03		Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	6%	10%	4,285,267,173	10%	4,439,732,245	10%	4,729,596,063	10%	4,921,842,023	10%	5,079,429,155	50%	23,455,866,659			
		3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarannya	1 Unit	1 Unit	1,235,267,173	1 Unit	1,319,332,245	1 Unit	1,349,596,063	1 Unit	1,421,842,023	1 Unit	1,479,429,155	5 Unit	6,805,466,659			
		3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana dan prasarana yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1,235,267,173	1 Unit	1,319,332,245	1 Unit	1,349,596,063	1 Unit	1,421,842,023	1 Unit	1,479,429,155	5 Unit	6,805,466,659	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau
		3	28	03	1.02	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	-	1 Unit	450,000,000	2 Unit	450,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	7 Unit	2,400,000,000			
		3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit RPHJP	-	1 Dok	450,000,000	1 Dok	450,000,000	1 Dok	500,000,000	1 Dok	500,000,000	1 Dok	500,000,000	5 Dok	2,400,000,000	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau
Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu	3	28	03	1.03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Unit Manajemen yang di bina	-	30%	50,000,000	30%	50,000,000	30%	70,000,000	30%	100,000,000	30%	100,000,000	30%	370,000,000				
	3	28	03	1.03	09	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasling	Terciptanya market HHK, HHBK dan Jasling secara komersial & lestari	-	1 Keg	50,000,000	1 Keg	50,000,000	1 Keg	70,000,000	1 Keg	100,000,000	1 Keg	100,000,000	5 Keg	370,000,000	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau	
Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	-	2%	150,000,000	2%	150,000,000	2%	210,000,000	2%	300,000,000	2%	300,000,000	10%	1,110,000,000			
		3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RtRtRL)	Jumlah Unit Perencanaan yang disusun	-	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	70,000,000	1 Dok	100,000,000	1 Dok	100,000,000	5 Dok	370,000,000	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau
		3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang ditanam	-	5 Ha	50,000,000	5 Ha	50,000,000	5 Ha	70,000,000	5 Ha	100,000,000	5 Ha	100,000,000	25 Ha	370,000,000	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau
		3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan	-	5 Ha	50,000,000	5 Ha	50,000,000	5 Ha	70,000,000	5 Ha	100,000,000	5 Ha	100,000,000	25 Ha	370,000,000	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau
		3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	9%	10%	2,400,000,000	10%	2,470,400,000	10%	2,600,000,000	10%	2,600,000,000	10%	2,700,000,000	50%	12,770,400,000			
		3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Berkurangnya kerusakan hutan akibat perambahan perambahan	-	1 Keg	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	400,000,000	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau	
		3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	40 Kali	-	-	80 Kali	400,000,000	80 Kali	500,000,000	80 Kali	500,000,000	80 Kali	500,000,000	400 Kali	1,900,000,000		
		3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	4 Keg	4 Keg	2,000,000,000	4 Keg	2,070,400,000	4 Keg	2,100,000,000	4 Keg	2,100,000,000	4 Keg	2,200,000,000	20 Keg	10,470,400,000	UPTD KPH Malinau	Kab. Malinau
		3	28	05		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Ijin PS yang diterbitkan	-	9 Izin	400,000,000	9 Izn	400,000,000	9 Izin	400,000,000	9 Izin	550,000,000	9 Izin	700,000,000	45 Izin	2,450,000,000			
		3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	-	30 KUPS	400,000,000	30 KUPS	400,000,000	30 KUPS	400,000,000	30 KUPS	550,000,000	30 KUPS	700,000,000	150 KUPS	2,450,000,000			
		3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	-	5 Penyuluh	200,000,000	5 Penyuluh	200,000,000	5 Penyuluh	200,000,000	5 Penyuluh	250,000,000	5 Penyuluh	300,000,000	25 Penyuluh	1,150,000,000	UPTD KPH Malinau	Luar Prov. Kaltara
		3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	-	2 KUPS	100,000,000	2 KUPS	100,000,000	2 KUPS	100,000,000	2 KUPS	150,000,000	2 KUPS	200,000,000	10 KUPS	650,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau
		3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah calon lokasi PS yang di fasilitasi	-	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	150,000,000	2 Unit	200,000,000	10 Unit	650,000,000	UPTD KPH Malinau	Malinau

Tabel 6.4. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD KPH Tana Tidung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
		3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													28,767,166,659				
		3	28	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	100%	644,367,173	100%	798,832,245	100%	838,696,063	100%	851,342,023	100%	808,929,155	100%	3,942,166,659			
		3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	81,000,000	12 Bulan	134,000,000	12 Bulan	134,000,000	12 Bulan	134,000,000	12 Bulan	134,000,000	60 bulan	617,000,000			
		3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan administrasi pelaksanaan ASN	12 Bulan	12 Bulan	81,000,000	12 Bulan	134,000,000	12 Bulan	134,000,000	12 Bulan	134,000,000	12 Bulan	134,000,000	60 bulan	617,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.05		Administراسي Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	0	12 Bulan	37,000,000	12 Bulan	2,000,000	60 bulan	124,000,000		
		4	29	02	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34 Pcs	35 Pcs	35,000,000	0 Stell	-	0 Stell	-	35 Stell	35,000,000	-	-	35 Stell		UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	0 Orang	-	5 Orang	50,000,000	0 Orang	-	1 Orang	2,000,000	1 Orang	2,000,000	2 Orang	54,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	27,367,173	12 Bulan	112,832,245	12 Bulan	117,696,063	12 Bulan	92,342,023	12 Bulan	85,929,155	60 Bulan	436,166,659		
		3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34 Unit	0 Unit	-	5 Unit	500,000	0 Unit	-	5 Unit	500,000	0 Unit	-	10 Unit		UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5.788 Unit	5 Unit	4,867,173	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	25 Unit	24,867,173	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		4	29	02	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga	21 Unit	1 Unit	500,000	0 Unit	-	1 Unit	500,000	0 Unit	-	1 Unit	500,000	3 Unit	1,500,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah unit penyediaan bahan logistik kantor	447 Pcs	40 Pcs	5,000,000	40 Pcs	5,000,000	40 Pcs	5,000,000	40 Pcs	5,000,000	40 Pcs	5,000,000	200 Pcs	25,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan Penggandaan	10.506 Lembar	200 Lembar	2,000,000	200 Lembar	2,000,000	300 Lembar	3,000,000	500 Lembar	5,000,000	500 Lembar	5,000,000	1700 Lembar	17,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	0 Pcs	10 Pcs	5,000,000	10 Pcs	5,000,000	10 Pcs	5,000,000	10 Pcs	5,000,000	20 Pcs	10,000,000	60 Pcs	30,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	118 Kali	5 Kali	10,000,000	40 Kali	95,332,245	40 Kali	99,196,063	30 Kali	71,842,023	20 Kali	60,429,155	135 Kali	336,799,486	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1,000,000	0 Unit	0	1 Unit	1,000,000	0 Unit	0	2 Unit	2,000,000		
		3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mabel	Jumlah unit pengadaan Mabel	3 Unit	0 Unit	-	1 Unit	1,000,000	0 Unit	-	1 Unit	1,000,000	0 Unit	-	2 Unit	2,000,000		
		3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	277,000,000	12 Bulan	277,000,000	12 Bulan	317,000,000	12 Bulan	317,000,000	12 Bulan	317,000,000	60 Bulan	1,505,000,000		
		3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa surat menyurat yang disediakan	385 Lembar	20 Lembar	2,000,000	20 Lembar	2,000,000	20 Lembar	2,000,000	20 Lembar	2,000,000	20 Lembar	2,000,000	100 Lembar	10,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	60,000,000	60 Bulan	290,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Unit	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	3 Unit	5,000,000	15 Unit	25,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
		3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 OB	72 OB	215,000,000	72 OB	215,000,000	72 OB	250,000,000	72 OB	250,000,000	72 OB	250,000,000	360 OB	1,180,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera		3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang terpelihara	23 Unit	24 Unit	224,000,000	24 Unit	224,000,000	24 Unit	270,000,000	24 Unit	270,000,000	24 Unit	270,000,000	24 Unit	1,258,000,000			
		3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	22 Unit	23 Unit	124,000,000	23 Unit	124,000,000	23 Unit	170,000,000	23 Unit	170,000,000	23 Unit	170,000,000	23 Unit	758,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
		3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya dilakukan Pemeliharaan/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	500,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung	
		Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	6%	10%	3,750,000,000	10%	3,750,000,000	10%	3,950,000,000	10%	4,150,000,000	10%	4,450,000,000	50%	20,050,000,000		
			3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang diadakan sarana dan prasarananya	20%	2 Unit	1,300,000,000	2 Unit	1,300,000,000	2 Unit	1,400,000,000	2 Unit	1,500,000,000	2 Unit	1,600,000,000	10 Unit	7,100,000,000		
			3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional KPH	Jumlah unit Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional	2 unit	2 Unit	1,300,000,000	2 Unit	1,300,000,000	2 Unit	1,400,000,000	2 Unit	1,500,000,000	2 Unit	1,600,000,000	10 Unit	7,100,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
			3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luas tutupan lahan	2%	2%	1,500,000,000	2%	1,500,000,000	2%	1,500,000,000	2%	1,500,000,000	2%	1,600,000,000	2%	7,600,000,000		
			3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bulan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	96 OB	108 OB	1,500,000,000	108 OB	1,500,000,000	108 OB	1,500,000,000	108 OB	1,500,000,000	108 OB	1,600,000,000	540 OH	7,600,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
			3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	9%	10%	700,000,000	10%	700,000,000	10%	800,000,000	10%	900,000,000	10%	1,000,000,000		4,100,000,000		
			3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Pengendalian Kerusakan Hutan	24 Kali	24 Kali	350,000,000	24 Kali	350,000,000	24 Kali	400,000,000	24 Kali	450,000,000	24 Kali	500,000,000	120 Kali	2,050,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
			3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	24 Kali	24 Kali	350,000,000	24 Kali	350,000,000	24 Kali	400,000,000	24 Kali	450,000,000	24 Kali	500,000,000	120 Kali	2,050,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
			3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	10.000 Btg	10.0000 Btg	250,000,000	10.0000 Btg	250,000,000	10.0000 Btg	250,000,000	10.0000 Btg	250,000,000	10.0000 Btg	250,000,000	10.0000 Btg	1,250,000,000		
			3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	56000 Batang	100,000 Btng	250,000,000	100,000 Btng	250,000,000	100,000 Btng	250,000,000	100,000 Btng	250,000,000	100,000 Btng	250,000,000	500,000 Btng	1,250,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
			3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN dan PELATIHAN, PENYULUHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin PS yang diterbitkan (58 Unit Tahun 2020)	10 Ijin	10 Ijin	895,000,000	10 Ijin	895,000,000	10 Ijin	945,000,000	10 Ijin	995,000,000	10 Ijin	1,045,000,000	10 Ijin	4,775,000,000		
			3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	895,000,000	2 Kegiatan	895,000,000	2 Kegiatan	945,000,000	2 Kegiatan	995,000,000	2 Kegiatan	1,045,000,000	2 Kegiatan	4,775,000,000		
			3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	0	10 Orang	300,000,000	10 Orang	300,000,000	10 Orang	300,000,000	10 Orang	300,000,000	10 Orang	300,000,000	50 Orang	1,500,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
			3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok unit usaha yang dikembangkan	0	16 KUPS	345,000,000	16 KUPS	345,000,000	16 KUPS	395,000,000	16 KUPS	445,000,000	16 KUPS	495,000,000	80 KUPS	2,025,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kegiatan penyiapan lokasi Perhutanan Sosial	2 Kegiatan	4 Kelompok	250,000,000	4 Kelompok	250,000,000	4 Kelompok	250,000,000	4 Kelompok	250,000,000	4 Kelompok	250,000,000	20 Kelompok	1,250,000,000	UPTD KPH Tana Tidung	Tana Tidung			

Tabel 6.5 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD KPH Tarakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
									Rp 5,289,367,173.00		Rp 5,443,832,245.00		Rp 5,733,696,063.00		Rp 5,996,342,023.00		Rp 6,303,929,155.00		Rp 28,767,166,659.00				
		3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100%	100%	Rp 300,000,000.00	100%	Rp 350,000,000.00	100%	Rp 410,000,000.00	100%	Rp 681,000,000.00	100%	Rp 900,000,000.00	100%			Rp 2,641,000,000.00	
		3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Rp 250,000,000.00	12 Bulan	Rp 250,000,000.00	12 Bulan	Rp 300,000,000.00	12 Bulan	Rp 300,000,000.00	12 Bulan	Rp 300,000,000.00	60 Bulan			Rp 1,400,000,000.00	
		3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Rp 250,000,000.00	12 Bulan	Rp 250,000,000.00	12 Bulan	Rp 300,000,000.00	12 Bulan	Rp 300,000,000.00	12 Bulan	Rp 300,000,000.00			60 Bulan	Rp 1,400,000,000.00
		3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	60 Bulan			Rp 200,000,000.00	
		3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang	0 Orang	Rp -	5 Orang	Rp 50,000,000.00	5 Orang	Rp 50,000,000.00	10 Orang	Rp 50,000,000.00	10 Orang	Rp 50,000,000.00			30 Orang	Rp 200,000,000.00
		3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 60,000,000.00	12 Bulan	Rp 165,000,000.00	12 Bulan	Rp 177,000,000.00	60 Bulan			Rp 502,000,000.00	
		3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	232 buah	15 buah/unit	Rp -	15 buah/unit	Rp -	15 buah/unit	Rp -	20 buah/unit	Rp 5,000,000.00	20 buah/unit	Rp 5,000,000.00			250 buah/unit	Rp 10,000,000.00
		3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Unit	10 Unit	Rp -	10 Unit	Rp -	20 Unit	Rp -	20 Unit	Rp 40,000,000.00	20 Unit	Rp 50,000,000.00			80 Unit	Rp 90,000,000.00
		3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 5,000,000.00	12 Bulan	Rp 5,000,000.00			60 Bulan	Rp 10,000,000.00
		3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 2,000,000.00	12 Bulan	Rp 3,000,000.00			60 Bulan	Rp 5,000,000.00
		3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 eksemplar	365 eksemplar	Rp -	365 eksemplar	Rp -	365 eksemplar	Rp -	365 eksemplar	Rp 3,000,000.00	365 eksemplar	Rp 4,000,000.00			1825 Eksemplar	Rp 7,000,000.00
		3	28	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 10,000,000.00	12 Bulan	Rp 10,000,000.00	12 Bulan	Rp 10,000,000.00			60 Bulan	Rp 30,000,000.00
		3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 50,000,000.00	12 Bulan	Rp 100,000,000.00	12 Bulan	Rp 100,000,000.00			60 Bulan	Rp 350,000,000.00
		3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 166,000,000.00	12 Bulan	Rp 173,000,000.00	60 Bulan			Rp 339,000,000.00	
		3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 6,000,000.00	12 Bulan	Rp 8,000,000.00			60 Bulan	Rp 14,000,000.00
		3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 60,000,000.00	12 Bulan	Rp 60,000,000.00			60 Bulan	Rp 120,000,000.00
		3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 5,000,000.00	12 Bulan	Rp 5,000,000.00			60 Bulan	Rp 10,000,000.00
		3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp -	12 Bulan	Rp 95,000,000.00	12 Bulan	Rp 100,000,000.00			60 Bulan	Rp 195,000,000.00
		3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	17 Unit	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	20 Unit	Rp 200,000,000.00	105 Unit			Rp 200,000,000.00	
		3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	16 Unit	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	20 Unit	Rp 50,000,000.00			100 Unit	Rp 50,000,000.00
		3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	1 Unit	Rp 150,000,000.00			1 Unit	Rp 150,000,000.00
		3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -			0 Unit	Rp -
		3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	0 Paket	0 Paket	Rp -	0 Paket	Rp -	0 Paket	Rp -	0 Paket	Rp -	0 Paket	Rp -			0 Paket	Rp -

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	50%	10%	Rp 4,289,367,173.00	10%	Rp 4,393,832,245.00	10%	Rp 4,423,696,063.00	10%	Rp 4,415,342,023.00	10%	Rp 4,453,929,155.00	10%	Rp 21,976,166,659.00			
		3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJP yang disahkan	1 Unit	2 Unit	Rp 1,939,367,173.00	2 Unit	Rp 2,043,832,245.00	2 Unit	Rp 2,073,696,063.00	2 Unit	Rp 2,065,342,023.00	2 Unit	Rp 2,053,929,155.00	2 Unit	Rp 10,176,166,659.00			
		3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kegiatan Tata Hutan dan RPHJP	0 Dokumen	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 100,000,000.00	2 Dokumen	Rp 100,000,000.00	2 Dokumen	Rp 100,000,000.00	2 Dokumen	Rp 400,000,000.00		
		3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah panjang batas yang diukur	0 Km	10 Km	Rp 200,000,000.00	10 Km	Rp 200,000,000.00	10 Km	Rp 200,000,000.00	10 Km	Rp 200,000,000.00	10 Km	Rp 200,000,000.00	50 Km	Rp 1,000,000,000.00		
		3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasional	33 Unit	30 Unit	Rp 1,689,367,173.00	30 Unit	Rp 1,793,832,245.00	30 Unit	Rp 1,773,696,063.00	30 Unit	Rp 1,765,342,023.00	30 Unit	Rp 1,753,929,155.00	150 Unit	Rp 8,776,166,659.00		
		3	28	03	1		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Unit KPH yang telah memiliki RPHJPd yang disahkan	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 100,000,000.00	2 Dokumen	Rp 500,000,000.00		
		3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPHJPd yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 50,000,000.00	2 Dokumen	Rp 100,000,000.00	10 Dokumen	Rp 500,000,000.00		
		3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah unit manajemen yang dibina	10%	20%	Rp 50,000,000.00	20%	Rp 50,000,000.00	20%	Rp 50,000,000.00	20%	Rp 50,000,000.00	20%	Rp 100,000,000.00	100%	Rp 300,000,000.00		
		3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Jumlah Peluang Promosi KPH	0 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 50,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 50,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 50,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 50,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 100,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 300,000,000.00		
		3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase penambahan Luasutupan lahan	0,4%	2%	Rp 600,000,000.00	2%	Rp 600,000,000.00	2%	Rp 600,000,000.00	2%	Rp 600,000,000.00	2%	Rp 600,000,000.00	10%	Rp 3,000,000,000.00		
		3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Persemaian Permanen yang dibangun/dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rp 500,000,000.00	1 Unit	Rp 500,000,000.00	1 Unit	Rp 500,000,000.00	1 Unit	Rp 500,000,000.00	1 Unit	Rp 500,000,000.00	1 Unit	Rp 2,500,000,000.00		
		3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Luasan Lahan yang Direhabilitasi	6 Hektar	6 Hektar	Rp 100,000,000.00	6 Hektar	Rp 100,000,000.00	10 Hektar	Rp 100,000,000.00	10 Hektar	Rp 100,000,000.00	10 Hektar	Rp 100,000,000.00	42 Hektar	Rp 500,000,000.00		
		3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas lahan yang dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan	100 Ha	100 Ha	Rp 1,700,000,000.00	100 Ha	Rp 1,700,000,000.00	100 Ha	Rp 1,700,000,000.00	100 Ha	Rp 1,700,000,000.00	100 Ha	Rp 1,700,000,000.00	500 Ha	Rp 8,500,000,000.00		
		3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Kegiatan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan	24 Kali	36 Kali	Rp 500,000,000.00	36 Kali	Rp 500,000,000.00	36 Kali	Rp 500,000,000.00	36 Kali	Rp 500,000,000.00	36 Kali	Rp 500,000,000.00	180 Kali	Rp 2,500,000,000.00		
		3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 200,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 200,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 200,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 200,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 200,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 1,000,000,000.00		
		3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 1,000,000,000.00	5 Kegiatan	Rp 1,000,000,000.00	5 Kegiatan	Rp 1,000,000,000.00	5 Kegiatan	Rp 1,000,000,000.00	5 Kegiatan	Rp 1,000,000,000.00	5 Kegiatan	Rp 5,000,000,000.00		
		3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan (7 Unit s/d Desember 2020)	7 Izin	9 Izin	Rp 700,000,000.00	10 Izin	Rp 700,000,000.00	10 Izin	Rp 900,000,000.00	11 Izin	Rp 900,000,000.00	11 Izin	Rp 950,000,000.00	51 Izin	Rp 4,150,000,000.00		
		3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang Meningkat Kelasnya	0 KUPS	2 KUPS	Rp 700,000,000.00	2 KUPS	Rp 700,000,000.00	2 KUPS	Rp 900,000,000.00	2 KUPS	Rp 900,000,000.00	2 KUPS	Rp 950,000,000.00	10 KUPS	Rp 4,150,000,000.00		
		3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	10 Orang	Rp 200,000,000.00	10 Orang	Rp 200,000,000.00	10 Orang	Rp 300,000,000.00	10 Orang	Rp 300,000,000.00	10 Orang	Rp 300,000,000.00	50 Orang	Rp 1,300,000,000.00		
		3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Unit Usaha yang Dikembangkan	6 Kelompok	2 Kelompok	Rp 300,000,000.00	2 Kelompok	Rp 300,000,000.00	2 Kelompok	Rp 300,000,000.00	2 Kelompok	Rp 300,000,000.00	2 Kelompok	Rp 350,000,000.00	10 Kelompok	Rp 1,550,000,000.00		
		3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Calon Lokasi Perhutanan Sosial yang Difasilitasi	1 Unit	2 Unit	Rp 200,000,000.00	2 Unit	Rp 200,000,000.00	2 Unit	Rp 300,000,000.00	2 Unit	Rp 300,000,000.00	2 Unit	Rp 300,000,000.00	10 Unit	Rp 1,300,000,000.00		

Tabel 6.6 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan UPTD KPH Bulungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026												
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp					
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																							
		3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																							
		3	28	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Penunjang	100%	100	%	1,525,000,000	100	%	1,524,000,000	100	%	3,113,000,000	100	%	1,698,000,000	100	%	3,303,000,000	100	%	11,163,000,000	11,163,000,000		
		3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Kantor	12 Bulan	12	Bulan	200,000,000	12	Bulan	205,000,000	12	Bulan	210,000,000	12	Bulan	215,000,000	12	Bulan	220,000,000	60	Bulan	1,050,000,000	1,050,000,000		
		3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12	Bulan	200,000,000	12	Bulan	205,000,000	12	Bulan	210,000,000	12	Bulan	215,000,000	12	Bulan	220,000,000	60	Bulan	1,050,000,000	1,050,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawalan Kantor	100%	100	%	70,000,000	100	%	60,000,000	100	%	100,000,000	100	%	80,000,000	100	%	125,000,000	100	%	435,000,000	435,000,000		
		3	28	01	1.05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 steel	20	stell	20,000,000	0	stell		30	stell	30,000,000		stell		40	stell	40,000,000	90	stell	90,000,000	90,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.05	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	0 orang	18	orang	50,000,000	18	orang	60,000,000	20	orang	70,000,000	21	orang	80,000,000	22	orang	85,000,000	99	orang	345,000,000	345,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12	Bulan	575,000,000	12	Bulan	579,000,000	12	Bulan	592,000,000	12	Bulan	661,000,000	12	Bulan	677,000,000	60	Bulan	3,084,000,000	3,084,000,000		
		3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Komponen Listrik	12 Bulan	12	Bulan	5,000,000	12	Bulan	5,000,000	12	Bulan	6,000,000	12	Bulan	7,000,000	12	Bulan	8,000,000	60	Bulan	31,000,000	31,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 unit	20	unit	180,000,000	20	unit	180,000,000	22	unit	190,000,000	24	unit	200,000,000	24	unit	210,000,000	110	unit	960,000,000	960,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan bahan logistik kantor	12 Bulan	12	Bulan	60,000,000	12	Bulan	63,000,000	12	Bulan	65,000,000	12	Bulan	70,000,000	12	Bulan	73,000,000	60	Bulan	331,000,000	331,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	16,000,000	12	Bulan	17,000,000	60	Bulan	78,000,000	78,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.06	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	16,000,000	12	Bulan	16,000,000	12	Bulan	18,000,000	12	Bulan	19,000,000	60	Bulan	84,000,000	84,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12	Bulan	300,000,000	12	Bulan	300,000,000	12	Bulan	300,000,000	12	Bulan	350,000,000	12	Bulan	350,000,000	60	Bulan	1,600,000,000	1,600,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	%	255,000,000	100	%	255,000,000	100	%	266,000,000	100	%	282,000,000	100	%	291,000,000	100	%	1,349,000,000	1,349,000,000		
		3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang disediakan	12 Bulan	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	16,000,000	12	Bulan	17,000,000	60	Bulan	78,000,000	78,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	Bulan	35,000,000	12	Bulan	35,000,000	12	Bulan	36,000,000	12	Bulan	40,000,000	12	Bulan	42,000,000	60	Bulan	188,000,000	188,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	Bulan	5,000,000	12	Bulan	5,000,000	12	Bulan	5,000,000	12	Bulan	6,000,000	12	Bulan	7,000,000	60	Bulan	28,000,000	28,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12	Bulan	200,000,000	12	Bulan	200,000,000	12	Bulan	210,000,000	12	Bulan	220,000,000	12	Bulan	225,000,000	60	Bulan	1,055,000,000	1,055,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan Milik Daerah yang diadakan	0 unit	0	unit	-	0	unit	-	1	unit	1,500,000,000	0	unit	-	1	unit	1,500,000,000	2	unit	3,000,000,000	3,000,000,000		
		3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 unit	0	unit	-	0	unit	-	1	unit	1,500,000,000	0	unit	-	1	unit	1,500,000,000	2	unit	3,000,000,000	3,000,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya	11 Unit	16	unit	425,000,000	16	unit	425,000,000	17	unit	445,000,000	18	unit	460,000,000	21	unit	490,000,000	88	unit	2,245,000,000	2,245,000,000		
		3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	15	unit	250,000,000	15	unit	250,000,000	16	unit	270,000,000	17	unit	280,000,000	20	unit	290,000,000	83	unit	1,340,000,000	1,340,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	01	1.09	03	Penyewaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Yang di Sewa	1 unit	1	unit	175,000,000	1	unit	175,000,000	1	unit	175,000,000	1	unit	180,000,000	1	unit	200,000,000	5	unit	905,000,000	905,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
Meningkatkan pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat sejahtera	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	10%	10	%	2,700,000,000	10	%	2,970,000,000	10	%	2,070,696,063	10	%	3,208,342,023	10	%	2,385,929,155	50	%	13,334,967,241	13,334,967,241			
		3	28	03	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Dokumen yang di Hasilkan	1 Dok	1	Dok	250,000,000	1	Dok	270,000,000	1	Dok	270,000,000	1	Dok	300,000,000	1	Dok	330,000,000	5	Dok	1,420,000,000	1,420,000,000		
		3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 keg	1	Keg	100,000,000	1	Keg	120,000,000	1	Keg	120,000,000	1	Keg	130,000,000	1	Keg	150,000,000	5	Keg	620,000,000	620,000,000	UPTD KPH BULUNGAN
		3	28	03	1.01	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Kegiatan Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu	1 keg	1	Keg	150,000,000	1	Keg	150,000,000	1	Keg	150,000,000	1	Keg	170,000,000	1	Keg	180,000,000	5	Keg	800,000,000	800,000,000	UPTD KPH BULUNGAN

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi										
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)	(20)
	Tercapainya peningkatan hasil hutan kayu	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		20%	20	%	900,000,000	20	%	830,000,000	20	%	560,000,000	20	%	960,000,000	20	%	665,000,000	100	%	3,915,000,000		3,915,000,000	
		3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan	3 Kegiatan	5	Keg	150,000,000	5	Keg	130,000,000	6	Keg	150,000,000	6	Keg	150,000,000	7	Keg	180,000,000	29	Keg	760,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan perlindungan Hutan	10 kali	30	Kali	100,000,000	30	Kali	100,000,000	32	Kali	110,000,000	32	Kali	110,000,000	35	Kali	140,000,000	159	Kali	560,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	20 kali	50	Kali	650,000,000	40	Kali	600,000,000	25	Kali	300,000,000	50	Kali	700,000,000	28	Kali	345,000,000	193	Kali	2,595,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
	Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat	3	28	03	1.09		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas tutupan lahan bertambah dari kegiatan rehabilitasi dan luas lahan kritis berkurang	1.50%	2	%	500,000,000	2	%	550,000,000	3	%	460,000,000	4	%	580,000,000	4	%	560,000,000	15	%	2,650,000,000		2,650,000,000	
		3	28	03	1.09	01	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya Bibit Tanaman dalam Merehabilitasi Lahan	3300 batang	2000	btg	100,000,000	2000	btg	100,000,000	2000	btg	100,000,000	2100	btg	110,000,000	2100	btg	115,000,000	10200	btg	525,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.04	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah dokumen usaha Kehutanan	1 Dok	1	Dok	150,000,000	1	Dok	150,000,000	1	Dok	160,000,000	1	Dok	170,000,000	1	Dok	175,000,000	5	Dok	805,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.04	03	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Lahan Yang di Tanam	3.5 Ha	20	Ha	250,000,000	25	Ha	300,000,000	18	Ha	200,000,000	25	Ha	300,000,000	20	Ha	270,000,000	108	Ha	1,320,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.02		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	2%	2	%	1,000,000,000	2	%	1,270,000,000	2	%	729,696,063	2	%	1,310,342,023	2	%	770,929,155	10	%	5,080,967,241		5,080,967,241	
		3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sapras Operasional KPH	110 unit	120	unit	600,000,000	160	unit	850,000,000	60	unit	300,000,000	160	unit	845,342,023	70	unit	355,929,155	570	unit	2,951,271,178	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah kegiatan pembagian blok/petak Pengelolaan Hutan	3 Keg	3	keg	100,000,000	3	keg	100,000,000	3	keg	110,000,000	3	keg	115,000,000	3	keg	115,000,000	15	keg	540,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.01	04	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHUPdan RPHUPd	6 Dok	4	Dok	300,000,000	2	Dok	320,000,000	2	Dok	319,696,063	2	Dok	350,000,000	2	Dok	300,000,000	12	Dok	1,589,696,063	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan bersertifikat dan sesuai standar	0 batang	1000	btg	50,000,000	1000	btg	50,000,000	1000	btg	51,000,000	1100	btg	58,000,000	1150	btg	60,000,000	5250	btg	269,000,000		269,000,000	
		3	28	03	1.09	01	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sumber benih tanaman kehutanan yang bersertifikat	0 batang	1000	btg	50,000,000	1000	btg	50,000,000	1000	btg	51,000,000	1100	btg	58,000,000	1150	btg	60,000,000	5250	btg	269,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Ijin PS yang diterbitkan	9 Ijin	5	Ijin	1,064,367,173	5	Ijin	949,832,245	5	Ijin	550,000,000	5	Ijin	1,090,000,000	5	Ijin	615,000,000	25	Ijin	4,269,199,418		4,269,199,418	
		3	28	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KUPS yang meningkat kelasnya	0 KUPS	9	KUPS	1,064,367,173	8	KUPS	949,832,245	4	KUPS	550,000,000	9	KUPS	1,090,000,000	5	KUPS	615,000,000	35	KUPS	4,269,199,418		4,269,199,418	
		3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan dan Jumlah KTH yang didampingi	0 KUPS	5	KUPS	100,000,000	5	KUPS	100,000,000	4	KUPS	100,000,000	4	KUPS	110,000,000	4	KUPS	105,000,000	22	KUPS	515,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Unit perhutanan sosial yang terbentuk dan Jumlah Pengembangan Usaha KUPS	9 Unit	9	unit	864,367,173	8	unit	749,832,245	4	unit	350,000,000	9	unit	870,000,000	5	unit	400,000,000	35	unit	3,234,199,418	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	
		3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Prgoraama Penyuluh yang dibuat	3 Dok	1	dok	100,000,000	1	dok	100,000,000	1	dok	100,000,000	1	dok	110,000,000	1	dok	110,000,000	5	dok	520,000,000	UPTD KPH BULUNGAN	Bulungan	



Bab 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). *IKU (Indikator Kinerja Utama)* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Setiap perencanaan pembangunan di masing-masing Perangkat Daerah (PD) suatu wilayah otonomi daerah memiliki sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana sistem tersebut merupakan instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indikator atau target kegiatan yang dapat diukur, dinilai, dan dilaporkan secara menyeluruh terpadu dan valid untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing PD. Sistem tersebut juga merupakan alat untuk melakukan evaluasi, monitoring hingga bahan perencanaan kedepan oleh suatu PD dalam melihat efektivitas kinerja instansinya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diantisipasi atau diminimalisir.

Dalam menilai efektivitas suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibutuhkan suatu indikator kinerja yang merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh PD memiliki perbedaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD tersebut. Sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja merupakan sesuatu yang secara nyata dapat dihitung karena akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat



tingkatan kinerja, baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan PD di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki penetapan standar pelayanan sebagai cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang digunakan tidak terlepas dari teknis pengembangan kehutanan pada perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

Indikator kinerja tersebut dirumuskan dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan teknis pembangunan berbasis sektor kehutanan dengan acuan tujuan dan sasaran RPJMD itu sendiri. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya pengukuran kinerja dan penentuan indikator kinerja yang sesuai.

Permasalahan tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya, sedangkan pada bisnis hanya berorientasi pada mata uang, sebaliknya keuntungan usaha.

Meskipun begitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tetap berusaha optimal untuk menyusun indikator kinerja sebagai landasan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, indikator kinerja yang telah disusun melalui berbagai tahapan ini akan memacu setiap elemen di lingkungan Dinas untuk dapat meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran Dinas akan berbanding lurus dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :



Tabel 7.1 : Indikator Kinerja yang mengacu RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra PD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Renstra PD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Luas ijin legal terhadap peta indikatif perhutanan social	35 %	43 %	58 %	72 %	86 %	100 %	100 %
2	Luas Lahan Kritis	145.472 Ha	141.107 Ha	136.873 Ha	132.493 Ha	129.181 Ha	125.951 Ha	125.951 Ha
3	Persentase Kerusakan Hutan (deforestasi)	0,9%	0,9%	0,89%	0,89%	0,88%	0,88%	0,88%
4	Produksi Hasil Hutan Kayu	1.356.381 M3	1.492.019 M3	1.641.220 M3	1.805.342 M3	1.985.876 M3	2.184.463 M3	2.184.463 M3



Bab 8

PENUTUP

Perencanaan pembangunan urusan Kehutanan secara teknis dari masing-masing tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Tahun 2021 - 2026 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan, hingga pendanaan Dinas Kehutanan sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun ke depan.

Renstra Dinas juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja dalam mewujudkan visi dan misi instansi yang telah disepakati bersama. Selain itu, renstra juga memiliki posisi strategis dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan wilayah Kalimantan Utara.

Dalam perumusan renstra, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan rencana kegiatan, disamping memperhatikan perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan segala prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra akan dipertanggungjawaban dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dimana pelaksanaannya direalisasikan oleh rencana kerja tahunan sebagai turunan dari renstra.

Dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan yang dilihat dari kapasitas, kerjasama, hingga loyalitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing kewenangan, maka komitmen setiap jajaran Dinas menjadi suatu harapan bersama demi tercapainya pembangunan daerah.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 memuat strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Dinas Kehutanan selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat tercapai.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sangat diharapkan.



Dengan demikian, penting bagi Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan stake holder lainnya dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.



Tanjung Selor, Juni 2021
KEPALA DINAS,

IL SYARIFUDDIN, MMA
NIP. 19640215 199703 1 002